

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BUDAYA**
(STUDI PADA DESA KEMIREN, KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN
BANYUWANGI)

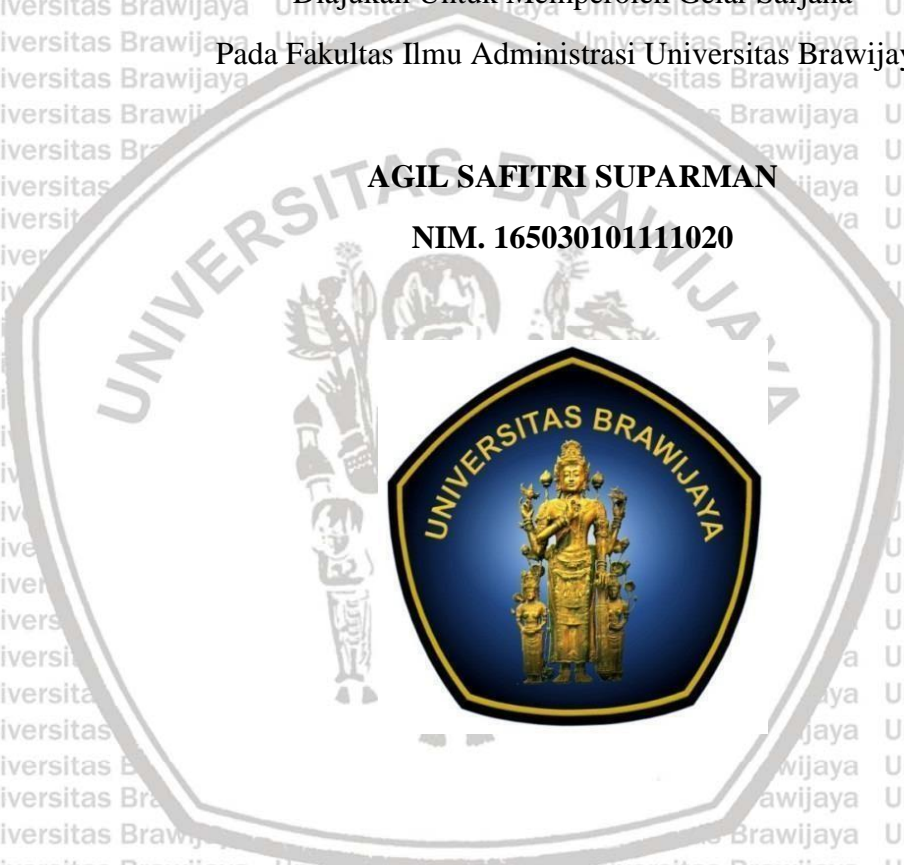
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

AGIL SAFITRI SUPARMAN

NIM. 165030101111020



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2020



MOTTO

**TUJUAN HIDUP ADALAH SUKSES DAN BAHAGIA DI AKHIRAT DAN
DI DUNIA**

Agil Safitri Suparman



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Banyuwangi, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 15 Maret 2021

Jam : 09.30 – 10.30 WIB

Skripsi Atas Nama : Agil Safitri Suparman

Judul : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Potensi Wisata Budaya (Studi Pada Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)

Dan dinyatakan

LULUS

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

Dr. Riyanto, M.Hum
NIP. 196004301986011011

Dr. Ike Wanusmawatie S.Sos, MAP
NIP. 197701012005022001

Majelis Penguji 1



Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 20190453122211001



Dr. Dra. Siti Rochmah, M.Si
NIP. 195703131986012001

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan
Potensi Wisata Budaya (Studi Pada Desa Kemiren,
Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)

Disusun oleh : Agil Safitri Suparman

NIM : 165030101111020

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 21 Januari 2021

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

Dr. Riyanto, M.Hum
NIP. 196004301986011011

Dr. Ike Wanusmawatie S.Sos, MAP
NIP. 197701012005022001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bawasannya sepanjang pengetahuan saya, dalam penulisan naskah skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Potensi Wisata Budaya (Studi Pada Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)”** tidak terdapat karya ilmiah atau sejenisnya yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terbukti terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh yaitu sarjana (S1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70.

Malang, 21 Januari 2021

Yang membuat pernyataan


Agil Safitri Suparman

RINGKASAN

Agil Safitri Suparman, 2020, **Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Potensi Wisata Budaya (Studi Pada Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)**. Dr. Riyanto, M.Hum Dr. Ike Wanusmawatie S.Sos, MAP., 175hal. +xii

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Kemiren dalam rangka pengembangan wisata budaya, dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kemiren dalam rangka pengembangan wisata budaya. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan administrasi publik dan administrasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, strategi pemberdayaan masyarakat, dan pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dibatasi dengan beberapa fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari 3 arah pemberdayaan yaitu *enabling*, *empowering* dan *protecting* serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan dalam pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren, namun belum sepenuhnya berhasil. Terdapat tiga aktor pemberdayaan yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Desa Kemiren, dan Pokdarwis Kencana Kemiren. Kemudian berdasarkan 3 arah pemberdayaan, kegiatan *enabling* dilakukan dengan pembentukan lembaga khusus kepariwisataan, mengadakan pertemuan rutin, mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan atau kegiatan kepariwisataan, serta melalui Program Pembangunan Rumah Adat. Lalu *empowering* dilakukan melalui studi banding, pelatihan, membangun sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepariwisataan, dan membentuk Pasar Kampung Osing. Sedangkan *protection* berupa peraturan dalam pelaksanaan Pasar Kampung Osing, Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata khususnya pada Bab VI Pasal 11.

Faktor yang mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren diantaranya kearifan lokal, partisipasi masyarakat, dukungan dari pemerintah, sarana dan prasarana kebersihan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya lahan parkir, kurangnya kompetensi SDM Pokdarwis Kencana Kemiren, dan kurangnya jaringan internet. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu pemerintah kabupaten menyerahkan pengelolaan Wisata Osing pada masyarakat Kemiren, pemerataan kegiatan kepariwisataan, menyediakan transportasi desa dan *wifi* di setiap destinasi wisata di Kemiren serta menambah petugas kebersihan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Budaya, Suku Osing, Desa Kemiren



SUMMARY

Agil Safitri Suparman, 2020, **Community Empowerment In Developing The Potential Of Cultural Tourism (Study In Kemiren Village, Kecamatan Glagah, Banyuwangi Regency)**. Dr. Riyanto, M.Hum Dr. Ike Wanusmawatie S.Sos, MAP., 175p. +xii

The purposes of this research are to describe and analyze community empowerment carried out in Kemiren Village in the context of developing cultural tourism, and to describe and analyze supporting and inhibiting factors in community empowerment in Kemiren Village in the context of developing cultural tourism. Theories and concepts used in this research are related to public administration and development administration, community empowerment, community empowerment strategies, and tourism. This research is a qualitative research with a descriptive approach that is limited by several research focuses. The focus in this research is community empowerment which is seen from 3 directions of empowerment, there are enabling, empowering and protecting as well as the factors that support and hold up the community empowerment for the development of the Kemiren Cultural Tourism Village.

The result of this research is indicate that community empowerment has been carried out in the development of the Kemiren Cultural Tourism Village, but were not successful. There are three empowerment actors, namely the Banyuwangi Regency Culture and Tourism Office, Kemiren Village Government, and Pokdarwis Kencana Kemiren. Based on 3 empowerment directions, enabling activities were carried out by establishing a special tourism institution, holding regular meetings, involving the community in tourism activities or activities, and through the Traditional House Development Program. Then empowering was carried out through comparative studies, training, building facilities and infrastructure to support tourism activities, and forming the Kampung Osing Market. While protection is in the form of regulations in the implementation of the Kampung Osing Market, Banyuwangi Regency Regulation Number 1 of 2017 concerning Tourism Villages, especially in Chapter VI Article 11.

Some factors that support community empowerment in the development of the Kemiren Cultural Tourism Village were include as local wisdom, community participation, support from the government, cleanliness facilities and infrastructure. Meanwhile, the inhibiting factors are the lack of public awareness, lack of parking space, lack of competence Pokdarwis Kencana Kemiren human resources, and lack of internet network. The suggestions in this research are the district government to hand over the management of Osing Tourism to the Kemiren community, equalize tourism activities, provide village transportation and wifi in each tourist destination in Kemiren and add some cleaning officers

Keyword: Community Empowerment, Culture, Osing's tribal, Kemiren Village

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Potensi Wisata Budaya (Studi Pada Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Fadillah Amin, Dr., M.AP., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Riyanto, M.Hum selaku Ketua Komisi Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, nasehat dan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Ibu Dr. Ike Wanusmawatie S.Sos, MAP tercinta selaku Anggota Komisi Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh ketelitian dan memberikan arahan, nasehat dan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Dr. Dra. Siti Rochmah, M.Si selaku Dosen penguji yang memberikan kritikan dan saran yang membangun bagi skripsi ini.
7. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, MS selaku Dosen penguji yang memberikan kritikan dan saran yang membangun dalam skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan berbagai ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan.
9. Para informan yang telah meluangkan waktunya dan memberikan banyak informasi, data, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:
 - a. Bapak Iswanto S.Pd, selaku Kepala Seksi Pengembangan Dan Pengelolaan Destinasi Wisata, H. Abdullah Fauzi selaku Staff Bidang Kebudayaan, Pak Darmanto selaku Staff Bidang Produksi Pariwisata, dan Deddy Wahyu Hernanda selaku Staff Kasubag Penyusun Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
 - b. Bapak Supriyanto selaku Sekretaris Desa Kemiren dan Bapak Mastuki selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Kemiren.
 - c. M. Edy Saputro selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kencana Kemiren dan Ade Permana selaku Sie Humas dan Pengembangan SDM Pokdarwis Kencana Kemiren.
 - d. Pelaku Kesenian dan Masyarakat Desa Kemiren.
10. Orang tua penulis yaitu Pak Suparman, Ibu Suhartatik dan Ibu Nurul serta semua keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memberi semangat.
11. Serta kepada Ninda, Annisa, Cece, dan Fauzan yang selalu mendukung, menyemangati dan mendoakan.
12. Serta teman-teman Grup SETIL (Alvi, Rendy, Ainun, Shelma, Rusmala, Jevan, dan Renaldy) yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
13. Serta seluruh pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 21 Januari 2021

Agil Safitri Suparman

DAFTAR ISI

MOTTO **i**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI **ii**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI **iii**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI **iv**

RINGKASAN **v**

SUMMARY **vi**

KATA PENGANTAR **vii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

DAFTAR GAMBAR **xii**

DAFTAR LAMPIRAN **xiii**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Rumusan Masalah 8

 1.3 Tujuan Penelitian 9

 1.4 Kontribusi Penelitian 9

 1.5 Sistematika Penelitian 9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA **12**

 2.1 Penelitian Terdahulu 12

 2.2 Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan 19

 2.3 Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Salah Satu Strategi Dalam Pembangunan

 20

 2.3.1 Konsep Pembangunan 20

 2.3.2 Paradigma Pembangunan 22

 2.3.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat 24

 2.3.4 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 27

 2.3.5 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pariwisata 29

 2.4 Pariwisata 30

 2.4.1 Konsep Pariwisata 30

 2.4.2 Potensi dan Daya Tarik Pariwisata 31

 2.4.3 Wisata Budaya 33

 2.5 Desa Wisata 36

 2.5.1 Konsep Desa Wisata 36

 2.5.2 Pengembangan Desa Wisata 37

BAB III. METODE PENELITIAN **39**

 3.1 Jenis Penelitian 39

 3.2 Fokus Penelitian 40

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian.....	41
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Instrumen Penelitian.....	45
3.7 Analisis Data.....	46
3.8 Keabsahan Data.....	48
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	50
4.1.1 Kondisi Geografis dan Demografi Kabupaten Banyuwangi.....	50
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi.....	52
4.2 Gambaran Umum Situs Penelitian.....	55
4.2.1 Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi).....	55
4.2.2 Gambaran Umum Desa Wisata Budaya Kemiren.....	56
4.3 Penyajian Data Penelitian.....	66
4.3.1 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren.....	66
4.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat.....	85
4.4 Analisis Data dan Pembahasan.....	97
4.4.1 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren.....	97
4.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat.....	106
BAB V. PENUTUP.....	116
5.1 Kesimpulan.....	116
5.1 Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN.....	125

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Data Kunjungan Wisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014-20185

TABEL 2.1 Penelitian Terdahulu Terkait Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata16

TABEL 4.1 Daya Tarik Wisata Desa Kemiren60

TABEL 4.2 Fasilitas Pendukung Kepariwisataaan Desa Kemiren63

TABEL 4.3 Struktur Kepengurusan Pokdarwis Kencana Kemiren65

TABEL 4.4 Daftar Pelatihan dari DISBUDPAR Kabupaetn Banyuwangi Untuk Pokdarwis Kencana Kemiren Tahun 2017-202079

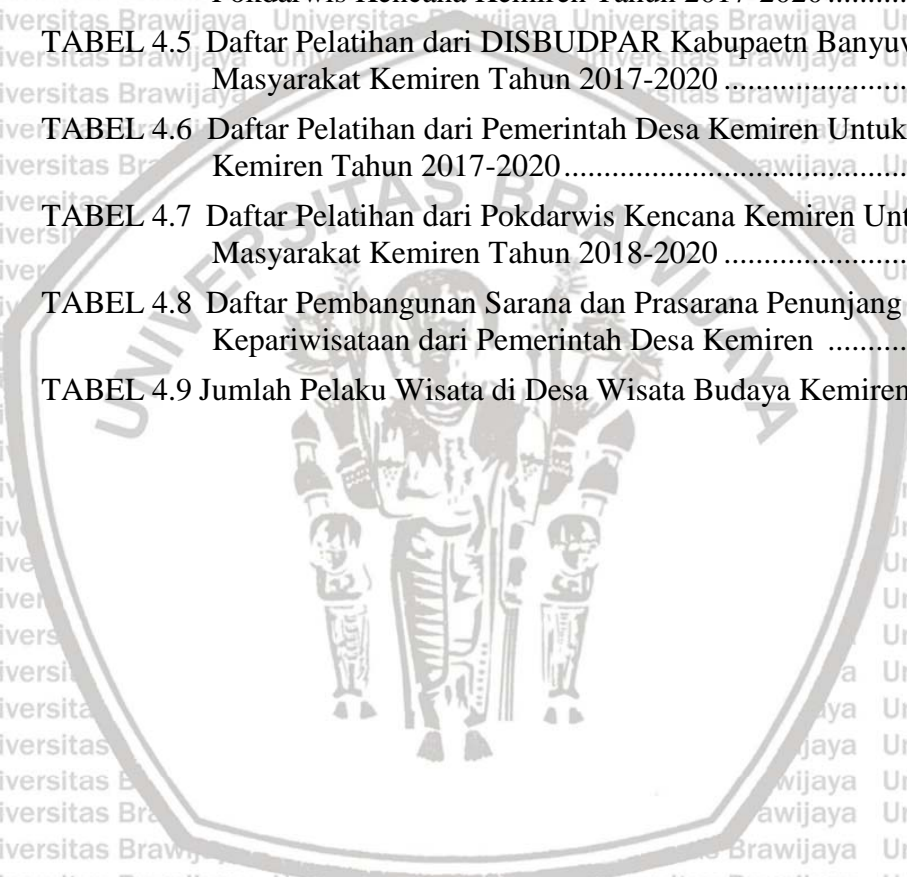
TABEL 4.5 Daftar Pelatihan dari DISBUDPAR Kabupaetn Banyuwangi Untuk Masyarakat Kemiren Tahun 2017-202080

TABEL 4.6 Daftar Pelatihan dari Pemerintah Desa Kemiren Untuk Masyarakat Kemiren Tahun 2017-202080

TABEL 4.7 Daftar Pelatihan dari Pokdarwis Kencana Kemiren Untuk Masyarakat Kemiren Tahun 2018-202081

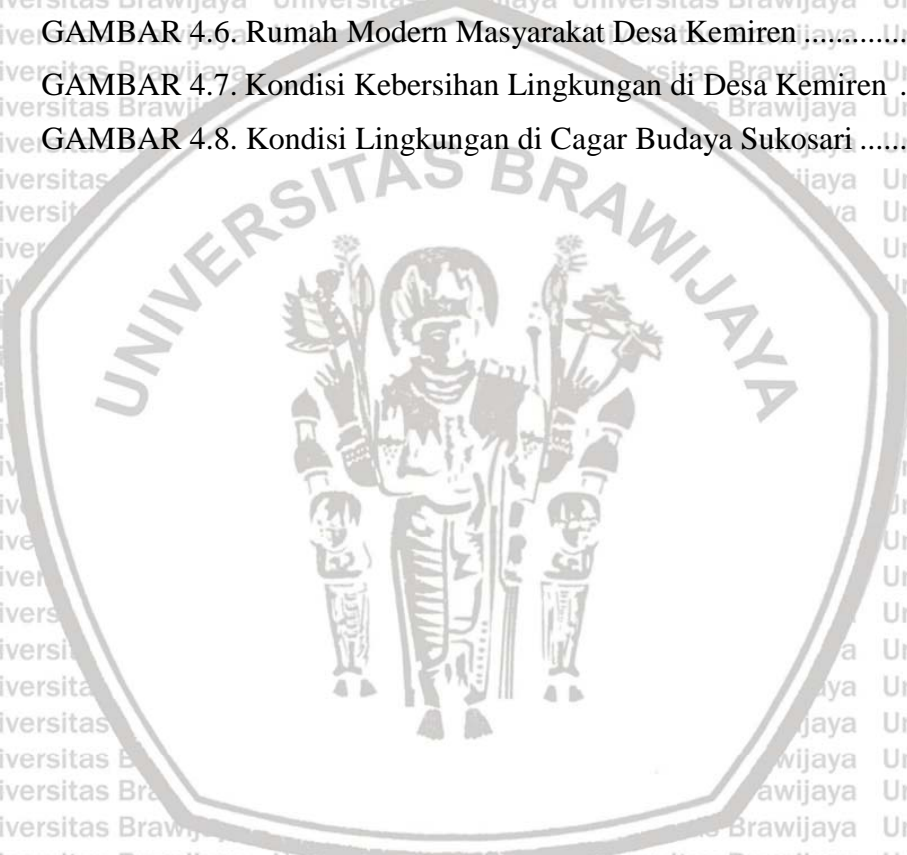
TABEL 4.8 Daftar Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kepariwisataaan dari Pemerintah Desa Kemiren82

TABEL 4.9 Jumlah Pelaku Wisata di Desa Wisata Budaya Kemiren92



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1. Tiga WPP Kabupaten Banyuwangi.....	5
GAMBAR 3.1. Analisis Data Penelitian Kualitatif	47
GAMBAR 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Banyuwangi	51
GAMBAR 4.2. Bagan Struktur DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi.....	56
GAMBAR 4.3. Bagan Struktur Pemerintah Desa Kemiren	57
GAMBAR 4.4. Peta Desa Kemiren	59
GAMBAR 4.5. Logo Pokdarwis Kencana Kemiren.....	64
GAMBAR 4.6. Rumah Modern Masyarakat Desa Kemiren	76
GAMBAR 4.7. Kondisi Kebersihan Lingkungan di Desa Kemiren	89
GAMBAR 4.8. Kondisi Lingkungan di Cagar Budaya Sukosari	89



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA/*INTERVIEW GUIDE*.....125

LAMPIRAN 2 SURAT PENGANTAR RISET127

LAMPIRAN 3 LOGBOOK PENELITIAN SKRIPSI FIA UB132

LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI134

LAMPIRAN 5 SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN POKDARWIS
KENCANA KEMIREN138

LAMPIRAN 6 *CURRICULUM VITAE*140



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) atau biasa disebut pembangunan yang berpusat pada manusia (*Human Centered Development*) menjadi hal penting dan perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM. Pembangunan SDM menjadi paradigma pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan pada era sekarang. Membangun aspek manusia adalah prioritas utama dalam pembangunan SDM, dimana apapun faktor pendorongnya harus ada peningkatan kapasitas masyarakat. Maka fokus utama pembangunan SDM adalah pada manusia itu sendiri dan pada kesejahteraannya untuk menciptakan SDM yang berkualitas, berkompeten, dan lainnya.

Friedmann (1992) dalam (Suryono, 2006:21) menawarkan konsep pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan. Menurut Mahbud Ul Haq (1998) dalam (Mardikanto dan Soebiato, 2017:20) pemberdayaan menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan masyarakat selain kesetaraan, keberlanjutan, dan produktifitas. Suparjan dan Suyatno (2003) dalam (Mulyawan, 2016:45) kemiskinan dan keterbelakangan disebabkan ketidakberdayaan akibat ketidakmampuan masyarakat pada tekanan struktural karena pembangunan pertumbuhan mengabaikan hak-hak kemanusiaan, sehingga melalui pemberdayaan masyarakat, dapat memperkuat kemampuan masyarakat yang ada dalam kemiskinan, ketidakmampuan dan ketidakmandirian. Dari 3 ahli tersebut maka pembangunan SDM dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pendekatan dalam pembangunan masyarakat yang memberi ruang dan kesempatan pada masyarakat sebagai subyek dan pengguna hasil-hasil pembangunan untuk menentukan sendiri program dan tujuan pembangunan sesuai masalah, kebutuhan, dan potensi lingkungan setempat (Mulyawan, 2016:48-49). Lanjutnya pemberdayaan dapat menjadi instrumen efektif dalam mendistribusikan pemerataan pendapatan kepada seluruh masyarakat sehingga dapat memacu munculnya pelaku usaha yang lebih merata di kalangan masyarakat bawah. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Maka pemberdayaan masyarakat adalah pemanfaatan dan pengelolaan SDM dengan meningkatkan kemampuan dan kualitasnya agar menjadi individu yang partisipatif dan mandiri. Dimana pemberdayaan dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, karena pemberdayaan dapat memampukan, memandirikan dan menjauhkan rakyat dari ketertinggalan, kesenjangan, ketergantungan dan ketidakberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kapasitas dan kualitas SDM perlu dilakukan khususnya pada sektor yang berkaitan erat dengan masyarakat salah satunya sektor pariwisata. Kini pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata menjadi *trend* yang banyak dilakukan di beberapa destinasi wisata dan penting untuk pengembangan pariwisata. Bahkan muncul konsep pengembangan pariwisata melalui pariwisata berbasis masyarakat atau disebut *Community Based*

Tourism (CBT) sebagai wujud pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat.

Kusudianto Hadinoto menjelaskan bahwa berdasarkan survei yang ia lakukan terkait pentingnya sifat/ciri daya tarik dalam pengembangan pariwisata, masyarakat lokal mendapatkan urutan tertinggi dan sikap masyarakat lokal dalam kepariwisataan sangat perlu untuk ditekankan atau ditingkatkan (Hadinoto, 1996:20). Maka masyarakat menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor pariwisata, sehingga peningkatan SDM melalui pemberdayaan untuk pengembangan pariwisata penting dan perlu dilakukan.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2010-2014 dan 2015-2019, permasalahan terkait kurangnya kesiapan masyarakat atau rendahnya kualitas masyarakat di sekitar destinasi wisata telah lama menjadi permasalahan dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Padahal telah banyak destinasi wisata yang dikenal wisatawan nusantara bahkan wisatawan mancanegara, namun tidak diimbangi dengan kesiapan SDM pariwisata. Hal itu mengakibatkan beberapa permasalahan seperti kurang profesionalnya pengelolaan destinasi, kurang terawatnya destinasi wisata, adanya eksploitasi berlebihan bahkan terjadi kerusakan lingkungan dan lainnya. Untuk mencegah berbagai permasalahan yang timbul karena rendahnya kualitas SDM pariwisata diperlukan pemberdayaan masyarakat di daerah destinasi wisata. Menurut Rencana Strategis Kementerian Pariwisata, pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan serta menanam nilai dan tujuan pariwisata sehingga masyarakat bisa mengembangkan daerahnya sebagai destinasi wisata yang bertanggung jawab.

Pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat juga telah menjadi perhatian Provinsi Jawa Timur. Dalam Rencana Induk Pariwisata

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032, menyebutkan salah satu strategi dalam pengembangan destinasi pariwisata adalah dengan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan karena adanya masalah tentang rendahnya SDM sebagai pelaku di industri kepariwisataan baik dari kapasitasnya, kualitasnya maupun partisipasinya. Strategi tersebut juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pengembangan wisata.

Berdasarkan Perda Kabupaten Banyuwangi No. 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu strategi pengembangan pariwisata di Banyuwangi. Pemberdayaan dilakukan pada masyarakat sekitar destinasi wisata dan pada organisasi pariwisata masyarakat di destinasi tersebut, dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pariwisata, meningkatkan partisipasi masyarakat, melalui pendidikan, pelatihan dan lainnya. Hal tersebut dilakukan selain karena permasalahan rendahnya SDM pariwisata juga agar masyarakat sekitar destinasi wisata mandiri dan mendapat manfaat dari adanya pariwisata atau bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak destinasi wisata dan menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur. Itu dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisnus maupun wisman di Banyuwangi yang selalu meningkat. Jumlah wisnus di Banyuwangi tahun 2014 sebesar 1.464.948 orang meningkat menjadi 4.939.934 orang pada tahun 2018 dan rata-rata menghabiskan uang sebesar Rp 1.638.000. Tidak hanya wisatawan lokal, destinasi wisata di Banyuwangi juga dikunjungi oleh wisman, dimana pada tahun 2014 terdapat 30.681 wisman meningkat signifikan menjadi 99.198 orang di tahun 2018 dengan rata-rata menghabiskan uang Rp 3.700.000. Berikut ini data wisatawan di Banyuwangi:

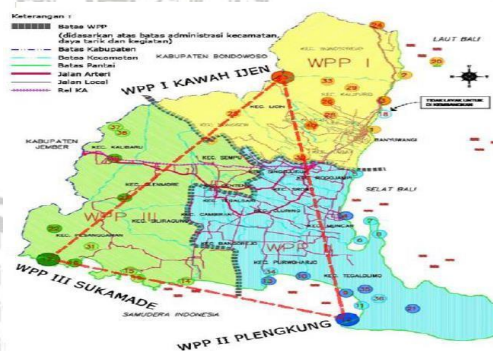
Tabel 1.1 Data Kunjungan Wisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014-2018

Tahun	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara
2014	1.464.948	30.681
2015	1.926.179	46.214
2016	4.022.449	77.139
2017	4.832.999	98.970
2018	4.939.934	99.198

Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi (2019)

Berbagai keuntungan dari adanya pariwisata, maka perlu dilakukan pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata harus dilakukan secara menyeluruh, terencana dan terkendali dengan mendorong dan menggali potensi dan daya tarik wisata secara optimal. Sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat baik dalam segi perekonomian, sosial dan budaya.

Pemerintah Banyuwangi melalui RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 telah melakukan pengembangan pariwisata dengan mengelompokkan objek wisata ke 3 Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP), seperti gambar berikut:



Gambar 1.1 Tiga WPP Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten Banyuwangi (2012)

Berdasarkan gambar diatas, tiga kelompok WPP atau disebut wisata unggulan Segi Tiga Berlian (*The Diamond Triangle*) di Banyuwangi yaitu:

1. WPP I, dengan objek wisata andalannya adalah Kawah Ijen.
2. WPP II, dengan objek wisata andalannya adalah Pantai Pelengkung.
3. WPP III, dengan objek wisata andalannya adalah Pantai Sukamade.

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi, setiap kelompok WPP tersebut memiliki destinasi wisata penyangga yang ada di sekitar destinasi wisata unggulan. Destinasi wisata penyangga dibagi dalam beberapa kategori yaitu daya tarik wisata buatan, wisata alam dan wisata budaya. Salah satu destinasi wisata penyangga dalam kelompok WPP tersebut adalah Desa Wisata Budaya Kemiren. Desa tersebut masuk wisata penyangga dalam WPP I khususnya sebagai wisata budaya.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032, Desa Kemiren memiliki potensi wisata budaya khususnya budaya Suku Osing yang merupakan penduduk asli Banyuwangi. Dimana dari 20% jumlah penduduk Osing yang ada di Banyuwangi sebagian besar tinggal di Desa Kemiren (RIPDA Kabupaten Banyuwangi, hal 9091). Potensi wisata berupa Budaya Suku Osing yang khas serta adat tradisi yang kuat dan masih dijalankan sebagai kebiasaan masyarakatnya seperti Ider Bumi, Mocoan Lontar Yusuf dan lainnya menjadikan Desa Kemiren sebagai desa wisata budaya. Penetapan Desa Kemiren sebagai desa wisata budaya juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pendapatan asli desa, dan untuk melestarikan kearifan lokal di Desa Kemiren.

Desa Kemiren mulai menjadi perhatian wisatawan sejak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi menempatkan 3 event dalam Program Banyuwangi Festival di Desa Kemiren yaitu Festival Barong Ider Bumi, Festival Tumpeng Sewu, dan Kopi Sepuluh Ewu. Desa Kemiren yang semakin menjadi perhatian masyarakat dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung. Pada

Tahun 2017 terdapat 4.228 wisatawan, dan meningkat menjadi 8.473 pada Tahun 2018 dengan persentase pengunjung wisnus sebesar 88%, dan 12%nya adalah wisman (Pokdarwis Kencana Kemiren, 2019).

Namun kenyataannya Desa Wisata Budaya Kemiren masih belum berkembang dengan baik. Berdasarkan hasil observasi dalam pra riset yang dilakukan pada bulan Desember Tahun 2019 di Desa Kemiren, kebersihan lingkungan seperti di Kawasan Cagar Budaya Sukosari, di pemukimanarganya dan lainnya masih kurang, dimana beberapa fasilitas pariwisata dalam kondisi kurang terawat. Selain itu kegiatan pariwisatanya hanya berpusat di Desa Kemiren bagian tengah dan belum terdistribusi secara merata sehingga belum semua masyarakat Desa Kemiren merasakan manfaat dari pengembangan pariwisata.

Selain itu berdasarkan data dari Pokdarwis Kencana Kemiren (2019), masyarakat yang terlibat secara langsung pada kegiatan pariwisata hanya 9% dari jumlah masyarakat Desa Kemiren. Padahal menurut Fitriani dan Ma'rif, (2017:2) yang paling utama dalam pengembangan pariwisata adalah partisipasi masyarakat lokalnya, dimana mereka berperan penting sejak awal pembentukan hingga dijalankannya kegiatan desa wisata. Mengingat kearifan lokal dan tradisi budaya masyarakat menjadi penggerak utama dalam kegiatan wisata di Desa Kemiren, maka pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren sangat tergantung pada proses pemberdayaan masyarakat. Seperti halnya Wearing (2002), dimana menurutnya keberhasilan pengembangan desa wisata budaya sangat tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal.

Pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren perlu dilakukan melihat adanya potensi wisata budaya yang dimiliki masyarakat Desa Kemiren, dan adanya beberapa permasalahan terkait pengelolaan. Selain itu juga karena dengan

adanya pengembangan desa wisata maka dapat membangun desa dan secara tidak langsung akan menjadi desa mandiri dan merubah perekonomian Desa Kemiren menjadi lebih baik. Dengan begitu maka pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan potensi wisata budaya Desa Kemiren perlu dilakukan. Pentingnya kajian tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Wisata Budaya Desa Kemiren juga terkait dengan keberadaan Desa Kemiren sebagai salah satu destinasi tujuan wisata yang sedang berupaya mengembangkan pariwisatanya, baik secara ekonomi maupun sosiokultural. Serta agar Desa Kemiren dapat menjadi objek wisata budaya yang unggul dan mampu membangun desanya secara mandiri dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam hal ini penelitian ditekankan pada pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata budaya. Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian ini dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Potensi Wisata Budaya (Studi Pada Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)”**. Perlunya penelitian ini dikarenakan masyarakat Desa Kemiren memiliki potensi budaya dengan daya tarik tersendiri di sektor pariwisata sehingga perlu dilakukan pengembangan wisata budaya Desa Kemiren, dimana dalam pengembangan tersebut perlu adanya pemberdayaan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat di Desa Kemiren dalam rangka pengembangan potensi wisata budaya?

2. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat di Desa Kemiren dalam rangka pengembangan potensi wisata budaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Kemiren dalam rangka pengembangan wisata budaya.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kemiren dalam rangka pengembangan wisata budaya.

1.4 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dari adanya penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu administrasi publik. Selain itu diharapkan pula hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian yang akan datang terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan wisata budaya di Desa Kemiren.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berisi susunan secara garis besar dari keseluruhan karya ilmiah dengan maksud dan tujuan memberi gambaran menyeluruh tentang

isi dari penulisan karya ilmiah ini. Dengan begitu diharapkan dapat diketahui dan dimengerti secara jelas maksud dan tujuan dari setiap bab. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari lima sub bab, pertama diawali oleh latar belakang yaitu uraian tentang latar belakang penelitian dan permasalahan yang disajikan secara umum terkait pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan wisata budaya di Desa Kemiren. Kedua, perumusan masalah untuk menentukan permasalahan apa yang diteliti. Ketiga, tujuan penelitian yaitu menentukan tujuan atau sasaran yang diteliti. Keempat, manfaat penelitian yaitu mencakup manfaat dalam sisi akademis dan dalam sisi praktis. Kelima, dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat uraian tentang penelitian terdahulu, pengertian, konsep dan kerangka teoritis yang membahas landasan teoritis yang digunakan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian terdahulu, konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini menjadi pendukung dalam pelaksanaan penelitian dan proses menganalisis. Beberapa teori dan konsep tersebut diantaranya: administrasi publik dan administrasi pembangunan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, strategi pemberdayaan masyarakat, dan pariwisata.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan dan penyusunan laporan penelitian. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, serta keabsahan data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi yaitu Kabupaten Banyuwangi, situs penelitian yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dan Desa Wisata Budaya Kemiren, penyajian data pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren dan faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, serta analisis data dan pembahasan pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren dan faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan menjabarkan secara singkat dari hasil penelitian dan pembahasan dari pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren beserta faktor pendukung dan penghambatnya, kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan dan saran ini. Sedangkan saran berisi masukan untuk bahan pertimbangan dalam pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat menjadi data pendukung, referensi, dan acuan dalam penelitian. Selain itu dapat menambah dan memperkuat permasalahan yang dibahas di penelitian. Penelitian terdahulu yang dijadikan data pendukung adalah penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi atau acuan dalam penelitian ini:

1. Supartini (2012)

Kajian ini dilakukan oleh Supartini pada tahun 2012 dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi Desa Wisata Ketingan Kabupaten Sleman Di Yogyakarta”. Kajian ini berfokus pada proses pemberdayaan masyarakat, upaya dan penguatan kelembagaan terhadap pemberdayaan masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan. Kajian ini pendekatannya kualitatif dengan metode deskriptif.

Hasil dari kajian ini yaitu proses pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Ketingan dengan membentuk organisasi desa wisata yang dilengkapi dengan Tim Pengelola Desa Wisata, dan membentuk kelompok kecil seperti Kelompok Ternak Kandang Ngudi Lestari, Kelompok Simpan Pinjam Rukun Abadi dan lainnya, untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan warga. Upaya dan penguatan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pembentukan paket wisata terpadu dengan Model Manajemen Kluster yang sangat bermanfaat

dan erat hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat, karena melibatkan warga dari 2 (dua) desa di Kecamatan Mlati, dan komunitas UKM (Usaha Kecil Menengah) yang berada dalam 3 (tiga) sentra yaitu sentra Desa Wisata Ketingan, Desa Wisata Sendari dan Mina Kepis Burikan. Selain itu juga dilakukan dengan pembentukan program peningkatan SDM bidang konservasi dan Bidang Pariwisata. Faktor pendukung pengelolaan Desa Wisata Ketingan yaitu papan informasi dan peta wisata, SDM yang banyak dan berkualitas, SDA yang indah dan subur, serta potensi seni dan budaya. Sedangkan faktor penghambatnya kurang maksimalnya SDM, pendanaan, kerukunan dan kepengurusan.

2. I Wayan Mudana (2015)

Kajian dilakukan oleh I Wayan Mudana pada tahun 2015 dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Tujuan Wisata Desa Pemuteran Dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan”. Kajian ini berfokus pada bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Pemuteran. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari kajian ini yaitu, pertama strategi pemberdayaan dilakukan secara terpadu baik bersifat mikro, mezzo maupun makro. Kedua, kebijakan pemberdayaan terdiri dari pengembangan SDM, ekonomi, kelembagaan, sarana dan prasarana, maupun informasi. Ketiga, pemberdayaannya didukung oleh berbagai pihak yaitu masyarakat, sipil, ekonomi, dan politik. Keempat, pemberdayaan masyarakat Desa Pemuteran mendukung pelestarian alam dan sosial kultural, serta mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan.

3. Tiara Putri Exsy Fathoni (2016)

Penelitian ini dilakukan Tiara Putri Exsy Fathoni pada tahun 2016 dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Desa Wisata (Studi Pada Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo)”. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian ini, pertama pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan desa wisata dilihat dari pengembangan SDM dan modal, peningkatan peran masyarakat dan penyediaan informasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Fokus kedua, kendala pemerintah daerah pada pengembangan kawasan desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini yaitu pengembangan desa wisata oleh Pemerintah Desa Wirun melalui pemberdayaan masyarakat terdiri dari pengembangan SDM dan modal, peningkatan peran serta masyarakat dan penyediaan informasi. Kendalanya adalah kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya kemampuan dan wawasan masyarakat terkait kepariwisataan, sulitnya akses sumber dana.

4. Arfina Fitri Haryati (2017)

Kajian dilakukan Arfina Fitri Haryati di tahun 2017 berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengembangkan Potensi Wisata (Studi Pada Wisata Air Terjun Sedudo Desa Ngliman Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk)”. Fokus penelitian ini adalah strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata serta faktor penghambat dan pendukung. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah strategi pemberdayaan yang digunakan pemerintah dalam mengembangkan potensi wisata dengan melibatkan masyarakat lokal meliputi strategi perencanaan

pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keberlanjutan kepariwisataan, mengutamakan pertumbuhan, dan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.

Faktor pendukung strategi ini adalah adanya daya tarik dari potensi wisata dan kesadaran masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kepemilikan wilayah lahan wisata.

5. Dinar Wahyuni (2018)

Penelitian dilakukan Dinar Wahyuni pada tahun 2018 dengan judul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul”. Kajian ini berfokus pada strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

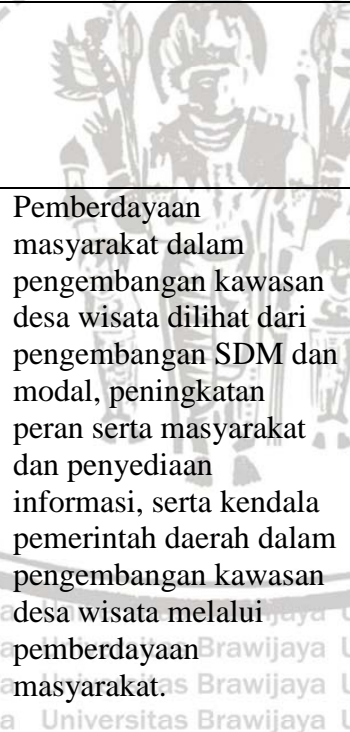
Hasil dari kajian ini adalah pemberdayaan di Desa Wisata Nglanggeran dilakukan melalui tiga strategi yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penyadaran dilakukan dengan sosialisasi dan inovasi oleh karang taruna desa hingga Desa Nglanggeran disepakati menjadi desa wisata.

Sedangkan pengkapasitasan masyarakat dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan mengenai manajemen desa wisata dan membentuk Kelompok

Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) berdasarkan musyawarah sebagai bentuk pengkapasitasan sistem nilai. Lalu, pendayaan yaitu dilakukan pada masyarakat yang telah memiliki kapasitas.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Terkait Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata

No	Peneliti, Judul & Metode	Fokus	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Supartini (2012), "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi Desa Wisata Ketingan Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta", Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	1. Proses Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Ketingan 2. Upaya dan penguatan kelembagaan terhadap pemberdayaan masyarakat 3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	1. Proses pemberdayaan dilakukan oleh LPMD Ketingan 2. Upaya dan penguatan kelembagaan dilakukan dengan membentuk paket wisata terpadu Model Manajemen Kluster serta peningkatan SDM bidang konservasi dan pariwisata 3. Faktor pendukung yaitu: peta wisata dan papan informasi, SDM banyak dan berkualitas, SDA indah dan subur, serta potensi Seni dan Budaya. Faktor penghambat antara lain: SDM kurang maksimal, pendanaan, kerukunan dan kepengurusan	Persamaannya yaitu membahas tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, metode penelitiannya kualitatif deskriptif, dari salah satu faktor pendukungnya yaitu potensi seni dan budaya, dan salah satu faktor penghambatnya yaitu kurang maksimalnya SDM	Perbedaannya yaitu dari fokus penelitiannya, dari lokasi penelitiannya dan dari menganalisisnya yang menggunakan konsep dari Wrihatnolo dan Dwidjowijoto yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.
2.	I Wayan Mudana (2015), "Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Tujuan Wisata Desa Pemuteran Dalam Rangka Pengembangan Pariwisata	Bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Pemuteran	1. Strategi pemberdayaan bersifat mikro, mezzo, dan makro 2. Kebijakan pemberdayaan terdiri dari pengembangan SDM, ekonomi, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta pengembangan informasi 3. Pemberdayaan di dukung oleh masyarakat, sipil, ekonomi, dan politik 4. Pemberdayaan mendukung pelestarian alam, sosial kultural, dan	Persamaannya yaitu membahas tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata budaya, metode penelitiannya kualitatif deskriptif, dan dari salah satu program atau kegiatan pemberdayaanya yaitu pengembangan sarana dan	Perbedaan yaitu dari fokus penelitian, lokasi penelitian, dan dari menganalisisnya yang menggunakan mikro, mezzo dan makro, serta menggunakan konsep dari Jack Rothman yaitu tiga model pengembangan

	Berkelanjutan”, Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.		pengembangan pariwisata berkelanjutan	prasarana	masyarakat berupa pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial dan aksi sosial
3.	Tiara Putri Exsy Fathoni (2016), “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Desa Wisata (Studi Pada Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo)”, pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.	Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan desa wisata dilihat dari pengembangan SDM dan modal, peningkatan peran serta masyarakat dan penyediaan informasi, serta kendala pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat.	1. Pengembangan kawasan desa wisata dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari pengembangan SDM dan modal, peningkatan peran serta masyarakat dan penyediaan informasi 2. Kendalanya adalah rendahnya kemampuan dan wawasan masyarakat terkait kepariwisataan, kurangnya saran dan prasarana, sulitnya akses sumber dana.	Persamaan yaitu membahas tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata, metode penelitiannya kualitatif deskriptif, dan dari salah satu kendalanya yaitu kurangnya saran prasarana serta rendahnya kemampuan masyarakat	Perbedaannya yaitu dari fokus penelitiannya, dari lokasi penelitiannya dan dari menganalisanya yang menggunakan
4.	Afrina Fitri Haryati (2017), “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengembangkan Potensi Wisata (Studi Pada Wisata Air Terjun Sedudo Desa	Strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata serta faktor penghambat dan pendukung strategi pemberdayaan masyarakat dalam	1. Strategi pemberdayaannya meliputi strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keberlanjutan kepariwisataan, strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang mengutamakan pertumbuhan, dan strategi perencanaan pembangunan	Persamaannya yaitu membahas tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi wisata, dan dari metode penelitiannya kualitatif deskriptif	Perbedaannya yaitu dari fokus penelitiannya, dari lokasi penelitiannya dan dari menganalisanya yang menggunakan strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang

	Ngliman Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk)", pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.	mengembangkan potensi wisata Air Terjun Sedudo Desa Ngliman	kepariwisataan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. 2. Faktor pendukungnya daya tarik potensi wisata dan kesadaran masyarakat 3. Faktor penghambatnya kepemilikan wilayah lahan wisata		bertumpu keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan mengutamakan pertumbuhan
5.	Dinas Wahyuni (2018), "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul"; pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.	Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran	1. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga strategi yaitu penyadaran berupa sosialisasi dan inovasi oleh karang taruna desa hingga Desa Nglanggeran disepakati menjadi desa wisata; pengkapasitasan berupa pelatihan dan pendampingan mengenai manajemen desa wisata dan membentuk pokdarwis; serta pendayaan yang dilakukan untuk masyarakat yang telah memiliki kapasitas.	Persamaannya yaitu membahas tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, dari metode penelitiannya kualitatif deskriptif, dan dari pengkapasitasannya berupa pelatihan	Perbedaannya yaitu dari fokus penelitiannya, dari lokasi penelitiannya dan dari menganalisanya yang menggunakan konsep dari Wrihatnolo dan Dwidjowijoto yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

Sumber: data diolah dari beberapa jurnal penelitian terdahulu (2019)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa belum ada yang mengkaji terkait pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren. Namun 5 penelitian itu berkontribusi dalam pengembangan wawasan, data pendukung, referensi, dan sebagai acuan di penelitian ini. Lima penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

Persamaannya berkaitan dengan pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi wisata. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan konsep yang digunakan dalam menganalisis pemberdayaan masyarakatnya. Kajian ini penting dilakukan karena berkaitan dengan keberadaan Desa Kemiren sebagai salah satu destinasi tujuan wisata yang sedang berupaya melakukan pengembangan pariwisata baik secara ekonomi maupun sosiokultural.

2.2. Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan

Administrasi publik didefinisikan menjadi 3 makna oleh John M. Pfiffner dan Robert V. Prethuis (1960) dalam (Syafie, 2006:23) diantaranya yaitu:

1. Administrasi publik meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi publik sebagai koordinasi usaha-usaha perseorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah, hal ini utamanya meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara global administrasi publik adalah sesuatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahannya dan teknik, serta memberikan arah dan maksud.

Makmur (2003:5) mendefinisikan administrasi sebagai bentuk “aksi” dari pemerintahan atau sebagai alat dan sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintah.

Definisi dari dua tokoh tersebut maka dadiketahui dalam administrasi publik terdapat kehendak, keinginan, dan/atau harapan dari publik yaitu pemerintah, masyarakat ataupun stakeholder yang diwujudkan melalui kebijakan. Administrasi publik sebagai wadah, alat dan aktor yang mengkoordinasikan, menyelenggarakan kehendak, keinginan, kebutuhan dan harapan publik melalui kebijakan.

Menurut J.B. Kristadi (1998) dalam (Anggara, 2016:24), administrasi pembangunan merupakan administrasi negara yang mendorong ke arah proses perubahan, pembaharuan, penyesuaian dan pendukung suatu perencanaan.

Mustopadidjaja (1976) dalam (Anggara, 2016:24) mengartikannya sebagai “ilmu dan seni” mengenai pembangunan suatu sistem administrasi negara dilaksanakan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif. Sedangkan menurut Tjokroamodjojo (1995) dalam (Listyaningsih, 2014:18) adalah pengendalian usaha (administrasi) oleh negara (pemerintah) untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan didalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Maka administrasi pembangunan adalah penyelenggaraan suatu kegiatan yang dilakukan Negara untuk mencapai pembangunan yang telah direncanakan, sehingga ada perbaikan.

Dalam penelitian ini diharapkan kegiatan yang dilakukan organisasi publik di sektor pariwisata bersinergi dengan arah pembangunan yang untuk memajukannya.

2.3. Pemberdayaan Masyarakat Salah Satu Strategi Dalam Pembangunan

2.3.1. Konsep Pembangunan

Pembangunan mengandung kata “*capacity*” yaitu kemampuan individu maupun kelompok, “*equity*” yaitu kesejahteraan dan “*sustainability*” yaitu

kepercayaan masyarakat dan kemampuan secara mandiri. Menurut Siagian (2005:9) pembangunan sebagai usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas untuk pembinaan bangsa. Hadad (1980) dalam (Mardikanto dan Soebiato, 2017:3) menjelaskan maksud, tujuan dan makna yang terkandung dalam pembangunan merujuk pada arah positif, lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia secara individu maupun bagi masyarakat. Dengan begitu maka pembangunan adalah aktivitas yang dilakukan terencana dengan maksud memberi perubahan kearah yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Briyant dan White dalam (Suryono, 2004:35) menjelaskan empat implikasi utama yang perlu diperhatikan dalam pembangunan diantaranya yaitu:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan system nilai dan kesejahteraan (*equity*).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai kemampuan yang ada pada dirinya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).

Riyadi (1981) dalam (Mardikanto dan Soebiato, 2017:3) mengartikan pembangunan sebagai usaha/proses perubahan untuk mencapai kesejahteraan atau mutu hidup masyarakat dan individu yang melaksanakan pembangunan itu.

Menurut Kartasasmita (1997) dalam (Mardikanto dan Soebiato, 2017:9)

pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam artian luas. Maka pembangunan bidang apapun tujuannya menciptakan pertumbuhan, kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan hidup masyarakat.

2.3.2. Paradigma Pembangunan

Wrihatnolo dan Dwijiwinoto (2007) dalam (Suryono, 2006:15) mengemukakan tahapan-tahapan konsep pembangunan atau beberapa paradigma pembangunan yang dikembangkan di Indonesia antara lain:

1. Strategi Pertumbuhan

Pembangunan fokus pada akumulasi kapital nasional, dimana GNP menjadi ukuran keberhasilannya. Peningkatan pendapatan perkapita diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan terkait pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan di negara berkembang. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang tinggi membawa dampak negatif di bidang sosial dan lingkungan hidup seperti kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, dan ketergantungan negara berkembang pada negara maju.

2. Pertumbuhan Dengan Pemerataan

Pembangunan mengarah pada penciptaan lapangan pekerjaan secara langsung pada masyarakat untuk mendistribusikan pertumbuhan dan kesejahteraan yang dihasilkan perekonomian nasional. Namun paradigma ini dalam menciptakan lapangan pekerjaan hanya diserap orang yang pendidikan dan berketrampilan.

3. Teknologi Tepat Guna

Paradigma ini menggunakan teknologi tepat guna untuk mengurangi pengangguran melalui peningkatan produktivitas kerja, perluasan kesempatan kerja, peningkatan dinamika dan kreativitas masyarakat dalam bekerja dan

berfikir, serta mempersiapkan masyarakat yang mandiri, mampu menerima perubahan dan pembaharuan teknologi.

4. Kebutuhan Dasar

Konsep dasar paradigma kebutuhan dasar adalah penyediaan kebutuhan minimal masyarakat yang tergolong miskin. Kebutuhan minimum tersebut berupa sandang, pangan, papan, dan kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, dan sanitasi. Pendekatan ini dikonsepsikan dengan pendekatan yang bersifat "*community development*".

5. Pembangunan Berkelanjutan

Paradigma ini beranggapan SDA berada pada kondisi yang memprihatinkan dalam menunjang keberlanjutan pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Kesadaran akan krisis lingkungan hidup, melahirkan kesadaran akan konsekuensi dari pembangunan yang berlebihan. Sehingga di pembangunan harus menjaga lingkungan demi generasi sekarang dan generasi mendatang.

6. Pemberdayaan

Fokus dalam paradigma ini adalah lokalitas masyarakat, karena *civil society* lebih siap diberdayakan melalui isu-isu lokal. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga di bidang politis agar masyarakat memiliki posisi tawar (*bargaining position*) baik secara nasional maupun internasional.

7. Pembangunan Berpusat Pada Manusia atau Pembangunan Masyarakat

Paradigma pembangunan manusia menegaskan hakekatnya pembangunan ditujukan untuk manusia serta unsur manusia, sosial budaya, dan lainnya.

Paradigma pembangunan era sekarang, lebih mengarah ke pembangunan berpusat pada manusia, yang menekankan pada pemberdayaan. Mahbud Ul Haq memandang pembangunan masyarakat sebagai proses meningkatkan kapasitas

masyarakat secara berkelanjutan yang bisa dilakukan melalui pemberdayaan untuk mencapai kesejahteraan. Menurutnya komponen penting pembangunan manusia yaitu kesetaraan memperoleh kesempatan, keberlanjutan, produktifitas, dan pemberdayaan (Mahbud UI Haq (1998) dalam (Mardikanto dan Soebiato, 2017:20). Menurut Chamber (1995) dalam (Mardikanto dan Soebiato, 2017:41), pemberdayaan sebagai konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai sosial sehingga mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment* dan *sustainable*. Dengan begitu maka pemberdayaan masyarakat menjadi bagian/salah satu cara dalam paradigma pembangunan masyarakat atau pembangunan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

2.3.3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto dan Soebiato, (2017:56) pemberdayaan adalah keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan hasil produksi pembangunan guna memenuhi kebutuhan yang terus bertambah secara berkelanjutan. Lanjutnya pemberdayaan masyarakat juga sebagai upaya memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal melalui tindakan kolektif dan *networking* sehingga memiliki kemampuan dan kemandirian ekonomi, ekologi dan sosial. Menurut World Bank (2001) dalam (Mardikanto dan Soebiato, 2017:28) adalah upaya memberikan kesempatan dan kemampuan pada kelompok masyarakat untuk mampu dan berani menyuarakan pendapat, ide, gagasan, serta kemampuan dan keberaniannya untuk memilih sesuatu metode, produk, tindakan, dan lainnya yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Secara khusus bagi Sumodiningrat (2003) dalam (Mardikanto dan Soebiato, 2017:31) adalah upaya memberikan kesempatan dan

atau memfasilitasi kelompok tertentu terutama yang tidak/kurang memiliki daya agar memiliki akses terhadap sumber daya yang berupa modal, teknologi, informasi dan lainnya. Hal tersebut agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi kehidupan yang lebih baik atau sejahtera.

Dari beberapa konsep tersebut, maka pemberdayaan masyarakat adalah proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan juga sebagai upaya penyediaan pada masyarakat atas sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya serta dapat berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Dalam pemberdayaan terdapat proses pemberian kekuasaan/wewenang pada individu ataupun kelompok masyarakat tertentu agar memiliki keberdayaan dibidang tertentu atau dibeberapa aspek, kehidupan masyarakat seperti pendidikan, politik, ekonomi, sosial budaya, pariwisata dll.

Menurut Kartasasmita (1996) dalam (Zubaedi, 2013:79) pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 arah pemberdayaan. 3 arah tersebut yaitu:

1. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Artinya, setiap masyarakat sebenarnya telah memiliki potensi sendiri, sehingga pada saat melaksanakan langkah-langkah pemberdayaan diupayakan dapat mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi yang telah dimiliki.
2. *Empowering*, yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.

Artinya, langkah pemberdayaan diupayakan agar melalui aksi-aksi yang

nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, pasar serta sarana prasarana lainnya.

3. *Protection*, yaitu melindungi masyarakat. Hal ini berarti dalam pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan langkah-langkah yang dapat mencegah persaingan secara tidak seimbang serta praktik eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah, melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah.

Menurut Cook dan Macaulay (1997) dalam (Maani, 2011:59), pemberdayaan dilakukan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali laku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide, keputusan, dan tindakannya. Dimana pemberdayaan menurut mereka mengarah pada pendelegasian secara sosial dan etika moral agar dapat menumbuhkan keberdayaan masyarakat, dengan mengacu pada pemberdayaan yang berasal dari dalam dan luar masyarakat. Menurut Cook dan Macaulay pemberdayaan dapat dilihat dari akronim "ACTORS", berikut penjabarannya yaitu:

1. *Authority* (wewenang) yaitu masyarakat diberikan kewenangan untuk melakukan sesuatu dan merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi milik mereka sendiri. Sehingga mereka merasa perubahan yang dilakukan hasil produk dari keinginan mereka untuk perubahan lebih baik
2. *Competenci* (kemampuan), yaitu menimbulkan rasa percaya diri dan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan.
3. *Trust* (kepercayaan), yaitu percayaan atau yakin pada masyarakat bahwa mereka mempunyai potensi untuk berubah dan "mereka harus bisa"

4. *Oportunities* (kesempatan), yaitu memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginan sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai potensi yang ada dalam diri mereka.
5. *Responsibilities* (tanggung jawab), yaitu memberikan tanggung jawab kepada masyarakat agar dapat melakukan perubahan melalui pengelolaan sehingga dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik.
6. *Supports* (dukungan), yaitu memberikan dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, budaya, sosial dan sebagainya yang akan dilakukan secara simultan tanpa dominasi salah satu faktor.

2.3.4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Swift dan Levin (1987) dalam (Mardikanto dan Soebiato, 2017:27) pemberdayaan sebagai usaha meningkatkan kemampuan orang atau kelompok rentang dan lemah agar memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatannya, memperoleh barang dan jasa yang diperlukan, serta dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Lalu Subejo dan Supriyanto (2004) dalam (Mardikanto dan Soebiato, 2017:45) menyebutkan tujuan pemberdayaan sebagai berikut:

1. Sebagai upaya untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective action* (aksi kolektif) dan *networking* (jaringan) sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi.
2. Proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara profesional dan menjadi pelaku utama dalam

memanfaatkan diri secara proporsional serta memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Theresia, dkk (2014:153) menjelaskan tujuan pemberdayaan masyarakat beserta upaya perbaikannya. Tujuan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Perbaikan kelembagaan yaitu dengan perbaikan kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
2. Perbaikan usaha yaitu dengan perbaikan pendidikan, aksesibilitas, kegiatan dan kelembagaan diharapkan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
3. Perbaikan pendapatan yaitu dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan yaitu perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan baik fisik maupun sosial karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan kemiskinan atau pendapatan terbatas.
5. Perbaikan kehidupan yaitu tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaikan masyarakat yaitu keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik, diharapkan akan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Berdasarkan tiga tokoh tersebut, ada tiga *point* yang dapat disimpulkan dari tujuan pemberdayaan masyarakat. Pertama pemberdayaan untuk mengubah perilaku masyarakat, yaitu mengubah menjadi lebih produktif dan partisipatif.

Kedua untuk mengembangkan kemampuan/potensi dan sumberdaya yang ada

dalam diri masyarakat maupun di lingkungan masyarakat. Ketiga, yang utama adalah menjadikan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Kaitannya dalam penelitian ini maka dari 3 tujuan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat diterapkan dan dapat mendukung pengembangan di sektor pariwisata

2.3.5. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pariwisata

Masyarakat menjadi salah satu bagian terpenting dalam pengembangan pariwisata. Peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata dapat dilihat dari partisipasi atau peran serta mereka dalam mengelola pariwisata. Harun (2014:14), menggolongkan peran serta masyarakat di kepariwisataan dalam beberapa golongan, diantaranya sebagai berikut:

1. Masyarakat Sadar Wisata yaitu masyarakat yang memahami pentingnya pengembangan pariwisata. Lebih lanjut, masyarakat sadar wisata lebih memahami dan mengetahui tugas, fungsi dari pembangunan pariwisata beserta permasalahan yang dihadapi.
2. Tingkat Kesadaran Wisata yaitu pengembangan nyata yang melibatkan semua lapisan masyarakat atau semua stakeholder pelaku pariwisata seperti pemerintah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat, dan lainnya.
3. Menggalang Peran Serta Masyarakat yaitu usaha yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan partisipasi di dalam masyarakat.

Melihat peran-peran masyarakat tersebut maka perlu adanya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Sunaryo (2013:219) mengungkapkan pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata harus diarahkan pada beberapa hal. Beberapa hal tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat selaku pelaku penting dalam pengembangan pariwisata.

2. Meningkatkan peran, posisi dan kualitas keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
3. Meningkatkan pengaruh, nilai dan manfaat positif dari pengembangan pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan pariwisata.

Selanjutnya, Sunaryo (2013:219) juga menyatakan bahwa pihak pemerintah ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberdayakan masyarakat di sektor pariwisata harus memegang prinsip-prinsip dasar pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip dasar pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata tersebut yaitu:

1. Tahap demi tahap prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk kebutuhan masyarakat diberikan atau diletakkan pada masyarakat.
2. Fokus utamanya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memobilisasi sumber daya yang ada dalam komunitas atau masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka.
3. Menghargai keberagaman dan keunikan lokal sehingga pengembangan pariwisata disesuaikan dengan kondisi lokal.

2.4. Pariwisata

2.4.1. Konsep Pariwisata

Pariwisata didefinisikan Spillane (1987) dalam (Hadiwijoyo, 2012:42) sebagai perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, dan dilakukan perseorangan ataupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dalam dimensi sosial budaya dan ilmu.

Menurut Suwantoro (2004:3), hakikat pariwisata merupakan proses berpergian oleh seseorang atau lebih ketempat yang bukan tempat tinggalnya. Maka pariwisata adalah pergi menuju suatu objek wisata baik seorang diri ataupun lebih untuk kepentingan kebudayaan, sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hiburan atau sekedar menambah pengalaman dan ilmu.

Wahab (1975:55) memandang pariwisata sebagai salah satu jenis industri yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan dan standar hidup serta menstimulasi sector produktif lainnya. Pariwisata menjadi sektor yang kompleks atau memiliki *multiplier efec* yang bermanfaat khususnya dibidang perekonomian. Melalui pariwisata, industri klasik seperti kerajinan tangan, cinderamata, penginapan dan transportasi dapat hidup atau terealisasi. Menurut Muljadi dan Warman (2014:13) dalam pariwisata ada aktivitas pelayanan atas produk yang dihasilkan di industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman bagi wisatawan. Maka dalam pariwisata ada potensi dan produk berupa barang jasa yang disuguhkan/dijual masyarakat pada wisatawan. Produk dan industri yang dimiliki objek wisata secara langsung menjadi sumber pendapatan masyarakat.

2.4.2. Potensi Dan Daya Tarik Pariwisata

Potensi wisata menurut Pendit (2004:117) adalah berbagai sumber daya suatu daerah yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik serta atraksi wisata dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek lain. Maka potensi wisata adalah sesuatu yang memiliki daya tarik wisata dan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke destinasi tersebut sehingga industri setempat berkembang. Pendit membagi potensi wisata sebagai berikut:

1. Potensi Budaya

Potensi ini tumbuh dan berkembang di masyarakat berupa adat istiadat, mata pencaharian, kesenian, dan budaya. Industri pariwisata mengakui budaya sebagai faktor penarik untuk promosi karakteristik budaya di suatu tempat.

Potensi budaya yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata yaitu:

- a. Bangunan bersejarah, monument, galeri seni, situs budaya kuno.
- b. Seni dan patung kontemporer, arsitektur kecil, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, industri film dan penerbit.
- c. Seni pertunjukan drama, lagu daerah, teater jalanan, ekspedisi foto, festival dan event khusus lainnya.
- d. Peninggalan keagamaan seperti candi, masjid, situs.
- e. Kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sanggar, teknologi tradisional, sistem kehidupan setempat.
- f. Perjalanan ke tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik (kuda, dongkar, sikar, dll).

2. Potensi Alam

Potensi yang ada di lingkungan masyarakat berupa potensi fisik dan geografis seperti alam. Potensi ini dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata seperti keajaiban dan keindahan alam; keragaman flora dan fauna; vegetasi alam; kehidupan satwa liar; rekreasi perairan; objek magalitik, dan lainnya.

Hadiwijoyo (2012:49) membedakan daya tarik wisata berdasarkan objek wisatanya. Berikut tiga daya tarik wisata menurut Hadiwijoyo yaitu:

1. Objek daya tarik wisata alam, yaitu mengandalkan potensi alam yang secara alami dimiliki, sehingga memiliki daya tarik bagi pengunjung

kemudian berkembang mejadi objek wisata. Seperti wisata pantai, danau, hutan, wisata air terjun dan lainnya.

2. Objek daya tarik wisata sosial budaya, yaitu mengandalkan potensi sosial budaya sebagai daya tarik yang dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi objek wisata. Seperti kesenian, pertanian, situs arkeologi, peninggalan sejarah, upacara adat, kerajinan, dan lainnya.
3. Objek daya tarik wisata minat khusus, yaitu mengutamakan wisatawan yang mempunyai motivasi khusus. Daya tarik yang dikembangkan mengarah pada segala aktivitas untuk memenuhi keinginan wisatawan.

Beberapa daya tarik wisata tersebut perlu didukung dengan komponen-komponen yang dapat meningkatkan daya tarik wisata. Menurut Sunaryo (2013:159) kerangka pengembangan destinasi wisata harus menyangkut beberapa komponen utama. Komponen tersebutlah yang dikembangkan dalam pariwisata diantaranya sebagai berikut yaitu:

1. *Attraction* (objek dan daya tarik), yaitu motivasi untuk mengunjungi suatu destinasi wisata seperti objek alam, budaya, buatan dan minat khusus.
2. *Accessibility* (aksesibilitas), yaitu jaringan transportasi dan informasi merupakan aspek penting dalam mendukung pengembangan pariwisata. Dapat berupa transportasi lokal, terminal dan lainnya.
3. *Amenities* (amenitas), yaitu serangkaian fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata terkait kebutuhan akomodasi. Amenities dapat berupa agen perjalanan, penginapan, tempat makan dan lainnya.
4. *Ancillary service* (fasilitas pendukung), yaitu ketersediaan fasilitas pendukung wisatawan guna memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berwisata, seperti perbankan, toko cinderamata, rambu wisata dll.

5. *Institution* (kelembagaan), yaitu keberadaan dan peran setiap unsur pelaksana kegiatan pariwisata. Unsur organisasi atau institusi pengelola kepariwisataan berupa pemerintah, swasta maupun masyarakat. Intinya adalah organisasi kepariwisataan dalam pelayanan wisata.

2.4.3. Wisata Budaya

Budaya menurut Berry (1999) dalam (Tuloli, dkk, 2003:2) adalah keseluruhan yang kompleks yang terdiri dari pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat kebiasaan, kapabilitas lain dan kebiasaan apa yang diperoleh seseorang sebagai anggota suatu masyarakat. menurut Tuloli dkk (2003:150) budaya sebagai sikap, kebiasaan dan tradisi yang hidup dan terpelihara disuatu masyarakat yang tercermin dalam tingkah laku pendukungnya. Menurutnya budaya sebagai sistem atau gagasan yang menjadi pedoman bertingkah laku di kehidupan masyarakat sebagai perwujudan rasa, cipta, karsa dan karya manusia. Maka budaya adalah hal khusus/unik berupa fisik maupun non fisik yang diciptakan dan dilakukan disuatu masyarakat. Hal tersebut dapat berupa adat tradisi, seni, bangunan dan lainnya yang memiliki nilai di masyarakat tersebut.

Kebudayaan memiliki beberapa unsur yang dianggap sebagai *culture universal*. Menurut Koentjaraningrat (1992) dalam (Kutha R, 2011:396) terdapat tujuh unsur dalam kebudayaan. Tujuh unsur tersebut diantaranya yaitu:

1. Peralatan Kehidupan Manusia (Teknologi), yaitu yang mempermudah melaksanakan aktivitas kehidupan manusia. Berbagai bentuk peralatan dikaitkan dengan kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti rumah, pakaian, alat rumah tangga, dan lainnya.
2. Sistem Mata Pencarian atau ekonomi merupakan segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi

kehidupan manusia. Sistem mata pencaharian meliputi jenis pekerjaan dan penghasilan sesuai sistem ekonomi dan produksinya masing-masing.

3. Sistem Kemasyarakatan (Organisasi Sosial) merupakan sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Sistem kemasyarakatan berupa kekerabatan, asosiasi dan perkumpulan, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, perkumpulan, politik, hukum dll.

4. Sistem Bahasa sebagai media menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada orang lain. Melalui bahasa manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama, dan mempermudah dalam membaurkan dirinya dengan segala bentuk masyarakat. Bahasa sebagai sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya dalam berinteraksi, berkomunikasi/berhubungan dengan sesamanya. Bahasa sebagai sistem perlambangan manusia dalam bentuk lisan, tulisan atau gerakan (bahasa isyarat) untuk berkomunikasi.

5. Kesenian mengacu pada nilai keindahan (estetika) yang berasal dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata atau telinga. Kesenian ditujukan untuk menampilkan nilai-nilai keindahan.

Kesenian dapat berupa seni rupa, seni suara, seni gerak, patung/pahat, lukisan, gambar, rias, vocal, musik, bangunan, kesusastraan, dan lainnya.

6. Sistem Pengetahuan (Cara Berfikir) sangat mempengaruhi cara kerja seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem ini meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, waktu, ruang dan bilangan, sifat dan tingkah laku sesama manusia, tubuh manusia dan berbagai bentuk pengalaman manusia dalam kaitannya dengan hakikat

objektivitas, fakta empiris dan lainnya. Sistem pengetahuan juga dilihat dari pertanian, perbintangan, perdagangan, hukum, politik dan lainnya.

7. Sistem Religi yaitu sistem terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal suci dan tidak terjangkau akal.

Manusia percaya adanya kekuatan supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia serta berkomunikasi dan mencari hubungan dengan kekuatan supranatural itu. Sistem ini bentuk pengalaman manusia dengan subjektivitas, keyakinan dan kepercayaan, dimana kepercayaan tersebut membentuk pengalaman pribadi dan sosial. Sistem religi meliputi nilai dan pandangan hidup, kepercayaan, komunikasi dan upacara keagamaan.

Unsur kebudayaan dapat menjadi potensi atau daya tarik di bidang pariwisata khususnya wisata budaya. Menurut Nugroho dan D. Negara (2015:9) wisata budaya adalah jenis pariwisata yang memanfaatkan kekayaan budaya, nilai tradisi, sejarah, situs dan kehidupan etnik tertentu. Wisata budaya juga dilihat sebagai aktivitas pariwisata yang dinamis dan berkaitan dengan pengalaman unik dan indah dari berbagai warisan masyarakat yang disuguhkan pada wisatawan. Wisata ini menjadi media pengembangan kebudayaan, dimana kekuatan budaya lokal yang memiliki *unique selling point* dijadikan dasar memasyarakatkan keunggulan komparatif dari segi budaya dan kepariwisataan. Wisata ini bisa berupa festival budaya, adat istiadat, kesenian, kuliner dll.

2.5. Desa Wisata

2.5.1. Konsep Desa Wisata

Desa wisata diartikan oleh hadiwijoyo (2012:68) sebagai kawasan yang menawarkan keseluruhan suasana yang asli dan khas dari suatu pedesaan, baik

dari kehidupan sosial ekonomi, adat istiadat, sosial budaya, struktur tata ruang desa, arsitektur bangunan, kegiatan perekonomian yang khas, maupun potensi yang dimiliki untuk dikembangkan menjadi komponen kepariwisataan seperti atraksi, akomodasi, makanan dan kebutuhan wisata lain. Sedangkan Nuryanti (1993:2) mengartikan desa wisata sebagai bentuk pengembangan wisata yang mengintegrasikan atraksi, aktivitas, aksesibilitas, akomodasi dan fasilitas lain sebagai komponen pendukung kegiatan pariwisata yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat dan menyatu dengan tata cara dan tradisi setempat.

Dengan begitu, desa wisata merupakan bentuk pengembangan potensi desa dimana ada persyaratan tertentu bagi suatu desa bisa ditetapkan desa wisata.

Desa dapat ditetapkan sebagai desa wisata jika memiliki potensi atau daya tarik wisata baik berupa alam ataupun budaya dan harus ditunjang dengan komponen-komponen kepariwisataan berupa atraksi, akomodasi, aksesibilitas dan lainnya. Selain itu, desa wisata merupakan wujud dari konsep *community based tourism*, dimana masyarakat dalam desa wisata berupaya mengembangkan potensinya baik potensi alam, budaya maupun potensi SDMnya (masyarakat setempat). Tujuan adanya desa wisata agar desa tersebut bisa menjadi desa yang mandiri karena dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang bisa dimasuki oleh masyarakat setempat atau penyerapan tenaga kerja (Fildzah A'inun N, dkk, 2014:2). Sehingga jika dilihat dari tujuan dan konsepnya, maka dalam pengembangan desa wisata sangat berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

2.5.2. Pengembangan Desa Wisata

Munir & Fitanto, (2008) dalam (Fitari dan Ma'rif, 2017:2), menyatakan pengembangan desa wisata penting untuk karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dengan menciptakan lapangan pekerjaan,

merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi dan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan penyediaan layanan bagi warganya. Menurut Fitri dan Ma'rif, (2017:2) yang paling utama adalah partisipasi masyarakat lokalnya, dimana mereka berperan penting sejak awal pembentukan hingga dijalankannya kegiatan desa wisata, dimana bentuk partisipasi berupa mengelola sumber daya yang ada, serta sebagai pihak yang menjalankan dan menerima manfaat dari adanya desa wisata. Maka masyarakat memiliki peran penting dan perlu dilibatkan dalam pengembangan desa wisata dari awal hingga akhir. Sehingga tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, memandirikan desa dan masyarakat serta melestarikan alam dan budaya setempat akan segera terwujud.

Fokus utama pengembangan desa wisata yaitu memperkuat kemampuan masyarakat lokal dalam mengarahkan dan mengatasi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhannya (Fitri dan Ma'rif, 2017:4). Maka pernyataan tersebut mendukung pembahasan sebelumnya bahwa dalam pengembangan desa wisata erat kaitannya dengan pemberdayaan. Menurut Suarhana, dkk (2015) dalam (Fitri dan Ma'rif, 2017:4), pemberdayaan masyarakat di desa wisata berfungsi untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya lokal pariwisata yang dimiliki serta mendorong peluang usaha. Pentingnya pemberdayaan juga didukung oleh Fildzah A'inun N, dkk, (2014:4), dimana dengan memberdayakan masyarakat, mereka akan mampu mengembangkan potensinya sendiri, dengan pemberdayaan masyarakat dilatih untuk bisa menolong dirinya sendiri (*self help*), sehingga pada pembangunan desa wisata, masyarakat dikembangkan dan diberdayakan untuk mampu mengelola desa wisatanya sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (1995) dalam Gunawan (2014:

83) adalah proses penelitian untuk memahami masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar belakang yang alamiah. Menurut Sugiyono (2005) dalam (Gunawan, 2014: 81), masalah di penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatife, dan berkembang atau berganti setelah peneliti terjun ke lapangan. Dalam hal ini, terdapat tiga kemungkinan dalam penelitian kualitatif.

Pertama masalah di penelitian sama atau tetap, kedua masalah di penelitian semakin berkembang setelah memasuki penelitian, ketiga masalah di penelitian berubah total setelah dilapangan. melalui pendekatan kualitatif akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.

Tujuan dari penelitian kualitatif menurut Gunawan (2014:80) adalah mengembangkan konsep sensitif pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran *grounded theory* dan mengembangkan pemahaman dari fenomena yang dihadapi. Penelitian kualitatif juga untuk memahami perilaku manusia dari kerangka acuan peneliti sendiri dengan berusaha memahami dan menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan subyek penelitian. Dengan begitu penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan

menguraikan fakta serta fenomena nyata yang terjadi dilapangan khususnya terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata budaya yang ada di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian untuk memfokuskan atau membatasi masalah yang diteliti agar tidak terlalu luas dan tidak terjadi pembiasaan dalam mengartikan dan mengkaji subjek masalah yang diteliti. Batasan di penelitian menentukan realita untuk mempertajam fokus dan penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus (Meleong, 2009: 12). Dalam hal ini, sasaran dan fokus menjadi batasan dan titik pangkal peneliti dalam penelitian terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata budaya di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi agar lebih terarah, tidak meluas dan relevan dengan objek penelitian. Berikut fokus dalam penelitian ini:

1. Pemberdayaan masyarakat Desa Kemiren dalam rangka pengembangan potensi wisata budaya dikaji melalui Peraturan Daerah Banyuwangi No 1 tahun 2017 Tentang Desa Wisata, program pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata dari Pemerintah Banyuwangi, Pemerintah Desa Kemiren, dan pokdarwis, serta melalui 3 arah pemberdayaan masyarakat yaitu *enabling* (Memungkinkan), *empowering* (Memperkuat Potensi), dan *protection* (Melindungi).
2. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat di Desa Kemiren dalam rangka pengembangan potensi wisata budaya:
 - a. Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat Desa Kemiren dalam rangka pengembangan potensi wisata budaya:

- b. Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat Desa Kemiren dalam rangka pengembangan potensi wisata budaya:

3.3. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai lokasi penelitian karena salah satu kabupaten yang sedang gencarmelakukan pengembangan di sektor pariwisata. Selain itu juga dikarenakan memiliki daya tarik dan potensi pariwisata khususnya wisata budaya.

Situs penelitian adalah tempat memperoleh data dan informasi yang dapat menjawab permasalahan yang sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti. Dengan begitu, maka situs penelitian pada penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Desa Kemiren. Alasan menjadikan Desa Kemiren sebagai situs penelitian dikarena merupakan desa wisata budaya yang kaya akan kearifan lokal. Selain itu juga dikarenakan situs penelitian tersebut dapat dijangkau.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Menurut Arikunto (2010:172) sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Kriteria data dalam penelitian kualitatif haruslah data yang pasti yaitu data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap (Sugiyono, 2011:2). Adapun jenis data yang digunakan dalam yaitu:

1. Data Primer

Data primer menurut Sugiyono (2011:225) adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada intinya data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari penelitian dilapangan berupa penjelasan dan penjabaran dari wawancara dengan narasumber yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis penelitian. Di penelitian ini, data primer diperoleh dari beberapa informan yaitu pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tepatnya Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata, Bidang Kebudayaan, dan Bidang Produksi; Pemerintah Desa Kemiren tepatnya Sekretaris Desa dan Seksi Pelayanan Desa Kemiren; Pengurus Pokdarwis Kencana Kemiren; serta seniman dan masyarakat Kemiren

2. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Husein Umar (2013:42), adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer/pihak lain bisa dalam bentuk tabel/diagram. Data ini diperoleh dari peneliti lain, catatan dari instansi terkait, atau dari manapun yang sudah diolah peneliti (Pasolong, 2012). Maka data sekunder adalah data yang sudah dioleh bias dalam laporan, arsip, tabel, diagram, dan dokumen yang diperoleh selama proses penelitian.

Data sekunder yang menjadi pendukung dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata budaya di Desa Kemiren yang bersumber dari jurnal, buku, internet, laporan, perencanaan dan dokumen. Sumber buku yang menjadi arahan berpikir dan sumber informasi peneliti yang berkaitan dengan pembangunan yang berpusat pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pengembangan

pariwisata, wisata budaya, dan desa wisata. Sumber internetnya yaitu informasi yang menunjang dan memperkuat data penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2011:224) adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2011:225), dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi partisipasi (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu:

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2011:226), adalah aktivitas mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara langsung mengenai objek penelitian untuk memperoleh data akurat dari sumber data yaitu fakta kenyataan di lapangan. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara mengunjungi, mengamati dan mencatat fenomena terkait pemberdayaan masyarakat di wisata budaya Desa Kemiren.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2011:231), pengertian wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang akurat. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara interview pada sumber data primer khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam wisata budaya Desa Kemiren

melalui lesan, tulisan, merekam dan dokumentasi dengan narasumber menggunakan metode secara langsung secara terstruktur. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada:

- a. Bapak Iswanto S.Pd, selaku Kepala Seksi Pengembangan Dan Pengelolaan Destinasi Wisata DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi
- b. Bapak H. Abdullah Fauzi selaku Staff Bidang Kebudayaan DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi
- c. Bapak Darmanto selaku Staff Bidang Produksi Pariwisata DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi
- d. Bapak Deddy Wahyu Hernanda selaku Staff Kasubag Penyusun Program DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi.
- e. Bapak Supriyanto selaku Sekretaris Desa Kemiren
- f. Bapak Mastuki selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Kemiren.
- g. M. Edy Saputro selaku Ketua Pokdarwis Kencana Kemiren
- h. Ade Permana selaku Anggota Pokdarwis Kencana Kemiren.
- i. Ibu Siamah, Ibu Nita, dan Bapak Jamari selaku masyarakat Dusun Kedaleman
- j. Ibu Sriwati, Bapak Sugiarto, dan Bapak Indra selaku masyarakat dan pelaku seni di Dusun Krajan

3.3. Dokumentasi

Dokumentasi didefinisikan Sugiyono (2011:240) sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi menjadi salah satu cara pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan mempelajari, mencari, mencatat dimana dapat berbentuk berupa foto, video, rekaman suara, peninggalan tertulis seperti arsip, buku, laporan, perencanaan, dokumen resmi, dalil atau hukum dan lainnya yang

berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mendokumentasikan informasi atau kejadian faktual penting yang ada dilapangan. Dokumentasi dilakukan menggunakan alat bantu berupa *handphone*, buku dan pena untuk mengambil gambar, merekam dan mencatat hal-hal penting saat wawancara maupun observasi.

3.6. Instrumen penelitian

Menurut Sugiyono (2011:222) instrument penelitian adalah sesuatu yang menjadi alat dalam suatu penelitian. Instrument penelitian berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan dan mendeskripsikan data, serta membuat kesimpulan atas temuannya. Penelitian ini, instrument yang digunakan yaitu:

1. Peneliti sendiri

Peneliti sendiri sebagai instrument yang paling utama dalam penelitian. sebagai insturmen penelitian, peneliti menggunakan panca indranya untuk perencanaan, pelaksana pengumpulan data, menganalisa, menafsirkan data dan membentuk laporan hasil penelitian tersebut.

2. Pedoman wawancara

pengumpulan data melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun untuk memfokuskan pada permasalahan dalam penelitian ini, serta harus terarah dan dapat menjawab permasalahan.

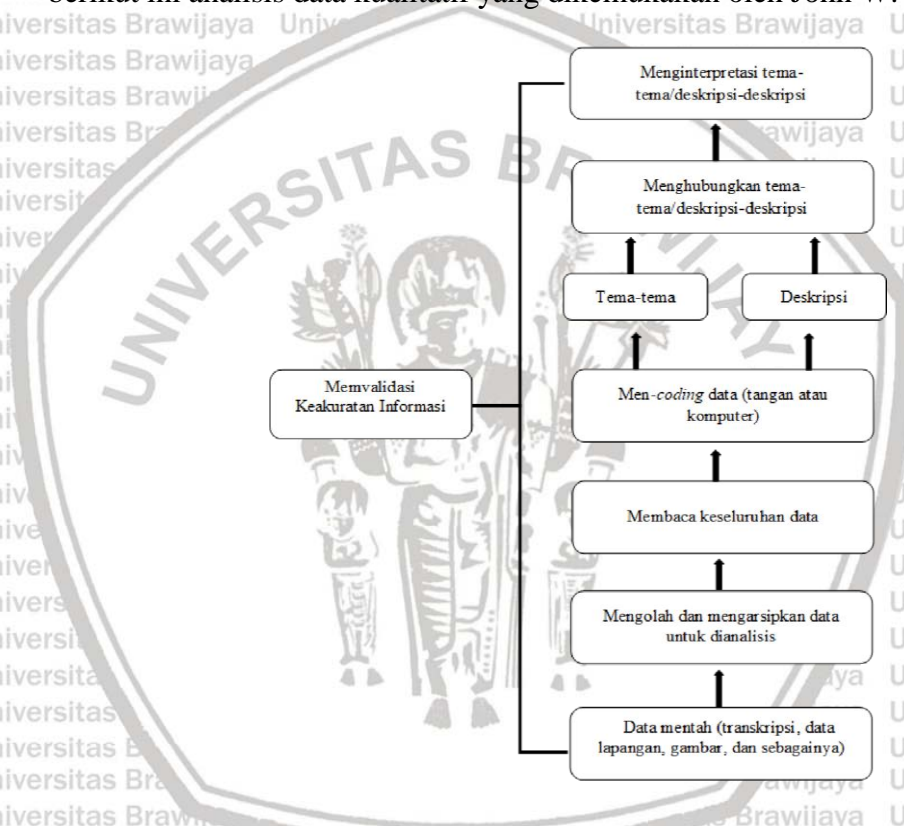
3. Catatan lapangan

Catatan lapangan adalah alat penunjang dalam penelitian ini yang diperoleh melalui bantuan alat tulis, alat rekam dan kamera melalui *handphone* untuk

melakukan dokumentasi dan merekam temuan atau informasi penting. Catatan lapangan diperoleh dengan cara mendengar, memikirkan, dan melihat sesuatu dalam rangka pengumpulan data penelitian.

3.7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data dari Creswell, karena memiliki langkah yang lebih fleksibel. Untuk lebih jelasnya berikut ini analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh John W. Creswell:



Gambar 3.1 Analisis Data Penelitian Kualitatif

Sumber: Cresweel (2012)

Gambar analisis data dari Creswell, dilustrasikan sebagai pendekatan linear dan hirarkis yang dibangun dari bawah ke atas. Dalam praktiknya pendekatan ini lebih interaktif, dimana berbagai tahapan saling berhubungan dan

tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan. Analisis data penelitian kualitatif model Creswell (2012:263) dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Dalam langkah ini peneliti melakukan transkrip wawancara, *scanning* materi, menyetik data lapangan, serta memilah dan menyusun data ke jenis yang berbeda tergantung sumber informasi khususnya data yang relevan dengan penelitian ini yaitu pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata budaya di Desa Kemiren.

2. Membaca keseluruhan data. Dalam langkah ini membangun gagasan utama atas informasi yang diperoleh dalam penelitian dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Selain itu juga mencatat gagasan umum atau menyimpulkan secara garis besar tentang data yang diperoleh dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata budaya di Kemiren.

3. Menganalisis lebih dekat dengan meng-*coding* semua data. *Coding* adalah proses mengolah data atau informasi menjadi beberapa poin penting.

Tahapan di tahap ini yaitu mengambil data tulisan/ gambar yang dikumpulkan, tulisan atau gambar tersebut dibagi dalam kategori-kategori, kemudian menandai kategori tersebut dengan istilah khusus sesuai dengan bahasa yang berasal dari narasumber. Pada tahap ini mengklasifikasikan data penelitian dalam sub pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren.

4. Menerapkan proses *coding*. Tahapan ini mendeskripsikan atau menyampaikan informasi secara detail terkait lokasi, peristiwa, dan orang dalam *setting* yang ada dalam penelitian ini. Kemudian mengembangkan tema dan memberikan penafsiran menurut sudut pandang peneliti dan dari

perspektif yang ada dalam proses penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren.

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema yang disajikan kembali melalui pendekatan naratif atau kualitatif yang disampaikan dalam hasil analisis atau laporan penelitian. Hasil tersebut dapat berupa kronologi peristiwa, dan tema-tema tertentu beserta sub temanya khusus perspektif dan kutipan atau keterhubungan antar tema yang dituliskan menjadi narasi akhir.

6. Menginterpretasi atau memaknai data. Data diinterpretasi dengan mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang dapat diambil dari permasalahan tersebut” dan lainnya dapat membantu pengungkapan esensi dari suatu gagasan. Namun pemaknaan data dalam penelitian kualitatif dapat dalam banyak hal, dapat berupa pertanyaan yang muncul dari data dan hasil analisis, bisa juga berupa makna yang berasal dari literatur atau teori, dimana hasil penelitian tersebut membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya dan lainnya. dalam penelitian kualitatif dapat berupa banyak hal, dapat diadaptasikan untuk jenis rancangan yang berbeda, dan dapat bersifat pribadi, berbasis penelitian dan tindakan. Pada tahap terakhir ini, peneliti tentunya memberikan interpretasi pribadi dan keterkaitannya dengan teori atau literatur terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata budaya di Desa Kemiren.

3.8. Keabsahan Data

Keabsahan data perlu dilakukan karena data yang diperoleh dalam penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan keabsahan data akan menghasilkan penelitian yang bervaliditas tinggi. Menurut Creswell (2016:269),

validitas menjadi kekuatan bagi penelitian kualitatif dengan didasarkan pada penentuan temuan yang didapatkan akurat atau tidak dari sudut pandang peneliti, partisipan dan pembaca. Maka perlu dilakukan pemeriksaan data dengan teliti agar data yang digunakan adalah data yang valid yaitu dengan melakukan keabsahan data.

Strategi validitas dilakukan agar dapat meningkatkan kemampuan dalam menilai keakuratan hasil penelitian dan meyakinkan pembaca (Creswell, 2016:269). Dimana, strategi tersebut dilakukan dengan triangulasi, yaitu pengumpulan data dari beberapa sumber informasi dan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut, lalu menggunakannya untuk membangun justifikasi tema secara koheren. Tema yang dibangun dari beberapa sumber data atau perspektif yang berbeda dari informan dapat menambah validitas penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi Sumber. Dimana uji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Data yang didapat dideskripsikan, dikategorisasikan, dan dibandingkan mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan suatu kesimpulan, yang kemudian dimintai kesepakatan dengan sumber data tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui gambaran umum Kabupaten Banyuwangi, maka secara singkat berikut ini penjelasan terkait lokasi penelitian:

4.1.1. Kondisi Geografi dan Demografi Kabupaten Banyuwangi

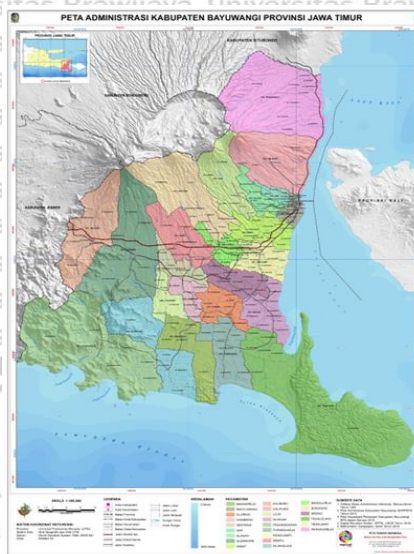
Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa dan menjadi bagian dari wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur. Banyuwangi memiliki batas koordinat $7^{\circ} 43'$ - $8^{\circ} 46'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 53'$ - $114^{\circ} 38'$ Bujur Timur, dengan panjang garis pantai 175,8 km. Banyuwangi dikelilingi Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesia. Kabupaten ini juga dibatasi dan/atau dikelilingi beberapa wilayah administrasi lain, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo
2. Sebelah Timur adalah Selat Bali dan Provinsi Bali
3. Sebelah Selatan adalah Samudera Indonesia
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso

Banyuwangi menjadi kabupaten terluas di Jawa Timur sekaligus terluas di Pulau Jawa, dimana luas wilayahnya mencapai 5.782,50 km² yang terbagi atas 183.396,34 ha (31,72%) area kawasan hutan, 66.152 ha (11,44%) area persawahan, 82.143,63 ha (14,21%) area perkebunan, 127.454,22 ha (22,04%) area permukiman, dan sisanya untuk jalan, ladang dan lainnya. Banyuwangi barat dan utara mayoritas dataran tinggi berupa pegunungan dengan kemiringan

40° dan di selatan mayoritas dataran rendah dengan kemiringan kurang dari 15°.

Berikut ini gambar peta wilayah Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi (2020)

Tercatat, tahun 2019 Kabupaten Banyuwangi terdiri atas 25 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 189 desa. Banyuwangi juga terdiri atas 87 Lingkungan dan 751 Dusun, serta 2.839 Rukun Warga (RW) dan 10.569 Rukun Tetangga (RT).

Pada tahun 2019 khususnya pada semester I Banyuwangi memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.745.675 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 301,9 jiwa/km² atau rata-rata setiap km² didiami oleh 302 jiwa. Penduduk tersebut terdiri dari 876.020 jiwa perempuan dan 869.655 jiwa laki-laki, dengan *sex ratio* sebesar 99,27%. Penduduk Banyuwangi tersebar di 25 Kecamatan dengan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Muncar dan terendah di Kecamatan Licin.

Penduduk Banyuwangi mayoritas memeluk agama Islam yaitu sekitar 95,24%, disusul pemeluk agama Hindu sekitar 2,19%, Protestan sekitar 1,59%,

Katolik sekitar 0,74%, dan pemeluk agama Budha 0,5%. Tipologi etnis di

Banyuwangi yaitu Etnis Madura, Melayu, Cina, Arab, Bali, Jawa dan Osing.

Dari beberapa etnis tersebut ada tiga elemen masyarakat yang secara dominan membentuk *stereotype* karakter Banyuwangi yaitu Jawa Mataraman, Madura-Pandalungan (Tapal Kuda) dan Osing. Jumlah penduduk etnis Jawa sekitar 67%, Osing sekitar 20%, Madura sekitar 12% dan suku lain 1%. Namun penduduk asli Banyuwangi adalah Suku Osing yaitu perpaduan budaya dan tradisi yang ada di Banyuwangi. Persebaran tiga etnis dominan yaitu Jawa Mataraman mayoritas di daerah pegunungan seperti wilayah Tegaldlimo, Purwoharjo, Bangorejo dan Tegalsari. Lalu etnis Madura banyak di daerah gersang dan dekat pantai seperti di Kecamatan Wongsorjo, Kecamatan Kalipuro, Glenmore dan Muncar. Sementara etnis Osing ada di wilayah subur sekitar, Rogojampi, Songgon, Singojuruh, Cluring, Giri, Glagah, Banyuwangi Kota, Kabat dan Genteng.

4.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia”

1. Kemandirian Daerah

Kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

2. Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlak Mulia

Ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan

dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan lebih difokuskan ke upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan bahwa kemajuan yang ingin kita raih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan pada dimensi mental-spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat sejahtera lahir dan batin serta berakhlaqul mulia.

Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.

Misi :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan.

4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
5. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, kearifan lokal.
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
9. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

Banyuwangi pada misi ketiga yaitu “Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan”. Dari misi tersebut, salah satu cara membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, dimana pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan sesuai potensi atau sumberdaya yang dimiliki salah satunya sektor pariwisata. Desa Kemiren merupakan salah satu desa wisata budaya yang perlu melakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan wisata untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

4.2. Gambaran Umum Situs Penelitian

4.2.1. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi)

1. Profil DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Tugas pokok dan fungsi DISBUDPAR disebutkan dalam Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2019, yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata, dan pelaksanaan tugas lain yang diberi bupati sesuai tugas dan fungsinya. Lokasi kantor DISBUDPAR berada di Jl. A. Yani 78 Banyuwangi.

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi

DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan perannya sebagai perangkat daerah atau unsur pelaksana, memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang mana sesuai dengan arahan pembangunan dari kepala daerah.

Berdasarkan Rencana Kerja DISBUDPAR tahun 2019, visi, misi, tujuan dan sasaran DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi diantaranya sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan ekonomi dan kualitas SDM

Misi : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi SDA dan kearifan lokal

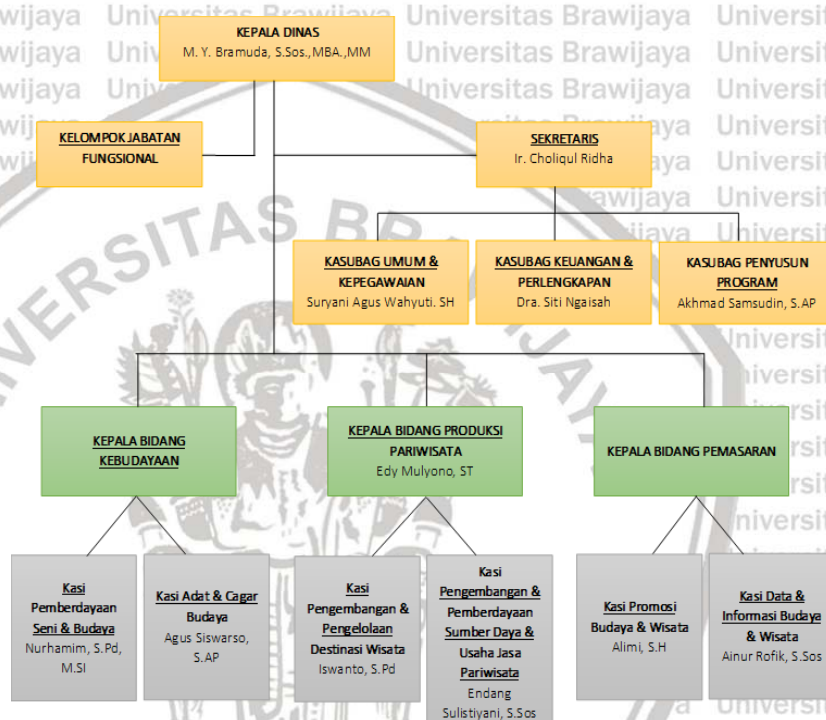
Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Sasaran : a. Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan yang Berkelanjutan

b. Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal

3. Struktur DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi

Susunan Organisasi DISBUDPAR terdiri dari kepala dinas, sekretaris, bidang kebudayaan, bidang produk pariwisata, bidang pemasaran, UPTD dan kelompok jabatan fungsional. Jelasnya berikut bagan struktur DISBUDPAR:



Gambar 4.2 Bagan Struktur DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi

Sumber: LKjIP DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi (2019)

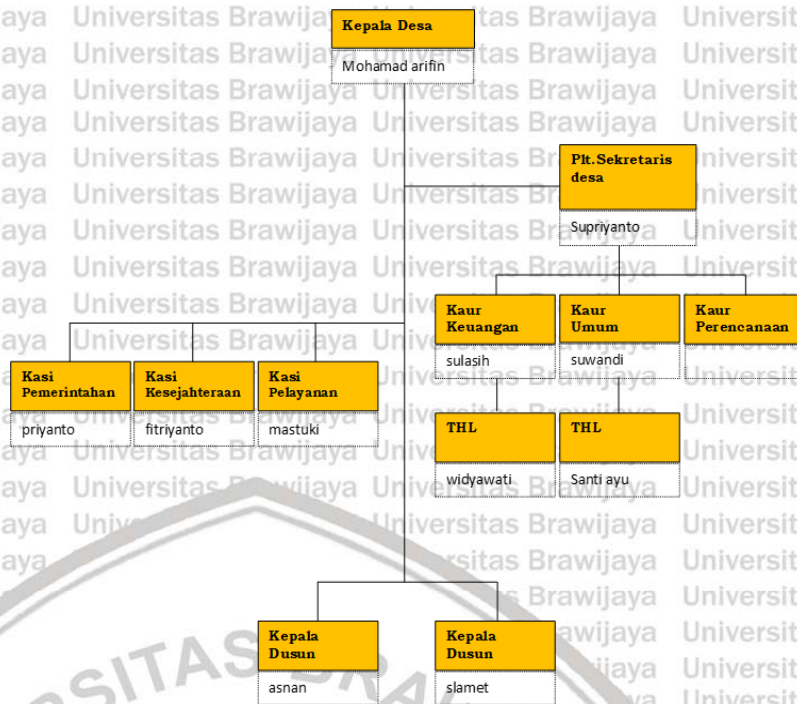
4.2.2. Gambaran Umum Desa Wisata Budaya Kemiren

1. Kondisi Pemerintahan Desa Kemiren

a. Struktur Pemerintahan Desa Kemiren

Penyelenggara pemerintahan Desa Kemiren terdiri dari pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa.

Lebih jelasnya berikut bagan struktur Pemerintah Desa Kemiren:



Gambar 4.3. Bagan Struktur Pemerintah Desa Kemiren

Sumber: arsip Desa Kemiren 2019

b. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Kemiren

Visi dalam pelaksanaan periode pembangunan pemerintah Desa Kemiren tahun 2020 – 2025 adalah “Gotong Royong Membangun Tanah Kelahirane Yang Jujur, Adil, Sejahtera, Berbudaya Dan Berakhlak Mulia”.

Untuk meraih visi tersebut dengan mempertimbangan potensi dan hambatan internal dan eksternal disusun misi Desa Kemiren sebagai berikut ini:

- 1) Meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- 2) Menciptakan Pemerintah desa yang cepat tanggap terhadap keadaan dan aspirasi masyarakat dengan turun langsung melihat kondisi masyarakat diseluruh wilayah desa kemiren.
- 3) Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat agar berhasil guna dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendukung perekonomian masyarakat.
- 5) Pemerataan pembangunan fisik dan non fisik, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial diseluruh masyarakat desa kemiren.
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana tempat ibadah dan peningkatan kegiatan keagamaan guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta dalam membentuk akhlakul karimah.
- 7) Melestarikan seni budaya dan adat istiadat.
- 8) Koordinasi dan bekerja sama dengan semua unsur kelembagaan desa, lembaga keagamaan dan lembaga sosial supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, olahraga, ketertiban, keamanan masyarakat.
- 9) Membebaskan Pajak Bumi Bangunan dengan nominal Rp. 5000,- s/d 10.000,- Khusus Rumah Tangga Miskin.

2. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Kemiren

Desa Kemiren berada di wilayah administrasi Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Kedua sisi Desa Kemiren dibatasi oleh dua sungai yaitu Sungai Gulung dan Sungai Sobo. Selain itu desa ini juga dibatasi oleh beberapa wilayah administrasi, dimana sebelah barat berbatasan dengan Desa Tamansuruh, timur berbatasan dengan Kelurahan Banjarsari, selatan berbatasan dengan Desa Olehsari, dan utara dengan Desa Jambesari.

Desa Kemiren berada di Ketinggian 187 mdl diatas permukaan laut sehingga bertopografi rendah dengan suhu rata-rata berkisaran antara 20-24°C.

Kemiren bercurah 150 m³ per tahun dengan curah hujan tertinggi di Bulan Desember dan curah hujan terendah di bulan Maret. Kemiren memiliki sumber

air berupa sungai, sumur dan HIPAM dimana mayoritas untuk kegiatan pertanian/perikanan. Desa ini permukaan tanahnya bergelombang dengan jenis tanah mayoritasnya tanah liat dan jenis tanaman mayoritasnya Padi dan Palawija. Luas wilayah Kemiren sebesar 117.052 Ha/m², dimana dibagi atas beberapa penggunaan lahan 27,4949 Ha untuk pemukiman, persawahan 103 Ha, tegalan 35,745 Ha, perkebunan 1,17 Ha, pemakaman 0,7 Ha, tanah lapangan 0,3 Ha, perkantoran 0,575 Ha, dan penggunaan lainnya 8.068 Ha..

Desa Kemiren memiliki dua dusun yaitu Dusun Krajan dan Dusun Kedaleman. Dusun Krajan terdapat 3 RW dan 13 RT sedangkan Dusun Kedaleman ada 4 RW dan 15 RT. Desa Kemiren ditinggali oleh 1.102 Kepala Keluarga dengan 2.562 jiwa penduduk, dimana 1.257 jiwa ada di Dusun Krajan sedangkan 1.309 jiwa berada di Dusun Kedaleman. Penduduk Desa Kemiren mayoritas beretnis Osing dengan persentase 99,8% atau 2.559 orang, Madura 0,07% atau 2 orang, dan Bali 0,03% atau 1 orang. Mayoritas penduduk Desa Kemiren beragama Islam dengan jumlah 2.558 orang dan 4 orang beragama Kristen. Untuk lebih jelasnya berikut ini gambar peta wilayah Desa Kemiren:



Gambar 4.4 Peta Desa Kemiren

Sumber: dokumen profil Desa Wisata Adat Osing Kemiren tahun 2018

3. Kondisi Pariwisata Desa Kemiren

Desa Kemiren merupakan bentuk pengembangan pariwisata berbasis kearifan local, dengan menjadikannya sebagai desa wisata. Melalui Surat Keputusan Daerah Tingkat II Banyuwangi No. 401 Tahun 1996, Desa Kemiren dijadikan sebagai lokasi Desa Wisata Osing di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi. SK tersebut diperkuat dengan Perda Banyuwangi No. 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 Pasal 72 yang menetapkan Desa Kemiren sebagai kawasan Desa Wisata Osing. Penetapan tersebut dikarenakan Desa Kemiren memiliki potensi dan daya tarik pariwisata berbasis kebudayaan, tradisi dan adat istiadat. Daya tarik kepariwisataan yang dimiliki Desa Kemiren diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daya Tarik Wisata Desa Kemiren

Daya Tarik Wisata	Keterangan
Daya Tarik Wisata Alam	Hamparan Sawah
Daya Tarik Wisata Budaya	Maestro Tari Gandrung dan Barong serta Adat Istiadat Suku Osing
Daya Tarik Wisata Khusus/lainnya	Rumah adat osing (<i>Heritage</i>)

Sumber: Pokdarwis Kencana Kemiren (2019)

Desa Kemiren memiliki berbagai unsur kebudayaan yang sampai sekarang masih dilestarikan dan menjadi potensi wisata budaya. Unsur kebudayaan itu yang menjadi daya tarik wisata di Kemiren. Berikut unsur kebudayaan Desa Kemiren:

a. Peralatan Kehidupan Manusia (Teknologi)

Masyarakat Desa Kemiren memiliki peralatan kehidupan manusia yang menjadi ciri khas Suku Osing seperti toples kuno, cangkir, kasur dengan warna hitam dan merah dan peralatan rumah tangga lainnya yang disebut dengan istilah *pekakas*. Keunikannya adalah setiap warga yang menikah, orang tua dari

warga tersebut akan memberikan *pekakas* dengan kata lain menurunkan temurukan kepada keturunannya yang akan menikah. Jika anaknya wanita orang tuanya memberikan *pekakas* berupa piring, cangkir, toples dan lainnya, dan jika pria biasanya diberikan kursi, lemari, kasur dan lainnya. Tradisi tersebut sampai sekarang masih dilakukan masyarakat Desa Kemiren.

b. Mata Pencapaian

Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan peternak sapi.

Masyarakatnya juga ada yang berkerja di pengolahan makanan khas Banyuwangi seperti Aneka Dodol, Bolu Kuwuk, Molen Pisang, Ladrang, Bagiak, Kopi dan lainnya. Namun sebagian ada juga yang bekerja di bidang seni baik itu penari, pemusik ataupun pengerajin, ada juga sebagai pedagang, kuli bangunan dan tukang. Walau mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak, namun perekonomian di Kemiren masih belum bisa bertumpu di sektor pertanian dan peternakan karena lahan pertanian sebagian hanya dimiliki orang kaya yang tinggal di desa lain, sehingga beberapa masyarakat mengalihkan mata pencahariannya pada sektor non formal seperti pariwisata.

c. Sistem Kemasyarakatan (Organisasi Sosial)

Sistem kemasyarakatan di Kemiren masih kuat, dimana ada lembaga adat, karang taruna, kelompok-kelompok kesenian, kelompok sadar wisata, grup Barong, grup musik tradisional dan lainnya. Rasa gotong-royong masyarakat Kemiren juga masih kuat dan kental, terlihat saat warganya ada yang mendirikan rumah atau ada hajatan, warga setempat ikut membantu.

d. Sistem Bahasa

Bahasa Osing merupakan bahasa yang menjadi identitas dari Kemiren, sesuai dengan suku yang menempatinnya juga yaitu Suku Osing. Dalam

kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Kemiren menggunakan Bahasa Osing sebagai media berkomunikasi. Bahasa Osing sendiri telah menjadi bahasa daerah atau identitas dari Kabupaten Banyuwangi.

e. Kesenian

Desa kemiren memiliki berbagai macam kesenian, terutama seni musik.

Beberapa grup musik di Kemiren diantaranya Hadrah, Karawitan, Angklung Paglak, Angklung Daerah, dan Angklung Sindenan. Ada juga kelompok seni gerak yaitu Gandrung Terob.

f. Sistem Pengetahuan (Cara Berfikir)

Desa kemiren yang ditinggali Suku Osing memiliki cara berfikir yang cukup terbuka. Hal tersebut karena Suku Osing merupakan suku yang cukup terbuka jika dibanding dengan Suku Badui di Banten. Suku Osing menerima terhadap hal-hal baru dan selalu terbuka pada setiap orang baru yang datang.

g. Sistem Religi

Masyarakat Desa Kemiren mayoritas adalah beragama Islam. Sistem religi ini menghasilkan adat tradisi yang telah menjadi budaya di Kemiren.

Adat tradisi tersebut berupa Selamatan bersih desa “Barong Ider Bumi”, Selamatan Bersih Desa Tumpeng Sewu, Selamatan Rebo wekasan, Selamatan Rajab, Selamatan Ruwah, Selamatan Lebaran syawal (Syawalan), Selamatan Lebaran Haji, Selamatan Kopatan (Lebaran hari ke-7), dan Selamatan Suroan (1 Muharram). Semua adat tradisi tersebut berhubungan dengan ajaran Islam yang mana inti dari setiap kegiatannya adalah bersyukur dan berbagi.

Selain itu Desa Kemiren memiliki fasilitas pendukung yang sangat menunjang kegiatan kepariwisataan. Fasilitas pendukung tersebut diantaranya:

Tabel 4.2 Fasilitas Pendukung Kepariwisataaan Desa Kemiren

Fasilitas Pendukung	Keterangan
Penginapan	55 <i>Homestay</i>
Warung Makan	Pesantogan Kemangi, Warung Semanggi, Warung Kemiren, Warung Dawisah, Warung Sapu Jagad
Toko Cinderamata	Kopi dan Kerajinan
Balai Pertemuan	Balai desa dan Kawasan Rumah Adat Sukosari
Papan Informasi Wisata	Peta wisata, Peta <i>homestay</i>
Toilet Umum	Balai Pertemuan dan Area Restoran
Tempat Sampah	Setiap <i>homestay</i> dan Sudut Jalan Desa Kemiren
Jaringan Telekomunikasi	Free Wifi di kantor Desa Kemiren, warung makan
Jaringan Listrik	Mencukupi

Sumber: Pokdarwis Kencana Kemiren (2019)

4. Kelompok Sadar Wisata Kencana Kemiren

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 01 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata Pasal 11 menyatakan pengelola wisata merupakan organisasi masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) dan organisasi yang menjadi salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Adanya peraturan tersebut maka dibentuklah pokdarwis melalui Surat Keputusan Kepala Desa Kemiren No: 188/7/429.503.02/2017 tentang penetapan susunan pengurus Pokdarwis Kencana Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi tahun 2017. Pokdarwis bertugas mengelola potensi wisata sekaligus pelaku wisata di Kemiren, dimana pengurus dan anggota dari organisasi tersebut merupakan masyarakat Desa Kemiren sendiri.

Pokdarwis tersebut di beri nama “Pokdarwis Kencana Kemiren”, dan menjadi salah satu unit usaha atau dibawah naungan BUMDES Kemiren “Jolo Sutro”.

Berikut logo Pokdarwis Kencana Kemiren:



Gambar 4.5 Logo Pokdarwis Kencana Kemiren

Sumber: Pokdarwis Kencana Kemiren (2019)

1. Misi dan Visi Pokdarwis Kencana Kemiren

Visi : Menjadikan wisata Banyuwangi yang mandiri, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan menggunakan sistem CBT (*Community Based Tourism*) serta Ekowisata.

Misi : Berperan aktif sebagai penggerak Sapta Pesona; Menjadi mitra pemerintah dan masyarakat untuk memajukan kepariwisataan Banyuwangi; Membangun pariwisata berbasis kearifan lokal; Berperan aktif sebagai penggerak ekonomi masyarakat; dan Menjadi wadah pemuda-pemuda desa untuk memajukan desa dalam bidang pariwisata.

2. Tujuan Pokdarwis Kencana Kemiren

- a. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan anggota pokdarwis di bidang kepariwisataan.
- b. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya.
- c. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya.

- d. Mewujudkan program CBT yang mengutamakan masyarakat lokal sebagai pelaku pariwisata.
- e. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya perwujudan Sapta Pesona.
- f. Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat.
- g. Melestarikan budaya, adat istiadat dan tradisi Suku Osing.
- h. Menambah perekonomian masyarakat Desa Kemiren.
- i. Menambah Pendapatan Asli Desa Kemiren.
- j. Mensejahterakan masyarakat Desa Kemiren.

3. Struktur kepengurusan Pokdarwis Kencana Kemiren

Tabel 4.3 Struktur Kepengurusan Pokdarwis Kencana Kemiren

No.	Jabatan	Nama
1	Pembina	Bumdes Jolo Sutro
2	Penasehat	Supriyanto (Sekdes)
3	Ketua	Moh. Edy Saputro
4	Wakil ketua	Moh. Efendy
5	Sekretaris	Rini Muryani
6	Bendahara	Hepi Suciati
7	Sie Keamanan & Ketertiban	Davit Handrian, Dika Wahyu NC.
8	Sie Kebersihan & Keindahan	Dedi Teguh Slamet, Ananda Sandra M.
9	Sie Daya Tarik Wisata & Kenangan	Zesy Irama, Kezia Fitriyani, Ahmad Ferdiansyah
10	Sie Humas & Pengembangan SDM	Ade Pramana Putra, Fathur Rifqi F.
11	Sie Pengembangan Usaha	Dikri Wahyu Pramana P., Herman Yogi A
12	Sie Kesenian & Budaya	Rianto Agus, Budi Santoso
13	Anggota	Rizal Harista, Ahmad Khoiri, Nanang Hidayat, Putri Ayu Permatasari

Sumber: data diolah dari Pokdarwis Kencana Kemiren (2020)

4.3 Penyajian Data Penelitian

4.3.1. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren

Penelitian ini memperoleh data dan informasi melalui observasi dan dokumentasi dari beberapa dokumen, arsip, perencanaan maupun laporan, serta melalui hasil wawancara dengan 14 informan. Dari berbagai sumber informasi tersebut, diperoleh data dan informasi terkait pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Budaya Kemiren. Dalam penelitian ini mengklasifikasi pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Budaya Kemiren berdasarkan tiga aktor pemberdayaan. Pertama adalah DIBUDPAR Kabupaten Banyuwangi, dimana objek pemberdayaannya Pokdarwis Kencana Kemiren dan masyarakat. Aktor pemberdayaan kedua adalah Pemerintah Desa Kemiren, yang menjadi objek pemberdayaannya adalah masyarakat Kemiren. Kemudian aktor pemberdayaan yang ketiga yaitu Pokdarwis Kencana Kemiren, dimana objek pemberdayaannya masyarakat Desa Kemiren. Dengan begitu maka Pokdarwis Kencana Kemiren tidak hanya berperan sebagai objek pemberdayaan melainkan juga sebagai subjek dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Budaya Kemiren.

Untuk melihat bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Budaya Kemiren, penelitian ini menggunakan konsep yang dikemukakan Kartasasmita. Kartasasmita (1996) dalam (Zubaedi, 2013:79) yang menyebutkan 3 arah pemberdayaan masyarakat yaitu *enabling*, *empowering* dan *protecting*. Untuk lebih jelasnya berikut data dan informasi terkait bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren berdasarkan konsep dari Kartasasmita, yaitu :

1. *Enabling* (Memungkinkan)

Kata *enabling* sendiri memiliki arti “memungkinkan”. *Enabling* menurut Kartasmita (1996) dalam (Zubaedi, 2013:79) adalah bagaimana membangun suasana yang dapat membuat potensi masyarakat berkembang.

Dimana langkah-langkah dalam pemberdayaan diupayakan dapat mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat khususnya dalam memanfaatkan potensi yang mereka dimiliki dan potensi pariwisata yang dimiliki Desa

Kemiren. Kesadaran masyarakat dapat dibangkitkan dengan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan pariwisata seperti dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Maka dalam hal ini partisipasi masyarakat menjadi hal utama dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata.

Enabling dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Budaya Kemiren dilakukan dengan beberapa macam program atau kegiatan. Pertama dengan pembentukan lembaga khusus kepariwisataan di Desa Kemiren.

Dimana lembaga kepariwisataan tersebut bernama kelompok sadar wisata atau biasa disebut pokdarwis. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Iswanto, yaitu:

“Kita ada pokdarwis, salah satu tupoksinya menstimulus masyarakat untuk mengedapankan pariwisata, disitu fungsi pokdarwis. Pokdarwis sering kita latih, agar masyarakat ikut terdorong menjadi pelaku pariwisata itu tugas pokdarwis”. (wawancara dengan Bapak Iswanto selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi, pada 21 Mei 2020 pukul 19.40)

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa pokdarwis dibentuk dan SDMnya dilatih dengan harapan dapat mendorong masyarakat untuk aktif atau berpartisipasi dalam pariwisata dan menjadi pelaku wisata. Maka pembentukan pokdarwis merupakan salah satu bentuk penyadaran pada masyarakat Desa Kemiren. Itu juga diungkapkan Bapak Darmanto berikut ini:

“Pokdarwis kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mengajak masyarakat sadar wisata. Tingkat kesadaran pariwisata di Banyuwangi masih kurang, sehingga dibentuk pokdarwis”. (wawancara dengan Bapak Darmanto selaku Staff Bidang Produksi Pariwisata DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi pada 22 Juni 2020 pukul 15.16)

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa pokdarwis merupakan kaki tangan atau kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menjalankan peran dalam menyadarkan masyarakat agar sadar wisata. Sehingga peran pemerintah dalam menyadarkan masyarakat khususnya Desa Wisata Budaya Kemiren telah dibantu dengan keberadaan pokdarwis di Desa Kemiren. Penentuan dan pengesahan pengurus dan anggota pokdarwis sendiri oleh DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi diserahkan pada setiap pemerintahan desa atau setiap destinasi wisata termasuk Desa Wisata Budaya Kemiren.

Pemerintah Desa Kemiren dalam menentukan dan mengesahan pengurus dan anggota pokdarwis dilakukan dengan cara musyawarah. Musyawarah tersebut tidak hanya diikuti oleh pemerintah desa melainkan juga oleh beberapa unsur kemasyarakatan di Kemiren. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto terkait hal tersebut yaitu:

“Pengurus dan anggota pokdarwis ditentukan melalui musyawarah atau kesepakatan bersama, musyawarahnya diikuti oleh perwakilan-perwakilan dari BUMDES, BPD, ada anak-anak karang taruna juga, lembaga adat juga dan tokoh masyarakat seperti RT dan RW”. (wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Sekretaris Desa pada 29 Juni 2020 pukul 19.28).

Pernyataan dari Bapak Supriyanto tersebut juga dinyatakan oleh salah satu pengurus pokdarwis. Dimana proses pembentukan pokdarwis dilakukan dengan musyawarah yang dihadiri oleh perangkat desa, lembaga desa, lembaga adat, dan perwakilan dari tokoh masyarakat. Berikut ini hasil wawancara dengan Mas Edy terkait pembentukan pokdarwis, yaitu:

“Sesuai Perda, pembentukan pengurus pokdarwis di Kemiren ditentukan kepala desa, BPD, RT, RW dan lainnya melalui kesepakatan bersama sehingga terbentuk pokdarwis dengan nama Pokdarwis Kencana Kemiren. Melalui pokdarwis inilah kesempatan bagi para pemuda untuk mengembangkan desa, bekerja di desa dan tidak keluar desa. Jadi ada 3 keuntungan yaitu perekonomian, rasa bangga menjadi orang desa khususnya temen-temen muda, dan pelestarian budaya. Jadi itu perekonomian pasti sedikit membantu temen-teman di sini, bisa mendapat uang tambahan di pariwisata”. (wawancara dengan Mas Edy selaku Ketua Pokdarwis Kencana Kemiren pada 21 Mei 2020 pukul 15.49)

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa SDM pokdarwis diisi oleh masyarakat golongan muda. Maka pemerintah mengajak atau menggandeng golongan muda dalam kepariwisataan agar mereka sadar wisata dan peduli dengan kebudayaannya sendiri serta bisa menangkap peluang dan memanfaatkan potensi dari desanya untuk lebih berkembang. Sehingga melalui pembentukan pokdarwis tidak hanya untuk menyadarkan masyarakat tapi juga untuk menyadarkan para pengurus dan anggota pokdarwis sendiri. Dalam hal ini aktor pemberdayaannya adalah DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Desa Kemiren, sedangkan objek pemberdayaannya adalah masyarakat Kemiren dan Pokdarwis Kencana Kemiren.

Selanjutnya, *enabling* yang kedua adalah dengan mengadakan pertemuan rutin, dimana pokdarwis dan beberapa tokoh atau perwakilan dari masyarakat juga diikutsertakan. Dalam hal ini pertemuan rutin dilakukan oleh dua aktor pemberdayaan yaitu DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Desa Kemiren. Dimana objek pemberdayaan dari DISBUDPAR adalah Pokdarwis Kencana Kemiren, sedangkan Pemerintah Desa Kemiren objek pemberdayaannya adalah pokdarwis dan masyarakat Kemiren.

DISBUDPAR dalam hal ini melakukan pertemuan rutin melalui rapat bulanan dengan para pokdarwis sekabupaten Banyuwangi. Selain itu juga ada

rapat setiap 3 bulan sekali dengan perwakilan setiap pelaku wisata di Banyuwangi termasuk salahnya adalah pokdarwis. Hal tersebut diketahui melalui wawancara dengan bapak Iswanto, sebagai berikut:

”Ada rapat bulanan antara pokdarwis dengan DISBUDPAR pemerintah yaitu sebulan sekali, tapi kalau pramusaji pariwisata setiap 3 bulan sekali kita rapat semuanya baik dari *tour travel*, pokdarwis, HPI, pokmas, pemilik hotel dan lainnya sekabupaten Banyuwangi, pokoknya orang-orang yang berkaitan dengan pariwisata”. (wawancara dengan Bapak Iswanto selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi, pada 21 Mei 2020 pukul 19.40).

Pertemuan rutin menjadi cara DISBUDPAR memberdayakan pokdarwis khususnya tahap penyadaran. Karena secara tidak langsung kegiatan tersebut mengikutsertakan pokdarwis dalam perencanaan dan mengajaknya berdiskusi terkait kepariwisataan. Selain itu pertemuan rutin menjadi media bagi pokdarwis maupun pelaku pariwisata lain agar yang awalnya tidak sadar menjadi sadar wisata. Hal itu diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Deddy, berikut ini:

“Menurut saya pemberdayaan itu bagaimana membuat masyarakat yang sebelumnya tidak berdaya menjadi berdaya, yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, yang sebelumnya belum sadar menjadi sadar, ini sadar apa? Ya sadar wisata yaitu bagaimana mencari peluang-peluang di sektor pariwisata, dimana penedarannya biasanya dengan pertemuan rutin”. (wawancara dengan Bapak Deddy selaku selaku Staff Kasubag Penyusun Program pada 6 April 2020 pukul 11.13).

Pertemuan rutin yang dilakukan Pemerintah Desa Kemiren adalah melalui musrenbang dan musyawarah. Dalam musrenbang dan musyawarah tersebut pokdarwis diajak berdiskusi khususnya dalam hal kepariwisataan. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Mas Edy, sebagai berikut:

“Pokdarwis ikut dalam musrenbang mulai tahun 2018, karena kita baru dibentuk Juni 2017, kami ikut memberi masukan dan merencanakan apa yang akan dilakukan untuk tahun depan khususnya dalam hal pariwisata, karena kami memang lembaga kepariwisataan jadi lebih tau

dilapangannya seperti apa”. (wawancara dengan Mas Edy selaku Ketua Pokdarwis Kencana Kemiren pada, 21 Mei 2020 pukul 15.49)

Pernyataan tersebut juga diungkapkan pengurus Pokdarwis lainnya.

Kegiatan musrenbang dan musyawarah selain mengajak pokdarwis juga mengajak perwakilan dari masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lain.

Pokdarwis dan masyarakat diajak untuk ikut merencanakan dan mengevaluasi hal-hal terkait kepariwisataan untuk pengembangan Desa Wisata Budaya

Kemiren. Hal itu diungkapkan Mas Ade dalam wawancaranya, berikut ini:

“Selama dua tahun belakangan pemerintah desa mengajak pokdarwis saat musrenbang, itu setahun sekali, ada juga musyawarah rutin tapi waktunya tidak pasti jadi yang menentukan pemerintah desanya, cuma setiap bulan pasti ada, itu yang ikut perwakilan dari setiap kelembagaan masyarakat di Kemiren, masyarakat juga seperti RW dan RT ikut, pokdarwis ikutnya ya dalam pembahasan terkait pariwisata, tentang apa yang perlu diperbaiki, pelatihan apa yang dibutuhkan dan lainnya apalagi Desa Kemiren ini kan sudah menjadi desa wisata budaya”. (wawancara dengan Mas Ade selaku Sie Humas dan Pengembangan SDM Pokdarwis pada 27 Juni 2020 pukul 16.20).

Bentuk *enabling* yang ketiga adalah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan atau kegiatan kepariwisataan. Dalam hal ini aktor pemberdayaanya DISBUDPAR, dimana objeknya Pokdarwis Kencana Kemiren dan Masyarakat Kemiren. Bentuk *enabling* ini dilakukan dengan membuat *event* atau festival pariwisata. Dimana masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan melalui *event* wisata agar masyarakat dapat memiliki sadar wisata. Hal itu diungkapkan Bapak Fauzi sebagai berikut:

“Rakyat diberdayakan dengan berbagai *event* pariwisata yang disebut Banyuwangi Festival, kami mengajak mereka untuk ikut serta di kegiatan festival. Entah itu mengundang para penari untuk tampil di festival, atau menjadikan masyarakat sebagai panitia penyelenggara festival dan lainnya, dimana pemerintah ini berupaya bagaimana *event* festival dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dari berbagai sisi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk mengembangkan ekonominya, seperti masyarakat berjualan diacara festival dan lainnya, dalam festival ini pemda tidak memberi bantuan berupa uang,

melainkan barang seperti *backdrop*, spanduk, *sound*, dekorasi dan itu pemda bagi bola, dengan dinas lain. Jadi pelaksanaanya yaa masyarat sendiri”. (wawancara dengan Bapak Fauzi selaku Staff Bidang Kebudayaan pada 6 Mei 2010 pukul 11.24).

Kemudian Bapak Fauzi juga menambahkan pernyataannya sebagai berikut:

“Bagaimana *event* bisa menjadi pemantek untuk Bergeraknya ekonomi masyarakat melalui budaya, yaitu dengan mengupayakan pemberdayaan masyarakat setempat. Jadi semestinya LSM setempat bisa menggerakkan masyarakat dengan potensi masyarakat yang ada, untuk menyongsong *event* yang telah dibuatkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah sebagai pemantiknya, fasilitatornya, dan LSM seperti pokdarwis sebagai penggeraknya, pokdarwis dan masyarakat seharusnya bisa kreatif, bisa menangkap umpan yang diberikan pemerintah melalui festival tadi”. (wawancara dengan Bapak Fauzi selaku Staff Bidang Kebudayaan pada 6 Mei 2010 pukul 11.26).

Dari hasil wawancara tersebut, maka mengikutsertakan masyarakat dalam *event* wisata diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat melalui manfaat yang mereka rasakan. Dimana *Event* festival bisa memberikan manfaat atau dampak positif khususnya dalam perekonomian masyarakat dan pelestarian budaya. Dari manfaat yang dirasakan bisa memunculkan sadar wisata dalam diri masyarakat dan menjadi pendorong untuk dapat memanfaatkan peluang di sektor pariwisata. DISBUDPAR sendiri setiap tahunnya menyelenggarakan 3 festival di Desa Wisata Budaya Kemiren, hal ini diketahui dari Program Banyuwangi Festival dan dari hasil wawancara dengan Mas Edy berikut ini:

“Dari pemerintah dibuatkan 3 (tiga) festival di Kemiren yaitu tumpeng sewu, barong ider bumi dan ngopi sepuluh sewu. Tumpeng sewu dan barong ider bumi itu memang acara adat yang di festivalkan oleh pemerintah. Kalau kopi sepuluh ewu sebelum ada di Banyuwangi Festival, dulu memang ada sekali di Kemiren dan itu diselenggarakan oleh masyarakat sendiri, karena rame akhirnya oleh pemerintah dijadikan salah satu event di Banyuwangi Festival. Kemiren tidak pernah mengusulkan untuk dijadikan festival tapi langsung dari pemerintah sendiri. Tapi beberapa tempat ada yang mengusulkan,

biasanya teman-teman DISBUDPAR juga yang mencari suatu hal untuk difestivalkan”. (wawancara dengan Mas Edy selaku Ketua Pokdarwis Kencana Kemiren pada 21 Mei 2020 pukul 15.49).

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menjadikan 2 adat tradisi di Kemiren menjadi bagian dalam Banyuwangi Festival. Tiga festival tersebut secara tidak langsung menjadi ikon Desa Kemiren selaku desa wisata budaya dan membantu mempromosikan atau membranding Desa Kemiren. Hal itu juga diungkapkan Bapak Supriyanto sebagai berikut:

“Kita tanpa promosi sudah terbawa oleh Banyuwangi Festival dengan 3 event di Desa Kemiren, sehingga dari event tersebut yang menjadi 3 atraksi utama sudah membranding Desa Kemiren dan itu sangat membantu dalam branding”. (wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Sekretaris Desa Kemiren pada 29 Juni 2020 pukul 19.15)

Bentuk *enabling* ketiga ini juga dilakukan oleh Pokdarwis Kencana Kemiren. Dalam hal ini pokdarwis melakukannya dengan cara pemenuhan amenities dan atraksi untuk wisatawan diserahkan pada masyarakat Kemiren.

Hal ini disampaikan Bapak Supriyanto dalam wawancaranya, berikut ini:

“Pemberdayaan masyarakat dimasukkan ke paket wisata seperti membuat yang otomatis memberdayakan masyarakatnya juga kan, trus masak jajanan tradisional itu masuk ke paket wisata dimana kue dan makanannya seperti kelemben dan pecel pitik yang masak masyarakat setempat”. (wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Sekretaris Desa pada 29 Juni 2020 pukul 19.28).

Hal tersebut juga diungkapkan Mas Edy selaku pengurus Pokdarwis Kencana Kemiren. Berikut hasil wawancara dengan Mas Edy, yaitu:

“Pengembangan pariwisata mengacu pada masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat pemberdayaan, kalau dihitung total masyarakat yang terlihat ikut di kepariwisataan sekitar 240an orang itu terdiri dari group musik tradisional, kesenian, penari, Pasar Kampung Osing, *home stay*, *guide* nya yaitu teman-teman pokdarwis sendiri, kemudian penyedia tumpeng, pecel pitik, kopi, kue-kue itu pesannya ke masyarakat, jadi kita pesan untuk para wisatawan ke masyarakat sekitar”. (wawancara dengan Mas Edy selaku Ketua Pokdarwis Kencana Kemiren pada 21 Mei 2020 pukul 15.49).

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa yang dilibatkan dalam kegiatan kepariwisataan adalah para pemusik tradisional, seniman, penari tradisional, pemilik *home stay* dan masyarakat yang berkecimpung dengan penyediaan amenities dan atraksi. Pokdarwis dalam pelaksanaan *enabling* ini menggunakan sistem bergilir, hal ini dilakukan untuk pemerataan agar semua masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Mas Ade sebagai berikut:

“Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata, setiap ada tamu (wisatawan) konsumsi seperti jajan tradisional dan makanan berat ngambilnya dari masyarakat, sistemnya wisatawan *booking* ke pokdarwis dengan paket wisata yang mereka pilih, dari pokdarwis pesannya ke masyarakat dengan sistem bergilir, misal di wilayah kemiren barat pesannya jajanan khas Osing, makanan beratnya pesannya di kemiren tengah, kemudian *home stay* nya di kemiren timur dari situlah masyarakat terbedayakan dari tamu-tamu yang datang”. (wawancara dengan Mas Ade selaku Sie Humas dan Pengembangan SDM Pokdarwis pada 27 Juni 2020 pukul 16.20).

Dari kegiatan tersebut masyarakat Kemiren termasuk Pokdarwis sendiri memperoleh dampak positif khususnya dalam perekonomian masyarakat. Sama halnya dengan Banyuwangi Festival, mengikutsertakan masyarakat dalam pemenuhan amenities dan atraksi untuk para wisatawan juga dilakukan dengan harapan bisa meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat melalui manfaat yang mereka rasakan. Selain itu juga diharapkan masyarakat bisa lebih memanfaatkan peluang wisata yang ada di Kemiren.

Enabling yang keempat yaitu melalui Program Pembangunan Rumah Adat. Program ini dibuat Pemerintah Desa Kemiren yang ditujukan untuk membantu masyarakat dan untuk menyadarkan masyarakat agar tetap menjaga kebudayaannya. Selain itu juga untuk menunjang kegiatan wisata budaya di Kemiren. Berikut wawancara dengan Bapak Mastuki terkait program tersebut:

“Program atau kegiatan yang bekerjasama dengan pemerintah untuk menjaga kearifan lokal adalah pembangunan Rumah Adat Osing yaitu rumah gebyok dengan harapan menunjukkan bahwa Kemiren dulu seperti ini. Program ini dilaksanakan setiap tahun dengan direhab ke rumah adat supaya ada ciri khas Osingnya, harapannya agar memiliki rasa memiliki, kita hanya memancingnya saja dengan dana 4.5 juta yang hanya cukup untuk beli bahan kayunya, kalau ongkosnya mereka sendiri, jadi bisa dikatakan sebagai dana pancingan untuk kesadaran mereka”. (wawancara dengan Bapak Mastuki selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Kemiren pada 27 Juni 2020 pukul 15.48).

Informasi dari Bapak Mastuki tersebut menunjukkan bahwa Program Pembangunan Rumah Adat Osing berupa bantuan dana atau dana pancingan untuk masyarakat yang ingin merenovasi rumahnya menjadi Rumah Gebyok.

Dengan harapan dapat menyadarkan masyarakat dalam menjaga kearifan lokal dan untuk menunjukkan pada wisatawan salah satu identitas Suku Osing yaitu Rumah Gebyok. Hal ini juga disampaikan Bapak Fauzi sebagai berikut:

“Beberapa tahun terakhir ada program pembangunan Rumah Adat Osing, sehingga orang datang kesana itu tau simbolnya Suku Osing seperti apa. Sekarang ini masih dirancang oleh DPUPR, disana tepatnya di kemiren barat mau dibangun kawasan Rumah Adat Osing seperti taman mini yang berisi kearifan lokal Suku Osing, ini dibiayai pemerintah dan semestinya berjalan tahun 2020 ini”. (wawancara dengan Bapak Fauzi selaku Staff Bidang Kebudayaan pada 6 Mei 2010 pukul 11.24).

Informasi lebih lanjut terkait Program Pembangunan Rumah Adat Osing juga disampaikan oleh Bapak Supriyanto, sebagai berikut:

“Pembangunan rumah adat untuk siapapun yang ingin rumahnya direhab menjadi rumah adat, mereka tinggal mengajukan saja, program ini anggarannya tidak hanya dari dana desa tapi juga dari PNPM soalnya Kemiren memprioritaskan rumah adat, cuma rumah masyarakat disini terlanjur sudah banyak yang modern dan biaya untuk rehab ke rumah adat mahal”. (wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Sekretaris Desa Kemiren, 29 Juni 2020 jam 19.15).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka Program Rumah Adat Osing tersebut juga dilatar belakangi oleh kondisi mayoritas rumah di Kemiren yang banyak bergaya modern. Dimana dari hasil observasi yang dilakukan

pada 21 Desember 2019 sampai dengan 21 Juni 2020 diketahui bahwa memang banyak rumah warga yang meninggalkan ciri khas dari Rumah Adat Osing dan diganti bergaya modern. Berikut gambar beberapa rumah masyarakat Kemiren yang meninggalkan ciri khas Rumah Adat Osing:



Gambar 4.6 Rumah Modern Masyarakat Desa Kemiren

Sumber: dokumentasi dari peneliti pada 21 Mei 2020

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Mas Ade selaku salah satu pengurus di Pokdarwis, yaitu:

“Jadi memang pemberdayaan melalui Program Pembangunan Rumah Adat itu sasarannya semua masyarakat Kemiren yang paling utama ya rumah-rumah di sepanjang jalan utama Desa Kemiren, siapapun yang rumahnya ingin dibangun rumah adat silahkan mengajukan ke desa, Ternyata orang-orang di sini banyak yang tidak suka terlalu kuno, apalagi Kemiren Barat orang-orangnya modern”. (wawancara dengan Mas Ade selaku Sie Humas dan Pengembangan SDM Pokdarwis pada 27 Juni 2020 pukul 16.20).

2. Empowering (Memperkuat Potensi)

Arti dari kata *emporing* merupakan memperkuat atau meningkatkan. *Empowering*, menurut Kartasasmita (1996) dalam (Zubaedi, 2013:79) adalah bagaimana memperkuat atau meningkatkan potensi, daya ataupun kapasitas yang dimiliki individu maupun masyarakat. Sehingga langkah pemberdayaan masyarakat sebisanya dilakukan dengan aksi-aksi yang nyata. Dengan begitu

maka *empowering* dilakukan untuk meningkatkan kualitas suatu individu ataupun kelompok dengan memperkuat atau meningkatkan potensi, daya ataupun kapasitas mereka. *Empowering* sendiri dapat dilakukan dengan pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, pemberian informasi, penyediaan lapangan kerja, pasar serta sarana prasarana lain yang mendukung peningkatan potensi, daya ataupun kapasitas.

Bentuk *empowering* dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata

Budaya Kemiren terdapat di beberapa program atau kegiatan dari ketiga aktor pemberdayaan yaitu DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Desa Kemiren, dan Pokdarwis Kencana Kemiren. *Empowering* yang pertama dengan melalui studi banding, dimana aktor pemberdayaannya adalah DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Desa Kemiren dengan objek pemberdayaannya Pokdarwis Kencana Kemiren. Studi banding dilakukan dengan mengunjungi desa wisata lain khususnya desa wisata budaya yang dapat dijadikan sebagai acuan atau percontohan.

Melalui wawancara dengan narasumber dari DISBUDPAR diketahui bahwa studi banding dilakukan dengan mengajak perwakilan dari setiap pokdarwis se Kabupaten Banyuwangi termasuk salah satunya dari Pokdarwis Kencana Kemiren untuk studi banding ke desa wisata lain. Studi banding dilakukan untuk menambah/meningkatkan wawasan dan pengetahuan SDM pokdarwis selaku pengelola wisata agar kedepannya dapat mengembangkan desa wisatanya. Seperti yang disampaikan Bapak Iswanto berikut ini:

“Pokdarwis baik di Kemiren, Tamansari, Songgon, dan lainnya, tapi perwakilannya saja sering kita ajak studi komperatif atau tinjauan ke desa wisata lain setiap setahun sekali. Tapi kadang mereka itu kalau selesai ya selesai, pada tujuannya diajak studi banding agar mereka bisa membandingkan, dapet ilmunya untuk pengembangan wisata mereka”.

(wawancara dengan Bapak Iswanto selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi, pada 21 Mei 2020 pukul 19.40).

Kemudian Bapak Iswanto juga menambahkan pernyataannya sebagai berikut:

“Banyuwangi baru 7 tahun wisatanya baik, Ubud yang sudah puluhan tahun masih belajar disini, apa yang kurang diubud diterapkan oleh orang ubud, jadi melalui studi banding harapannya mereka juga bisa seperti ubud, saja suruh mereka untuk melihat, merasakan, mendengar dan menerapkan di desanya agar berkembang dan lebih banyak memberdayakan masyarakatnya, mengajak masyarakat untuk membangun”. (wawancara dengan Bapak Iswanto selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi, pada 21 Mei 2020 pukul 19.40).

Pemerintah Desa Kemiren menjadikan studi banding sebagai alat intropeksi dan percontohan dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata budaya. Hal ini diketahui dari pernyataan Bapak Mastuki berikut ini:

“Adanya penghargaan yang diperoleh Desa Kemiren kemarin saya bilang jangan terlena dengan penghargaan, penghargaan cuma hadiah saja, 2019 kemarin teman-teman pokdarwis diajak studi banding ke Jogja supaya membandingkan ternyata yang kita kunjungi walau tidak mendapat penghargaan tapi dia jauh lebih baik dari kita, dari segi komersial, segi manajemen dan lainnya, jadi jangan terlena dengan hadiah, harus terus intropeksi diri, studi banding ini salah satu caranya untuk melihat perbedaanya, cirikhasnya”. (Mastuki selaku Kepala Seksi Pelayanan Pemerintah Desa Kemiren, 27 Juni 2020 jam 15.48)

Studi banding yang dilakukan pada Pokdarwis Kencana Kemiren diharapkan adanya peningkatan mutu, perbaikan, perkembangan, serta pokdarwis dapat menggali informasi sebanyak mungkin untuk dijadikan barometer dan pembanding. Maka melalui studi banding dapat menemukan pembaharuan yang aplikatif ke depannya atau futuristik baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga tujuan utamanya adalah terjadinya peningkatan kapasitas SDM pokdarwis untuk pengembangan Desa Wisata

Budaya Kemiren karena melalui studi banding dapat menambah wawasan, pengalaman baru dan dapat membandingkan dengan desa wisata lain.

Bentuk *empowering* yang kedua adalah dengan program atau kegiatan pelatihan. Pelatihan dilakukan untuk peningkatan kapasitas atau kompetensi dalam diri seseorang yang telah memiliki *basic* atau *soft skill*, sehingga terjadi perkembangan dalam individu tersebut. Program pelatihan sendiri dilakukan oleh 3 aktor pemberdayaan yaitu DISBUDPAR, Pemerintah Desa dan Pokdarwis Kencana Kemiren. Objek pemberdayaan dari program pelatihan DISBUDPAR adalah pokdarwis dan masyarakat, sedangkan pemerintah desa dan pokdarwis adalah masyarakat Kemiren. Berikut program pelatihan dari 3 aktor pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Budaya Kemiren, yaitu:

a. Kegiatan Pelatihan dari DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi

Berikut ini jenis-jenis pelatihan yang dilakukan DISBUDPAR untuk peningkatan kapasitas SDM Pokdarwis Kencana Kemiren, yaitu:

Tabel 4.4 Daftar Pelatihan dari DISBUDPAR Kabupaetn Banyuwangi Untuk Pokdarwis Kencana Kemiren Tahun 2017-2020

Tahun	Jenis Pelatihan
2017	Pelatihan <i>Guide Lokal</i>
2018	Pelatihan <i>Guide Outbond</i>
	Pelatihan <i>Hospitaly</i> Pelaku Pariwisata
	Pelatihan pembekalan Dasar Tehnik Kepemanduan <i>Guide Lokal</i>
2019	Pelatihan <i>Public Speaking</i> (Bahasa Inggris)
	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Destinasi Wisata
	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
2020	Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja
	Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah Dan Warisan Budaya

Sumber: DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi (2020)

Berikut ini jenis-jenis pelatihan yang dilakukan DISBUDPAR untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Kemiren yaitu:

Tabel 4.5 Daftar Pelatihan dari DISBUDPAR Kabupaetn Banyuwangi Untuk Masyarakat Kemiren Tahun 2017-2020

Tahun	Program Pemberdayaan
2017	Pelatihan <i>Homestay</i>
2019	Pelatihan Pengelolaan <i>Homestay</i>
	Pelatihan Manajemen Pengelolaan <i>Homestay</i>
2020	Pelatihan Manajemen <i>Homestay</i> /Pondok Wisata/Rumah Wisata

Sumber: DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi (2020)

Berdasarkan dua tabel daftar pelatihan dari DISBUDPAR dapat diketahui bahwa mayoritas untuk meningkatkan SDM Pokdarwis Kencana Kemiren. Sedangkan pelatihan untuk masyarakat Kemiren dilakukan hanya untuk para pemilik *homestay*. Pelatihan dari DISBUDPAR disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh Kemiren agar lebih berkembang. Hal itu diungkapkan Bapak Deddy dalam wawancaranya berikut ini:

“Pemberdayaan melalui pelatihan atau program peningkatan kapasitas SDM pariwisata dilakukan setiap tahun, setiap destinasi wisata diikuti dengan perwakilan, misal kuota 40 dibagi pokdarwis setiap destinasi 1, biar semua bisa merasakan dan pelatihan disesuaikan dengan karakter dan potensi yang dimiliki desanya, misal Kemiren kan ada *homestay* ya diajak pelatihan *homestay*, kalau gak ada *homestay* seperti Desa Banjar ya jangan diikuti pelatihan *homestay*, kita fokus ke yang sudah ada dulu, bagaimana mengembangkan yang sudah ada baru nanti ketika kuotanya masih ada kita mengambil desa yang belum punya *homestay* biar nanti bisa merintis untuk pengembangan *homestay*”. (wawancara Bapak Deddy selaku Staff Kasubag Penyusun Program, 6 April 2020 jam 11.13).

b. Kegiatan Pelatihan dari Pemerintah Desa Kemiren

Berikut ini jenis-jenis pelatihan yang dilakukan Pemerintah Desa Kemiren untuk peningkatan kapasitas masyarakat, yaitu:

Tabel 4.6 Daftar Pelatihan dari Pemerintah Desa Kemiren Untuk Masyarakat Kemiren Tahun 2017-2020

Tahun	Jenis Pelatihan
2017	Pelatihan dan pengembangan kesenian daerah
2018	Pelatihan tata rias

2019	Pelatihan kesenian sopo ngiro
	Pelatihan membatik
	Pelatihan jajanan tradisional
2020	Pelatihan pembuatan masker
	Pelatihan pembuatan kue
	Pelatihan membatik

Sumber: data diolah dari Sekretaris Desa Kemiren (2020)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pelatihan tersebut hanya dilakukan untuk masyarakat yang berkaitan dengan amenitas dan atraksi wisata. Sedangkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Pokdarwis Kencana Kemiren masih belum ada. Maka pemerintah desa lebih memfokuskan pada peningkatan potensi atau kapasitas masyarakat untuk mendukung kegiatan wisata di Desa Wisata Budaya Kemiren.

c. Bentuk pelatihan dari Pokdarwis Kencana Kemiren

Berikut ini jenis-jenis pelatihan yang dilakukan Pokdarwis Kencana Kemiren untuk peningkatan potensi atau kapasitas masyarakat, yaitu:

Tabel 4.7 Daftar Pelatihan dari Pokdarwis Kencana Kemiren Untuk Masyarakat Kemiren Tahun 2018-2020

Tahun	Jenis Pelatihan
2018	Pelatihan SDM pengelolaan <i>homestay</i>
	Pelatihan SDM pengelola wisata
	Pelatihan SDM kerajinan / produk oleh-oleh masyarakat.
2019	Pelatihan SDM pengelolaan <i>homestay</i> tentang pelayanan
	Pelatihan dan peningkatan SDM pengelola wisata tentang pariwisata
	Pelatihan dan peningkatan SDM kerajinan / produk oleh-oleh masyarakat
2020	Pelatihan dan Peningkatan SDM pengelola wisata tentang pariwisata
	Pelatihan cara menerima tamu

Sumber: Pokdarwis Kencana Kemiren tahun 2020

Dari tabel tersebut diketahui bahwa sama halnya dengan Pemerintah Desa Kemiren, pelatihan dari pokdarwis juga berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat. Pelatihan tersebut dilakukan pada masyarakat yang berperan menyediakan amenities dan atraksi agar lebih berkembang kapasitasnya. Maka pelatihan dari pokdarwis merupakan upaya untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren.

Bentuk *empowering* yang ketiga dengan membangun sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pariwisata melalui APBDes Kemiren.

Dimana sejak tahun 2016 pemerintah desa telah menganggarkan dalam APBDes untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Pembangunan tersebut sebagai upaya perkembangan Desa Wisata Budaya Kemiren. Berikut tabel pembangunan sarana prasarana dari Pemerintah Desa Kemiren yaitu:

Tabel 4.8 Daftar Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kepariwisata dari Pemerintah Desa Kemiren

Tahun	Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Kepariwisata
2016	Pengadaan brosur pariwisata Desa Wisata Budaya Kemiren
	Pembangunan Sanggar Agung
	Pembangunan toilet Sanggar Sapu Jagad
2017	Rehab petilasan Buyut Cili
	Pembangunan pergola
	Bantuan kelompok pengerajin souvenir
2018	Pembangunan TPT Sukosari (menahan paving)
	Penunjang budidaya unggas yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan adat istiadat dan pariwisata
2019	Pembangunan toilet umum di kawasan Pasar
	Pembangunan tempat ibadah Cagar Budaya Osing
	Bantuan kelompok pengrajin alat musik kesenian tradisional
2020	Pembangunan sarana prasarana persampahan
	Rehab jalan paving
	Pembangunan 4 unit poskamplang bernuansa Osing
	Pembangunan 4 unit pintu gerbang kayu nuansa Osing

Sumber: data diolah dari Pokdarwis Kencana Kemiren tahun 2019 dan APBDes Kemiren tahun 2020

Empowering yang keempat dengan pembentukan pasar tradisional yaitu

Pasar Kampung Osing, dimana aktor pemberdayaannya adalah Pokdarwis Kencana Kemiren dengan objek pemberdayaannya masyarakat Kemiren. Pasar Kampung Osing dibentuk pokdarwis melalui ijin pemerintah desa dengan tujuan pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren dan agar wisatawan mengenal jajanan tradisional masyarakat Suku Osing. Hal-hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan Mas Ade, sebagai berikut:

“Pasar Kampung Osing dibentuk oleh pokdarwis untuk mengenalkan pada wisatawan jajan tradisional, buka seminggu sekali setiap hari minggu pagi, sistemnya pasar ini semua masyarakat Kemiren boleh ikut, tapi masyarakat yang mau ikut harus daftar dulu dan yang dijual harus beda atau tidak boleh ada yang sama agar tidak terjadi persaingan, lalu tidak boleh jualan makanan modern seperti sosis, boleh sih tapi jualannya agak mundur atau tidak dilapak yang sejajar”. (wawancara dengan Mas Ade selaku Sie Humas dan Pengembangan SDM Pokdarwis pada 27 Juni 2020 pukul 16.20).

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa Pasar Kampung Osing diperuntukkan bagi semua masyarakat Kemiren yang mau berpartisipasi. Melalui pasar ini masyarakat diberdayakan dengan menampilkan pertunjukan seni dan berjualan sehingga bisa menambah pendapatan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Supriyanto dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Sebelum ada pasar ini masyarakat terutama lansia kerjanya disawah tapi setelah diberdayakan, ada pelatihan, mereka akhirnya buka lapak jualan sehingga disana bisa kerja jualan jajan, ada yang memainkan musik Osing, alhamdulillah walau sedikit sudah bisa menambah pemasukan masyarakat”. (wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Sekretaris Desa Kemiren pada 29 Juni 2020 pukul 19.15).

3. *Protecting* (Melindungi)

Kata *protection* dapat diartikan sebagai “melindungi”. *Protection* menurut Kartasmita (1996) dalam (Zubaedi, 2013:79) diartikan sebagai upaya melindungi atau memberikan perlindungan pada masyarakat. Dengan

begitu maka dalam pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan langkah-langkah yang dapat mencegah persaingan secara tidak seimbang serta praktik eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah, melalui keberpihakan, aturan atau kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah.

Protection yang ada dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Budaya Kemiren berupa Perda Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata khususnya pada Bab VI Pasal 11. Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa pengelola wisata adalah organisasi masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan organisasi yang menjadi salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Maka pemerintah daerah telah melakukan *protection* dalam pemberdayaan masyarakat dengan menyerahkan secara legal pengelolaan desa wisata pada organisasi masyarakat begitu juga di Desa Kemiren pada Pokdarwis Kencana Kemiren dan masyarakat. Hal itu menunjukkan keberpihakan pemerintah pada masyarakat.

Bentuk *protection* dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Budaya Kemiren juga dilakukan dengan adanya peraturan dalam pelaksanaan Pasar Kampung Osing. Dimana pokdarwis membuat peraturan terkait jenis dagangannya dan pedagangnya. Hal itu diungkapkan Mas Ade sebagai berikut:

“Pasar Kampung Osing dibentuk oleh pokdarwis untuk mengenalkan pada wisatawan jajan tradisional, bukanya seminggu sekali setiap hari minggu pagi, pasar ini sistemnya yaitu semua masyarakat Kemiren boleh ikut, tapi masyarakat yang mau ikut harus daftar dulu dan yang dijual harus beda atau tidak boleh ada yang sama agar tidak terjadi persaingan, lalu tidak boleh jualan makanan modern seperti sosis, boleh sih tapi jualannya agak mundur atau tidak dilapak yang sejajar?” (wawancara dengan Mas Ade selaku Sie Humas dan Pengembangan SDM Pokdarwis pada 27 Juni 2020 pukul 16.20).

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa yang boleh berjualan di Pasar Kampung Osing hanya masyarakat Kemiren. Selain itu untuk

menghindari persaingan antar masyarakat, pokdarwis membuat aturan terkait jajanan yang dijual dimana tidak boleh sama antara pedagang satu dengan pedagang lainnya. Kemudian pokdarwis juga melarang untuk menjual jajanan modern agar jajanan tradisional Suku Osing dikenal wisatawan. Maka aturan tersebut menjadi *protection* masyarakat Kemiren khususnya untuk mencegah persaingan tidak seimbang dalam hal penjualannya maupun makanan yang dijual, serta melindungi atau menjaga kearifan lokal.

4.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren pasti memiliki beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat kegiatan pemberdayaan dan pengembangan. Dari data dan informasi yang diperoleh diketahui beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren.

Berikut data dan informasi terkait faktor pendukung dan penghambat tersebut:

1. Faktor Pendukung

Berikut ini beberapa faktor yang mendukung pemberdayaan untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren, diantaranya sebagai berikut:

a. Kearifan Lokal

Desa Kemiren memiliki berbagai kearifan lokal berupa kebudayaan masyarakatnya yang menjadi faktor pendukung utama dalam pengembangan desa wisata budaya ini. Kearifan lokal tersebut mulai dari bahasa, kesenian, kuliner, adat istiadat dan lainnya, dimana itu menjadi potensi wisata dibidang budaya. Potensi wisata budaya tersebutlah yang menjadikan Desa Kemiren

sebagai destinasi pariwisata yang bergerak dibidang Kebudayaan. Hal itu diungkapkan Bapak Mastuki sebagai berikut:

“Kemiren potensi wisata budayanya memang ada dan tidak dibuat-buat, kearifan lokal masyarakatnya mulai dari adat, kuliner, kesenian, gotong-royongnya dan lainnya menjadi potensi wisata budaya, hal ini sangat mendukung kegiatan wisata budaya tinggal pemerintah dan pelaku pariwisata menyadarkan, memolesnya saja bagaimana memberikan dampak positif, karena ini sudah ada peluang, pasarnya besar sekali tinggal kita yang jempu bola karena semua sudah ada”. (wawancara dengan Bapak Mastuki selaku Kepala Seksi Pelayanan Pemerintah Desa Kemiren, 27 Juni 2020 jam 15.48).

Kegiatan kebudayaan atau adat yang ada di Kemiren menjadi faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren. Hal tersebut yang menjadikan masyarakat Kemiren dapat berpartisipasi dalam kegiatan kepariwisataan. Nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat Kemiren mempermudah perubahan *mindset* dan pola pikir yang diharapkan di suatu program pemberdayaan. Hal itu juga dibenarkan Ibu Sriwati selaku penari dan salah satu warga di Dusun Krajan, sebagai berikut:

“Masyarakat disini aktif di kegiatan-kegiatan adat, malah disuruh kegiatan terutama adat budaya itu kompak masyarakat sini kalau di desa itu”. (wawancara dengan Ibu Sriwati selaku salah satu warga Dusun Krajan pada 11 Juni 2020 pukul 13.39).

Sama halnya dengan Ibu Sriwati, Ibu Nita selaku salah satu warga Dusun Kedaleman juga menyampaikan, sebagai berikut:

“Disini partisipasi warganya melalui kegiatan adat seperti Tumpeng Sewu, Ider Bumi, kalau yang lainnya kurang aktif”. (wawancara dengan Ibu Nita selaku warga RT 2 RW 1 Dusun Kedaleman).

b. Adanya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan suatu pariwisata menjadi hal penting untuk keberlangsungan desa wisata terutama Desa Kemiren yang merupakan desa wisata budaya. Partisipasi masyarakat dilihat dari

keterlibatannya dalam perencanaan dan pelaksanaan. Dalam hal ini masyarakat Kemiren berpartisipasi dalam perencanaan melalui perwakilan masyarakat yang terlibat dalam musrenbang dan pertemuan rutin, serta terlibat dalam pelaksanaan sebagai penyedia amenities dan atraksi wisata. Hal ini diketahui dari wawancara dengan beberapa masyarakat salah satunya Ibu Sriwati. Berikut ini jawaban beliau saat diwawancarai terkait partisipasi:

“Saya terlibat, saya aktif ikut di kegiatan wisata, saya sering dipanggil untuk nari saat ada tamu (wisatawan), kadang disuruh nari di kuntulan, kegiatan seni, di pernikahan, sunatan, saya sebagai penari tuanya, saya senang adanya kemajuan pariwisata, senang bisa menghibur orang, ada tamu-tamu itu saya sering dipanggil, sebenarnya saya kerja disawah tapi kalau dipanggil untuk tampil saya libur dulu disawah karena sudah dapat penghasilan dari nari”.(wawancara dengan Ibu Sriwati selaku salah satu warga Dusun Krajan pada 11 Juni 2020 pukul 13.39).

Dengan begitu diketahui bahwa masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata dengan menjadi penyedia atraksi untuk wisatawan.

Dengan begitu partisipasi masyarakat Kemiren dalam pengelolaan pariwisata dapat mendukung pengembangan potensi wisata budaya di Desa Kemiren.

c. Adanya Dukungan Dari Pemerintah

Dukungan diberikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui visi misi yang menitikberatkan pengembangan wisata dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam visi Banyuwangi disebutkan bahwa “terwujudnya masyarakat banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia”. Pemerintah Banyuwangi juga mendukung melalui misinya khususnya misi ke tiga yaitu “membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan”. Dengan begitu

maka Pemerintah Banyuwangi membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan masyarakat atau peningkatan kualitas SDM sesuai potensi atau sumberdaya yang dimiliki seperti Desa Kemiren yang memiliki potensi berupa kearifan lokal sehingga dikembangkan menjadi Desa Wisata Budaya Kemiren.

Dukungan juga diperoleh dari DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi.

Dukungan tersebut dilakukan dengan menfestivalkan dua kegiatan adat di Kemiren serta pelatihan dan studi banding untuk peningkatan kapasitas pokdarwis dan masyarakat Kemiren. Dimana hal tersebut mendukung kegiatan pariwisata dan pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren. Selain itu, dukungan juga datang dari Pemerintah Desa Kemiren. Untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren, sejak tahun 2016 pemerintah desa telah menganggarkan dalam APBDes Kemiren berupa program atau kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas masyarakat di sektor pariwisata. Selain itu sejak 2019 pemerintah desa telah menyediakan sarana prasarana yang mendukung kebersihan lingkungan pariwisata berupa menyediakan satu petugas pemungut sampah dan membentuk bank sampah untuk pengelolaan sampah plastik dengan cara mendaur ulang sampah. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Mastuki, sebagai berikut:

“Kebersihan lingkungan dilakukan dengan membentuk Bank sampah yaitu pengelolaan plastik, ini baru anggaran tahun 2019 dari pemerintah desa, pemerintah desa juga sediakan motor pengangkut sampah”. (wawancara dengan Bapak Mastuki selaku Kepala Seksi Pelayanan Pemerintah Desa Kemiren pada 27 Juni 2020 pukul 15.48).

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dapat memperlambat proses pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

ditemukan beberapa faktor penghambat. Berikut ini penjelasan lebih lanjut terkait faktor yang menghambat berjalannya pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren, diantaranya sebagai berikut:

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat mempengaruhi pengembangan dan berjalannya suatu desa wisata termasuk Desa Wisata Budaya Kemiren. Dalam hal ini masyarakat Kemiren kurang memiliki kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Berikut gambar hasil observasi mengenai kurangnya kebersihan dan ketertiban lingkungan di Desa Kemiren:



Gambar 4.7 Kondisi Kebersihan Lingkungan di Desa Kemiren

Sumber: dokumentasi dari peneliti pada 21 Mei 2020



Gambar 4.8 Kondisi Lingkungan di Cagar Budaya Sukosari

Sumber: dokumentasi dari peneliti pada 21 Mei 2020

Menurut Bapak Mastuki fasilitas untuk kebersihan lingkungan sudah disediakan tinggal menyadarkan mereka untuk menjaga kebersihan disaat ada maupun tidak ada wisatawan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mastuki:

“Kesadaran masyarakat pada kebersihan lingkungan masih kurang, warga sekitar Cagar Budaya Sukosari kebersihannya kurang apalagi beberapa rumah masih ada kandang sapi jadi bau kotoran ternak, kita sudah sediakan motor pengangkut sampah mulai tahun 2016 cuma masih minim, lalu mesin pengelolaan sampah plastik sudah ada dan beroperasi per Februari ini, tapi bagaimana menjaga kebersihan mereka belum sadar, selain itu gimana menyambut wisatawan, sikapnya gimana itu saya rasa masih kurang, dari ukuran pariwisata kebersihannya kurang tapi kalau menurut mereka ya sudah cukup. Ya artinya butuh waktu atau proses, kalau terlalu ditekan nanti bilang *alah uwes ngene ae cukup* (halah sudah begini saja cukup), semua sudah difasilitasi tapi dengan keadaan seperti itu mereka belum sadar, jadi tinggal membuat kesadaran masyarakat”. (wawancara dengan Bapak Mastuki selaku Kepala Seksi Pelayanan Pemerintah Desa Kemiren pada 27 Juni 2020 pukul 15.48).

Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat juga berupa kurangnya partisipasi dalam kegiatan pariwisata dan kurang memanfaatkan peluang di pariwisata terutama masyarakat Dusun Kedaleman. Hal tersebut diungkapkan Bapak Jamari dalam wawancaranya berikut ini:

“Masyarakat dilingkungan ini partisipasinya kurang, masyarakat tidak ada yang terlibat dalam kepariwisataan, bukannya tidak dilibatkan tapi memang dari masyarakatnya yang tidak mau berpartisipasi karna jaraknya jauh dengan pusat wisatanya di Kemiren Tengah, masyarakat yang aktif ya masyarakat yang dekat dengan pusat wisatanya”. (wawancara dengan Bapak Jamari selaku Ketua RT 2 RW 1 Dusun Kedaleman pada 12 Juli 2020 pukul 18.49).

Kemudian Bapak Jamari juga menambahkan pernyataannya sebagai berikut, yaitu:

“Dalam Pasar Kampung Osing masyarakat sini tidak ada yang ikut, pelatihan dan rapat-rapat sering diundang tapi masyarakat sini tidak mau, sudah diajak dan ditunjuk masyarakat disini tidak ada yang berminat dan kurang aktif, pemudanya juga tidak mau diajak masalah desa kurang aktif karna sibuk dengan kerjanya sendiri”. (wawancara dengan Bapak Jamari selaku Ketua RT 2 RW 1 Dusun Kedaleman pada 12 Juli 2020 pukul 18.49).

Melalui wawancara tersebut diketahui masyarakat di lingkungan RW 1 Dusun Kedaleman memiliki partisipasi yang rendah. Dimana mereka kurang aktif dalam kegiatan kepariwisataan termasuk rapat untuk masalah desa. Hal itu juga diungkapkan bapak Supriyanto, berikut ini:

“Kemiren dibagi 2 dusun, timur Kedaleman, barat Krajan, yang paling aktif Krajan, soalnya tamu yang datang kebanyakan di Krajan, yang ke Kedaleman itu jarang, paling dusun Kedaleman itu di *homestay*, disanggar barong Pak Ucip, sanggar gandrung, sama museum antik Pak Sae, tapi walau sudah ada 3 destinasi masyarakat tidak memanfaatkan, respon dan partisipasi lebih aktif masyarakat Dusun Krajan, kalau Kedaleman cenderung fokus ke profesinya masing-masing, jadi masyarakat Dusun Kedaleman dalam memanfaatkan peluang dari pariwisata masih kurang, karena memang dari karakter masyarakatnya, intinya kesadaran masyarakatnya, kita sudah antusias terhadap tamu tapi ada yang belum sadar bahwa lingkungan masih kotor, jemuran didepan rumah, mungkin karena sudah kebiasaan, jadi masyarakat perlu adaptasi lagi”. (wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Sekretaris Desa pada 29 Juni 2020 pukul 19.28)

Kemudian, Bapak Supriyanto juga menambahkan pernyataannya, sebagai berikut:

“Misal ada wisatawan yang minta gedokan, kesenian, Dusun Krajan lebih mementingkan tamunya, tapi kalau Kedaleman diajak di sektor pariwisata cenderung memilih ke profesinya sendiri kalau di Krajan masih bisa disana saja, jadi masyarakatnya memang beda, *homestay* pun begitu, jadi kalau Dusun Krajan gak dikasi *homestay* protes, kalau Kedaleman meski *homestay*nya kosong gak dikasi tamu dia tidak apa-apa, antusiasnya berbeda, malah kadang ditawari tidak mau bilanganya libur dulu yang lainnya saja, kalau warga Dusun Krajan tidak pernah, mereka *welcome* semua, kegiatan pelatihan juga begitu, yang ikut paling banyak Dusun Krajan, Kedaleman cuma 1, 2 orang saja”. (wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Sekretaris Desa, pada 29 Juni 2020 jam 19.28)

Informasi dari Bapak Jamari dan Bapak Supriyanto terkait kurangnya partisipasi masyarakat Dusun Kedaleman juga diakui warga Dusun Kedaleman sendiri. Dari hasil wawancara dengan Bapak Selamat dan Ibu Nita selaku warga RT 2- RW 1 Dusun Kedaleman menyatakan bahwa warga memang jarang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan selain kegiatan adat,

dan mengakui kurang berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata. Berikut hasil wawancara dengan Mas Ade terkait hal tersebut:

“Di desa wisata ini kesadaran dan keaktifan masyarakatnya masih kurang terutama Dusun Kedaleman, mereka kurang aktif dalam kegiatan pariwisata, selain itu juga kurang menjaga kebersihan lingkungan, jadi kesadarannya pada wisata dan kebersihan masih kurang sekali, seperti di Cagar Budaya Sukosari saat ada wisatawan jemurannya masih didepan, kebersihan lingkungan kurang, sampai wisatawan ada yang mengkritik masalah kebersihan melalui agen travelnya, beda dengan warga Dusun Krajan yang lebih aktif dan dalam kebersihan mereka juga sadar” (wawancara dengan Mas Ade selaku warga RT 2 RW 4 Dusun Kedaleman dan selaku Sie Humas dan Pengembangan SDM Pokdarwis, 27 Juni 2020 pukul 16.20).

Kurangnya partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari jumlah pelaku wisata di Desa Kemiren. Dimana berdasarkan dari pokdarwis Tahun 2019 diketahui bahwa kurang lebih hanya 9% dari jumlah masyarakat Kemiren yang terlibat secara langsung pada kegiatan pariwisata. Hal itu diketahui dari tabel jumlah pelaku wisata berikut ini:

Tabel 4.9 Jumlah Pelaku Wisata di Desa Wisata Budaya Kemiren

Nama Kelompok	Jumlah	Peran
Pokdarwis Kencana Kemiren	20	EO Dan Pemandu Wisata
Pasar Kampong Osing	53	Penyedia Kuliner Jajanan Khas Osing
Barong Tresno Budoyo	9	Pertunjukan Seni
Barong Sapu Jagad	20	Pertunjukan Seni
Barong Siswo Budoyo	9	Pertunjukan Seni
Cinde Sutro	25	Pertunjukan Seni Dan Sewa Kostum
Kuntulan	10	Pertunjukan Seni
Angklung Paglak	4	Pertunjukan Seni
Lesung/Gedogan	5	Pertunjukan Seni
Sukosari	10	Pemilik Rumah Adat Kawasan Cagar Budaya Osing
Tokoh Keamanan	5	Keamanan Kendaraan Parker
Homestay	55	Penyedia Akomodasi Penginapan
Lembaga Adat	5	Narasumber Dan Pelestari Adat Osing
UKM Kopi Jaran	5	Penyedia Oleh-oleh dan

Goyang		Eduwisata Kopi
Karang Taruna	10	Pengelola Pesantongan Kemangi (warung makanan dan minuman)
TOTAL	245	PELAKU WISATA

Sumber: Pokdarwis Kencana Kemiren tahun 2019

Data tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Mas Edy terkait pelaku wisata berikut ini:

”Menurut saya yang ikut serta pariwisata masih kurang, itu kan masih 9% dan mungkin kedepannya bukan orang harus berpindah pekerjaan ke pariwisata seperti petani harus ke pariwisata, tapi intinya bagaimana caranya seorang petani bisa mengembangkan pertaniannya lewat pariwisata”. (wawancara dengan Mas Edy selaku Ketua Pokdarwis Kencana Kemiren pada 21 Mei 2020 pukul 15.49).

Mas Edy juga menambahkan pernyataannya tersebut sebagai berikut:

“Beberapa orang belum menyadari bawasannya adanya wisata berdampak positif terutama di perekonomian, itu bisa dilihat seperti di orang jualan beras bisa laku, jualan ini bisa laku, jadi pariwisata sebagai media untuk mengembangkan perekonomian, dulu di Cagar Budaya Sukosari gak ada orang yang ke sini ke tempat plosok ini, paling ya dipetilasan setiap minggu atau Kamis, sekarang lumayan banyak yang dulu mati, gak ada kegiatan di sini, sakarang banyak yang kesini, masyarakat belum sadar belum memanfaatkan *moment* ini, kalau sudah sadar mungkin banyak jualan atau memanfaatkan peluang ini, kita perlu mengarahkan”. (wawancara dengan Mas Edy selaku Ketua Pokdarwis Kencana Kemiren, 21 Mei 2020 jam 15.49).

Berdasarkan informasi dari beberapa narasumber tersebut diketahui

bahwa masyarakat Dusun Kedaleman memiliki partisipasi yang rendah di kegiatan pariwisata dan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal tersebut bisa menghambat perkembangan dan kegiatan pariwisata, karena dalam desa wisata budaya kearifan lokal masyarakatnya menjadi objek yang disuguhkan pada wisatawan. Maka partisipasi dan kesadaran masyarakat menjadi hal penting untuk keberlanjutan dan perkembangan Kemiren. Selain itu kebersihan menjadi bagian *sapta pesona* pariwisata, sehingga kebersihan destinasi wisata penting untuk pengembangan wisata budaya di Kemiren.

b. Kurangnya Kapasitas atau Kompetensi SDM Pokdarwis Kencana Kemiren

Kapasitas SDM Pokdarwis Kencana Kemiren masih kurang khususnya dalam bidang Informasi Teknologi (IT). Pada jaman sekarang IT sangat dibutuhkan baik dalam hal promosi, pemesanan dan lainnya sehingga mempermudah wisatawan untuk mengakses suatu destinasi wisata. Sehingga SDM dengan keahlian di bidang IT sangat diperlukan terutama untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren. Hal itu diungkapkan Mas Edy:

“Kendala disini selain masalah parkir, dan kurangnya kesadaran masyarakat juga masih kurangnya kualitas atau keahlian SDM pokdarwis terutama masalah IT, selama ini kita masih pariwisata kita masih dijual secara *offline*, jadi kita masih perlu banyak belajar menggunakan aplikasi-aplikasi pariwisata seperti *Airbnb Experiences* untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren, kan lebih simple penjualannya seperti di Desa Banjar sudah menggunakan ini.” (wawancara dengan Mas Edy selaku Ketua Pokdarwis Kencana Kemiren pada 21 Mei 2020 pukul 15.49).

Selain kurang ahli di bidang IT, keahlian dibidang kearsipan juga masih kurang. Kearsipan penting agar pencatatan keuangan, pengeluaran, pemasukan, pemesanan, assetnya, dan lain sebagainya jelas sehingga profit dialokasikan kemana jelas. Hal itu diungkapkan Mas Ade sebagai berikut:

“Dibanding dengan pokdarwis di Desa Wisata Kota Batu saat studi banding dulu, pengarsipan disana sangat bagus sekali semua jelas, pencatatan assetnya jelas, wisatawan yang pesan itu semua jelas, berbeda jauh dengan disini, kita sangat kurang sekali SDM yang ahli dibidang pengarsipan untuk mendata wisatawan, pemesanannya, keuangannya trus untuk mahasiswa penelitian juga”. (wawancara dengan Mas Ade selaku Sie Humas dan Pengembangan SDM Pokdarwis pada 27 Juni 2020 pukul 16.20).

c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana prasarana di Desa Wisata Budaya Kemiren dapat menghambat pengembangan. Keterbatasan tersebut berupa kurangnya lahan parkir dan minimnya aksesibilitas jaringan internet. Kurangnya lahan parkir

untuk kendaraan wisatawan menjadi penghambat karena berkaitan dengan ketertiban dan kenyamanan wisatawan. Kekurangan lahan parkir tersebut ketika ada rombongan wisatawan dengan kendaraan besar seperti bus pariwisata sehingga terjadi ketidakseimbangannya antara lahan parkir dengan jumlah kendaraan dan mengganggu kelancaran lalu lintas karena bahu jalan dijadikan tempat parkir juga. Hal itu diungkapkan Bapak Jamari berikut ini:

“Salah satu permasalahan disini parkir tidak memenuhi syarat, banyak yang parkir di pinggir jalan, kendaraan-kendaraan yang parkir itu memakan bahu jalan terutama bus-bus, kalau mobil satu dua masih bisa”. (wawancara dengan Bapak Jamari selaku Ketua RT 2 RW 1 Dusun Kedaleman pada 12 Juli 2020 pukul 18.49).

Kurangnya lahan parkir juga diungkapkan oleh Mas Edy. Menurutnya tidak adanya tanah kas desa menyebabkan pembangunan untuk lahan parkir para wisatawan tidak dapat dilakukan. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan Mas Edy sebagai berikut:

“Kendalanya parkir ini yang agak susah terutama kalau bus besar kuota besar, kalau kuota kecil masih bisa, trus di Kemiren itu tanah kas desa justru ada di Desa Kampung Anyar, jadi untuk membangun tempat seperti lahan parkir atau destinasi wisata baru tidak bisa karena tanah kas desanya di desa lain”. (wawancara dengan Mas Edy selaku Ketua Pokdarwis Kencana Kemiren 21 Mei 2020 jam 15.49).

Mas Ade juga menyatakan permasalahan terkait lahan parkir. Dimana selama ini Desa Kemiren menggunakan destinasi wisata modern di Kemiren yang dikelola pihak swasta yaitu Wisata Osing (WO) sebagai tempat parkir wisatawan dengan memberikan *fee* pada pengelola WO tersebut. Berikut wawancara dengan Mas Ade terkait hal tersebut:

“Permasalahan disini selain kurangnya keaktifan masyarakat Dusun Kedaleman juga ada masalah dalam parkir, parkir masih ikut di WO, tamu atau paket wisatawan yang besar selama ini parkirnya di WO dengan sistem kerjasama yaitu memberikan *fee* ke pihak pengelola WO ya pihak swasta tadi, selama ini wisatawan dengan kapasitas 100 di tempatkan di sanggar, kapasitas dibawah 50 di

Pesantogan kemangi, kapasitas diatas 100 di WO dengan didesain nuansa Osing entah acaranya, pertunjukan seninya, agar nuansa moder dari WO hilang, WO sebenarnya masuk asset desa tapi masuk kewenangan pemerintah daerah dan sekarang dikelola pihak ketiga, sekarang pihak ketiga belum ada keputusan untuk memperpanjang kontrak, semakin berkembangnya pariwisata pokdarwis butuh tempat luas sehingga butuh banget dengan WO, dan tahun ini atau tahun depan mau diambil alih untuk dikelola oleh Desa Kemiren sendiri, wisatawan di Kemiren tidak butuh destinasi modern, namanya saja Desa Adat Osing disini yang dicari tradisionalnya, jika WO sudah dikelola Desa Kemiren diharapkan ada museum Suku Osing, museum batik, bisa jadi tempat parkir juga jadi tidak perlu bayar lagi parkirannya, pinginnya dibuat seperti itu dan pemerintah desa sendiri juga sudah merespon”. (wawancara dengan Mas Ade selaku Sie Humas dan Pengembangan SDM Pokdarwis, 27 Juni 2020 jam 16.20).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Ade diketahui bahwa Pokdarwis Kencana Kemiren berharap WO dapat dikelola oleh Desa Kemiren sendiri. Sehingga masalah kurangnya lahan parkir dapat terselesaikan tanpa harus membayar *fee* ke pihak swasta dan untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren. Lebih lanjut permasalahan terkait kurangnya lahan parkir dan WO juga dibahas oleh Bapak Supriyanto dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Kendalanya di parkir, biasanya memanfaatkan WO, wisatawan turun dulu ke destinasi wisata baru diparkir ke WO misal cuma satu dua bisa masuk di parkir Pesantogan Kemangi, kalau lebih dari 2 bus diarahkan ke WO, masalah parkir yang paling parah adalah saat festival, sangat keterbatasan lahan, akhirnya sepeda parkir dihalaman masyarakat, sudah tidak muat, dulu sebelum dibukanya Warung Kajoon dimanfaatkan untuk parkir, dulu rencananya desa mau nyewa lahan itu buat parkir bus dan parkir saat ada festival tapi belum sampai *acc* sudah dikontrak orang lain untuk dijadikan warung, jadi sudah tidak bisa”. (wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Sekretaris Desa, 29 Juni 2020 pukul 19.28).

Bapak Supriyanto juga menambahkan pernyataannya sebagai berikut:

“Disektor pariwisata kalau ada lahan kita ada anggaran DD, itu kalau digelontorkan ke pariwisata semua tidak apa-apa tapi harus lewat BUMDES, tapi tidak punya lahan jadi mau digelontorkan kemana, satu-satunya yang diharapkan adalah WO, WO kontraknya habis tahun 2020 dari pihak ketiga swasta, pemerintah desa mengajukan ke

pemda kalau kontraknya habis apa bisa dikelola desa, kalau bisa dikelola desa inshaAllah Desa Kemiren punya destinasi wisata baru, harusnya bisa yang mengelola Kemiren, maka masyarakat lebih bisa diberdayakan, saya sendiri tidak tahu kenapa dulu disewakan ke pihak ketiga padahal sekarang tidak terawat dan rusak semua, isinya cuma kolam renang dan penginapan tapi sudah rusak semua, tidak direnovasi jadi orang mau menginap malas, WO sepi paling cuma untuk pelajar kegiatan olahraga”. (wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Sekretaris Desa pada 29 Juni 2020 pukul 19.28).

Kemudian, internet terutama pada jaman sekarang menjadi salah satu fasilitas yang diperlukan wisatawan karena untuk mengakses media sosial ataupun untuk berkomunikasi. Desa Wisata Budaya Kemiren memerlukan fasilitas tersebut untuk menunjang pengembangan pariwisata. Namun saat observasi pada bulan Desember 2019 sampai Juli 2020 jaringan internet di Desa Kemiren cukup sulit diakses terutama bagi pengguna kartu perdana tertentu selain *Telkomsel* dan bagi para wisatawan mancanegara, sehingga dapat mengganggu komunikasi ataupun keperluan tertentu. Sedangkan wifi hanya tersedia di Kantor Desa Kemiren saja Maka jaringan internet penting untuk menunjang kegiatan pariwisata dan pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren. Hal itu juga diungkapkan Mas Ade sebagai berikut:

”Disini masih kekurangan fasilitas untuk wisatawan berupa akses internet yang cukup, internet penting karena dari pengalaman kemarin biasanya wisatawan mancanegara butuh internet, mereka kesulitan *signal* karena tidak pakai kartu perdana Indonesia, sehingga untuk pesan ojek *online* harus kebalai desa dulu, jadi tidak semua area wisata disini ada wifinya”. (wawancara dengan Mas Ade selaku Sie Humas dan Pengembangan SDM Pokdarwis, 27 Juni 2020 jam 16.20).

4.4 Analisis Data dan Pembahasan

4.4.1 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Desa

Wisata Budaya Kemiren

Pelaksanaan pengelolaan desa wisata budaya di Kemiren telah menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat. Penerapan konsep tersebut

sesuai dengan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang tertuang dalam UU No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pasal 5, Pasal 7 Huruf b serta Pasal 30 Huruf h dan j serta tertuang pada Perda Banyuwangi No. 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata tepatnya Pasal 4. Penerapan konsep tersebut juga sesuai dengan Perda Banyuwangi No. 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Pasal 11 Huruf b, d, dan Pasal 23 Huruf e. Berikut ini analisis data dan pembahasan terkait pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren berdasarkan konsep pemberdayaan dari Kartasmita (1996) dalam (Zubaedi, 2013:79), yaitu:

1. *Enabling* (Memungkinkan)

Enabling merupakan cara atau usaha untuk membangun suasana yang dapat membuat potensi masyarakat berkembang. *Enabling* dalam penelitian ini diupayakan program atau kegiatan pemberdayaan yang dapat mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan potensi wisata budaya dan potensi yang dimiliki masyarakat Kemiren. Menyadarkan masyarakat dapat dilakukan dengan mengikutsertakannya dalam kegiatan pariwisata, sehingga partisipasi masyarakat menjadi hal utama dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata.

Enabling dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Budaya Kemiren dilakukan dalam berbagai bentuk program atau kegiatan. *Enabling* yang pertama dengan membentuk lembaga kemasyarakatan yang khusus bergerak di sektor pariwisata desa yaitu kelompok sadar wisata (pokdarwis), dimana di Desa Kemiren disebut dengan Pokdarwis Kencana Kemiren.

Pokdarwis Kencana Kemiren dibentuk melalui musyawarah antara perangkat desa, BPD, lembaga desa, lembaga adat, dan perwakilan dari tokoh masyarakat

lainnya, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Kemiren Nomor: 188/7/429.503.02/2017 Tahun 2017.

Pokdarwis dibentuk sebagai upaya penyadaran yang dilakukan DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Desa Kemiren untuk menyadarkan masyarakat Kemiren terhadap potensi wisata budaya yang ada di Kemiren. Pokdarwis selain sebagai pengelola Desa Wisata Budaya Kemiren juga menjadi kaki tangan pemerintah dalam menjalankan peranan menyadarkan masyarakat. *Enabling* ini sesuai dengan pemberdayaan menurut Priyono & Pranarka (1996: 77) *to give power or authority*, yaitu memberi/mendelegasikan kekuasaan/otoritas pada pihak yang kurang/ belum berdaya.

Maka dalam hal ini pemerintah telah memberikan/mengalihkan otoritasnya dalam menyadarkan masyarakat dan mengelola wisata pada pokdarwis.

Adanya pokdarwis diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dibidang pariwisata dan menjadi pelaku wisata. Pokdarwis sebagai alat menyadarkan masyarakat dan anggotanya sendiri agar memiliki sadar wisata, peduli dengan budayanya sendiri dan bisa menangkap peluang dan memanfaatkan potensi wisata budaya di Kemiren untuk berkembang.

Kelembagaan ini juga menjadi wadah masyarakat dalam kegiatan wisata dan wadah untuk memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai pariwisata.

Melihat proses dan tujuan pembentukan pokdarwis di Desa Wisata Budaya Kemiren, maka telah sesuai dengan Perda Kabupaten Banyuwangi No 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata Pasal 3 dan 11. Pembentukan pokdarwis juga sesuai pernyataan dari Cook dan Macaulay (1997) dalam (Maani, 2011:59-61), dimana menurutnya pemberdayaan dilakukan dengan membebaskan seseorang dari kendali laku dan memberikan kebebasan untuk

bertanggung jawab terhadap ide, keputusan, dan tindakannya. Lanjutnya pemberdayaan dilihat dari akronim “ACTORS”, dalam hal ini dibentuknya pokdarwis maka telah terjadi *Authority* (wewenang), *Trust* (kepercayaan), *Opotunities* (kesempatan), dan *Responsibilities* (tanggung jawab) pada masyarakat khususnya pengurus pokdarwis. Selain itu juga sesuai pernyataan Sunaryo (2013:159), bahwa dalam kerangka pengembangan destinasi wisata harus menyangkut beberapa komponen utama yang salah satunya adalah *Institution* (kelembagaan), yaitu keberadaan dan peran setiap unsur organisasi atau institusi pengelola kepariwisataan berupa pemerintah, swasta maupun masyarakat sebagai pelaksana kegiatan pariwisata. Sehingga pembentukan pokdarwis sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan pariwisata adalah salah satu komponen utama dalam pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren.

Bentuk *enabling* yang kedua adalah dengan mengadakan pertemuan rutin yang dilakukan DISBUDPAR dan Pemerintah Desa Kemiren seperti dalam rapat bulanan, rapat pertiga bulan, musrenbang dan musyawarah. Dimana pokdarwis dan beberapa tokoh atau perwakilan dari masyarakat juga diikutsertakan dalam pertemuan rutin tersebut. Kegiatan itu mengikutsertakan pokdarwis dan masyarakat dalam perencanaan untuk berdiskusi terkait kepariwisataan. Seperti halnya Murphy dalam (Madiun, 2010), dimana menurutnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata dapat memberikan kontribusi dalam visi yang berkaitan dengan warisan dan budaya masyarakat lokal dalam pengembangan produk pariwisata. Sehingga pertemuan rutin menjadi media pokdarwis, masyarakat maupun pelaku wisata lainnya agar bisa berkontribusi, agar tahu permasalahan dan perkembangan pariwisata serta agar memiliki sadar wisata.

Enabling yang ketiga adalah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Menurut Fitriani dan Ma'rif (2017:2-4) yang paling utama adalah partisipasi masyarakat lokalnya, mereka berperan penting sejak awal pembentukan hingga dijalankannya kegiatan desa wisata. Sehingga partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan terutama Desa Wisata Budaya Kemiren sangat penting untuk pengembangannya karena yang sungguh pada wisatawan adalah budaya masyarakatnya. Mengikutsertakan masyarakat dilakukan DISBUDPAR melalui festival kebudayaan dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat melalui manfaat yang mereka rasakan. Event festival dari DISBUDPAR dapat memberikan manfaat khususnya dalam perekonomian masyarakat dan pelestarian budaya. Pokdarwis Kencana Kemiren juga mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pariwisata sebagai penyedia amenities dan atraksi untuk wisatawan agar dapat memunculkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka melalui manfaat yang dirasakan.

Wahab (1975:55) menjelaskan manfaat pariwisata dimana ia memandang pariwisata sebagai salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan dan standart hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Pariwisata menjadi sektor yang kompleks atau memiliki *multiplier efec* dan bermanfaat dibidang perekonomian. Dari pariwisata, industri klasik seperti kerajinan tangan, cinderamata, penginapan dan transportasi dapat terealisasi atau hidup. Dari manfaat tersebutlah diharapkan bisa memunculkan sadar wisata dalam diri masyarakat dan sebagai pendorong masyarakat untuk dapat memanfaatkan peluang-peluang di sektor pariwisata.

Enabling yang keempat yaitu melalui Program Pembangunan Rumah Adat Osing dari Pemerintah Desa Kemiren untuk masyarakat Kemiren.

Menurut Gayatri (2005:95) pemerintah memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi pariwisata dengan tiga peran yaitu motivator, fasilitator, dan dinamisator. Melalui program itu maka pemerintah berperan sebagai motivator dan fasilitator yaitu pemerintah memotivasi masyarakat untuk sadar menjaga kearifan lokal serta sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas untuk mendukung kegiatan kepariwisataan. Dalam hal ini pemerintah desa memfasilitasi masyarakat melalui dana bantuan dari program tersebut untuk menyadarkan masyarakat dalam menjaga kearifan lokal dan untuk menunjukkan pada wisatawan salah satu identitas Suku Osing yaitu Rumah Gebyok. Program itu juga menunjang kegiatan pariwisata dan pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren.

2. Empowering (Memperkuat Potensi)

Empowering merupakan usaha untuk memperkuat atau meningkatkan potensi, daya atau kapasitas yang dimiliki masyarakat. Sehingga langkah pemberdayaan masyarakatnya harus dilakukan dengan aksi nyata. Seperti Fitari dan Ma'rif, (2017:4), fokus utama pengembangan desa wisata yaitu memperkuat kemampuan masyarakat lokal dalam mengarahkan dan mengatasi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Prijono & Pranarka (1996: 77), dalam pemberdayaan salah satunya dengan *to give ability to or enable* yaitu memberikan kemampuan atau keberdayaan dan peluang pada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Maka *empowering* dilakukan untuk meningkatkan kualitas atau kompetensi masyarakat agar dapat berkembang.

Menurut Sunaryo (2013:219) pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata harus diarahkan pada beberapa hal diantaranya berikut ini:

- a. Meningkatkan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat selaku pelaku penting dalam pengembangan pariwisata.
- b. Meningkatkan peran, posisi dan kualitas keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
- c. Meningkatkan pengaruh, nilai dan manfaat positif dari pengembangan pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan pariwisata.

Empowering dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Budaya

Kemiren ada beberapa bentuk, yang pertama melalui studi banding dengan mengajak Pokdarwis Kencana Kemiren mengunjungi desa wisata budaya lain yang dapat dijadikan sebagai percontohan. Studi banding dilakukan DISBUDPAR dan Pemerintah Desa Kemiren untuk menambah wawasan dan pengetahuan SDM pokdarwis selaku pengelola pariwisata agar kedepannya dapat mengembangkan desa wisatanya. Studi banding dijadikan alat intropeksi dan percontohan dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Kemiren.

Sesuai dengan maksud *empowering* dari Kartasamita dan Sunaryo, melalui studi banding diharapkan dapat terjadi peningkatan mutu, ada perbaikan, perkembangan, serta bisa menjadi barometer dan pembanding.

Bentuk *empowering* yang kedua melalui program atau kegiatan pelatihan. Pelatihan diberikan DISBUDPAR, Pemerintah Desa Kemiren, dan Pokdarwis Kencana Kemiren untuk masyarakat sesuai potensi wisata budaya di Kemiren dan potensi yang dimiliki masyarakat untuk meningkatkan kapasitas

dalam diri seseorang yang telah memiliki *basic* atau *soft skill*, sehingga terjadi perkembangan di individu dan desa tersebut. Maka pelatihan sama halnya dengan studi banding yang juga dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas atau kompetensi SDM pokdarwis dan masyarakat sebagai penunjang kegiatan dan pengembangan pariwisata.

Bentuk *empowering* yang ketiga dengan membangun sarana prasarana kepariwisataan yang mendukung kegiatan pariwisata. Hal itu dilakukan pemerintah desa melalui anggaran APBDes sejak tahun 2016. Sesuai pernyataan Gayatri (2005:95) bahwa pemerintah termasuk pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi pariwisata melalui peranannya sebagai fasilitator. Subejo dan Supriyanto (2004) dalam (Mardikanto dan Soebiato, 2017:45) juga menyebutkan salah satu tujuan pemberdayaan sebagai proses memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara profesional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan diri secara proporsional dan memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang. Dengan begitu fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Desa Kemiren melalui pembangunan sarana prasarana kepariwisataan dapat mendukung kegiatan pariwisata sehingga *empowering* ini sebagai upaya untuk peningkatan dan pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren.

Empowering yang keempat dengan membentuk Pasar Kampung Osing yaitu sebagai media masyarakat dalam mengembangkan potensinya, untuk menunjang kegiatan pariwisata dan agar wisatawan mengenal kuliner khas Suku Osing. Melalui pasar tersebut masyarakat diberdayakan dengan berjualan kuliner dan menampilkan pertunjukan seni, sehingga pasar ini bisa menambah

pendapatan masyarakat. Pasar Kampung Osing dibentuk pokdarwis sebagai usaha peningkatan potensi yang dimiliki masyarakat untuk pengembangan pariwisata Desa Wisata Budaya Kemiren.

3. *Protection* (Melindungi)

Protection, menurut Kartasasmita (1996) dalam (Zubaedi, 2013:79) adalah upaya melindungi atau memberikan perlindungan pada masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat perlu upaya-upaya yang dapat mencegah persaingan tidak sehat dan praktik eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah dengan keberpihakan pada masyarakat melalui aturan atau kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah. *Protection* dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Budaya Kemiren berupa Perda Banyuwangi No. 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata. Perda tersebut menjadi salah satu dasar pengelolaan Desa Wisata Budaya Kemiren oleh masyarakat.

Namun *protection* dari Pemerintah Banyuwangi terkait pengelolaan Desa Wisata Budaya Kemiren oleh masyarakat Kemiren masih kurang atau perlu ditingkatkan dengan menyerahkan pengelolaan destinasi Wisata Osing (WO) yang merupakan destinasi wisata modern di Kemiren pada masyarakat Kemiren bukan pada pihak swasta. Dengan menyerahkan pengelolaan WO pada masyarakat berarti pemerintah berpihak pada masyarakat dan melindungi masyarakat karena mencegah persaingan tidak seimbang serta praktik eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Sehingga *protection* dengan menyerahkan pengelolaan WO pada masyarakat perlu dilakukan untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren, mengingat Desa Kemiren sebagai desa wisata budaya yang dikelola oleh masyarakat.

Sedangkan *protection* dari Pemerintah Desa Kemiren masih belum dilakukan. Dimana pernyataan secara legal terkait pengelolaan Desa Wisata Budaya Kemiren yang diserahkan pada Pokdarwis Kencana Kemiren dan masyarakat Kemiren masih belum ada di tingkat desa. Dimana pemerintah desa menyatakan bahwa surat keputusan terkait desa wisata masih dalam proses pengajuan ke bupati. Maka *protection* masyarakat Kemiren dalam pengelolaan Desa Wisata Budaya Kemiren masih belum ada di tingkat desa.

Protection dari Pokdarwis Kencana Kemiren untuk mencegah persaingan secara tidak seimbang adalah dengan membentuk tata tertib dalam pelaksanaan Pasar Kampung Osing. Dimana tata tertib tersebut disebutkan bahwa kuliner yang dijual dalam Pasar Kampung Osing adalah kuliner khas Suku Osing, dan antar pedagang satu dengan pedagang lainnya tidak boleh menjual kuliner yang sama. Kemudian pokdarwis juga melarang untuk menjual jajanan modern agar kuliner khas Suku Osing lebih dikenal. Tata tertib tersebut juga menyatakan yang berjualan di Pasar Kampung Osing harus masyarakat Kemiren. Maka tata tertib tersebut adalah bentuk *protection* terhadap masyarakat Kemiren untuk mencegah persaingan tidak seimbang dari segi penjualnya, makanan yang dijual, dan menjaga kearifan lokal.

4.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren memiliki beberapa faktor pendukung.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, terdapat empat faktor pendukung pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren. Berikut ini beberapa faktor pendukungnya yaitu:

a. Kearifan lokal

Menurut Koentjaraningrat (1992) dalam (Kutha R, 2011:396-435), terdapat tujuh unsur dalam kebudayaan. Dimana tujuh unsur tersebut ada didalam kebudayaan masyarakat Kemiren dan menjadi kearifan lokal yang dimiliki Kemiren serta menjadi potensi wisata budaya. Kearifan lokal masyarakat menjadi daya tarik pariwisata yang dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi objek wisata yang disuguhkan pada wisatawan.

Pendit (2004:117) membagi potensi pariwisata menjadi dua dimana salah satunya adalah potensi budaya yang dapat berupa kesenian, adat istiadat, seni pertunjukan, peninggalan bersejarah dan lainnya. Dalam industri pariwisata kearifan lokal menjadi penarik wisatawan sehingga menjadi daya tarik wisata.

Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kemiren menjadi faktor pendorong keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren yang bergerak diwisata budaya. Melalui kebudayaan juga masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata karena yang disuguhkan pada wisatawan kearifan lokal masyarakatnya. Nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat Kemiren mempermudah perubahan *mindset* dan pola pikir yang diharapkan dalam suatu program pemberdayaan.

b. Adanya partisipasi masyarakat

Menurut Fitriani dan Ma'rif (2017:2-4) partisipasi masyarakat lokal dalam desa wisata menjadi hal yang paling utama. Dimana masyarakat lokal berperan penting sejak awal pembentukan hingga dijalankannya kegiatan desa wisata. Partisipasi masyarakat berupa keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Begitu juga partisipasi atau keterlibatan

masyarakat Kemiren dalam perencanaan maupun kegiatan pariwisata juga menjadi hal penting untuk keberlangsungan Desa Wisata Budaya Kemiren.

Masyarakat harus dilibatkan dalam pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren dari awal hingga akhir karena yang menjadi objek wisata dalam desa wisata ini adalah kearifan lokal masyarakatnya. Sehingga partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendukung berjalannya kegiatan wisata dan pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren. Berdasarkan data yang diperoleh, masyarakat dilibatkan dengan cara mengikutsertakan dalam perencanaan seperti dalam pembentukan Pokdarwis Kencana Kemiren, pertemuan rutin dan musrenbang. Selain itu masyarakat Kemiren juga diikutsertakan dalam pelaksanaan pariwisata seperti di *event* Banyuwangi Festival dan sebagai penyedia amenities dan atraksi untuk wisatawan.

c. Adanya dukungan dari pemerintah

Menurut Cook dan Macaulay (1997) dalam (Maani, 2011:59-61), pemberdayaan untuk menumbuhkan keberdayaan masyarakat mengacu pada pemberdayaan yang berasal dari dalam dan luar masyarakat. Menurutnya pemberdayaan dilihat dari akronim “ACTORS yaitu *Authority* (wewenang), *Competenci* (kemampuan), *Trust* (kepercayaan), *Oportunities* (kesempatan), *Responsibilities* (tanggung jawab), dan *Supports* (dukungan). Dari 6 akronim itu salah satunya adalah *supports* yaitu bentuk pemberdayaan yang berasal dari luar masyarakat. Selain itu Gayatri (2005:95) menyebutkan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi pariwisata dengan tiga peran yaitu motivator, fasilitator, dan dinamisator. Dari 3 ahli tersebut maka salah satu peran pemerintah adalah pendukung dalam pemberdayaan masyarakat yang bisa sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator.

Adanya dukungan pemerintah dapat membantu kelancaran kegiatan pariwisata dan pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren. Dalam hal ini Pemerintah Banyuwangi telah memberi *supports* melalui visi misinya yang menegaskan pengembangan pariwisata dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat. Selain itu DISBUDPAR juga mendukung dengan membuat 3 *event* Banyuwangi festival di Kemiren yaitu Festival Tumpeng Sewu, Festival Barong Ider Bumi dan Festival Kopi Sepuluh Ewu, serta memberi pelatihan dan studi banding. Semua hal itu adalah bentuk *supports* pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Desa Wisata Kemiren.

Dukungan juga datang dari Pemerintah Desa Kemiren berupa program pelatihan serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Menurut Sunaryo (2013:159) kerangka pengembangan destinasi wisata ada beberapa komponen utama yang dikembangkan dalam pariwisata salah satunya *Ancillary service* (fasilitas pendukung). *Ancillary service* adalah ketersediaan fasilitas pendukung guna memberi kemudahan dan kenyamanan dalam berwisata. Menurut Suwanto (1997: 22) sarana pariwisata sebagai kelengkapan fasilitas di destinasi wisata untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan fasilitas pendukung di suatu destinasi wisata harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Berdasarkan pernyataan dari dua tokoh tersebut maka pembangunan sarana dan prasarana penting bagi suatu destinasi wisata termasuk Desa Wisata Budaya Kemiren untuk memenuhi kebutuhan wisatawan sehingga ada kenyamanan dalam berwisata. Salah satu fasilitas yang penting adalah sarana dan prasarana kebersihan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos

dan Telekomunikasi No: KM.5/UM.209/MPPT-89 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sapta Pesona Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, salah satu unsur dalam sapta pesona adalah bersih. Bersih sebagai kondisi dimana lingkungan, kualitas produk dan pelayanan di suatu destinasi wisata mencerminkan keadaan yang sehat dan *higienis* sehingga menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang nyaman dan aman bagi wisatawan.

Perda Banyuwangi No. 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata Pasal 3

huruf d menyebutkan mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan bersih, rapi dan sehat adalah tujuan pengembangan desa wisata. Pemerintah desa mendukung hal itu dengan menyediakan sarana prasarana pendukung kebersihan di Kemiren sejak 2019. Selain itu juga menyediakan satu petugas pemungut sampah dan membentuk bank sampah untuk pengelolaan sampah plastik dengan mendaur ulang sampah. Sarana prasarana kebersihan lingkungan tersebut dapat mendukung eksistensi pariwisata di Kemiren, karena dapat memberikan rasa bersih, aman dan nyaman pada wisatawan.

2. Faktor Penghambat

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren memiliki beberapa faktor penghambat. Berdasarkan data yang diperoleh, ada 4 faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren, diantaranya yaitu:

a. Kurangnya kesadaran masyarakat

Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari kesadaran masyarakat sekitar destinasi wisata. Sejalan dengan penjelasan Suwanto (1997:23-24), dimana yang ikut berperan dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata adalah masyarakat di sekitar objek wisata itu sendiri. Masyarakatlah yang

menyambut wisatawan sekaligus memberikan pelayanan seperti amenities dan atraksi. Sehingga sadar wisata dalam diri masyarakat penting terutama bagi Desa Kemiren yang merupakan desa wisata budaya.

Dalam hal ini masyarakat Kemiren kurang sadar dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal itu mempengaruhi kenyamanan dan keamanan wisatawan, karena kebersihan menjadi salah satu bagian dari *sapta pesona* pariwisata. *Sapta pesona* menjadi pedoman untuk menciptakan masyarakat sebagai tuan rumah yang dapat menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan 7 unsur dalam *Sapta Pesona* tersebut. Maka rendahnya kebersihan lingkungan dapat menghambat perkembangan Desa Wisata Budaya Kemiren, sehingga kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan penting untuk perkembangan Desa Kemiren.

Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, dalam program pelatihan, dan dalam memanfaatkan peluang pariwisata terutama warga di Dusun Kedaleman, dimana minat dan kesadaran (*awareness*) warga terhadap pentingnya pariwisata masih rendah. Hal itu disebabkan beberapa hal salah satunya kurangnya manfaat yang dirasakan.

Munir & Fitanto, (2008) dalam (Fitari dan Ma'rif, 2017:2), menyatakan pengembangan desa wisata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dengan menciptakan lapangan pekerjaan, merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi dan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan penyediaan pelayanan bagi warganya. Menurut Fildzah A'inun N, dkk, (2014:2) tujuan desa wisata agar menjadi desa yang mandiri karena dapat menyediakan lapangan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja setempat.

Tujuan desa wisata juga dituliskan dalam Perda Banyuwangi No. 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata Pasal 2, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa seperti melalui terbukanya peluang lapangan kerja dan usaha baru, serta meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya. Maka adanya desa wisata bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, namun kenyataannya tidak semua warga Kemiren merasakan manfaat dari adanya Desa Wisata Budaya Kemiren, terutama warga Dusun Kedaleman.

Hal tersebut diungkapkan beberapa masyarakat di Dusun Kedaleman, dimana menurut mereka adanya Desa Wisata Budaya Kemiren tidak memberi pengaruh dan manfaat pada kehidupan mereka. Dengan begitu maka tujuan dibentuknya desa wisata di Kemiren untuk menyejahterakan masyarakat masih belum berhasil. Karena hanya sebagian masyarakat yang merasakan manfaatnya terutama masyarakat yang dekat dengan pusat kegiatan wisata.

Rendahnya partisipasi warga Dusun Kedaleman juga disebabkan oleh kurangnya destinasi dan kegiatan pariwisata yang bertempat di Dusun Kedaleman. Destinasi dan kegiatan pariwisata masih berpusat di Dusun Krajan, maka pemerataannya masih kurang dan menyebabkan warga Dusun Kedaleman kurang merasakan dampak dari pariwisata. Menurut beberapa warga Dusun Kedaleman salah satunya Ibu Nita saat diwawancarai terkait manfaat yang dirasakan serta pemerataan destinasi dan kegiatan pariwisata, beliau menyatakan belum merasakan manfaat dan kegiatan pariwisata masih berpusat di Dusun Krajan. Bahkan saat ditanya terkait pemberdayaan, beliau menyatakan warga Dusun Kedaleman kurang diberdayakan.

Bapak Jamari selaku ketua RT 2 RW 1 di Dusun Kedaleman menyatakan kurangnya partisipasi dikarenakan jauh dengan pusat kegiatan

wisata yang ada di Kemiren barat dan tengah. Bapak Supriyanto selaku Sekretaris Desa Kemiren juga menyatakan kegiatan pariwisata kurang merata dan masih berpusat di Kemiren barat karena destinasi wisata paling banyak di lingkungan Kemiren Barat, sedangkan di Dusun Kedaleman hanya ada wisata edukasi Tari Gandrung, edukasi Tari Barong, dan museum. Pengurus pokdarwis yaitu Mas Ade juga membenarkan hal tersebut, dimana menurutnya yang lebih banyak diberdayakan warga Dusun Krajan dengan alasan agar pelayanan untuk wisatawan lebih cepat karena dekat dengan pusat wisata.

Kurangnya kesadaran masyarakat juga diakibatkan oleh gangguan pola pikir masyarakat. Sudah lama ada disparitas di antara warga Dusun Kedaleman dengan warga Dusun Krajan. Disparitas itu terkait perekonomian dan pendidikan warga Dusun Kedaleman yang lebih rendah dibanding warga Dusun Krajan. Hal itu menyebabkan perbedaan pola pikir dimana warga Dusun Kedaleman merasa minder atau kurang percaya diri dan merasa disisihkan. Hal itu diungkapkan oleh beberapa masyarakat Kemiren sendiri seperti Bapak Mastuki, Bapak Supriyanto, Mas Ade, dan Ibu Sriwati. Dengan begitu maka di Desa Wisata Budaya Kemiren terdapat kesenjangan sosial.

Untuk kurangnya partisipasi warga Dusun Kedaleman dalam program atau kegiatan pelatihan dikarenakan program pelatihan tersebut kurang menyentuh kebutuhan masyarakat dan kurangnya wadah bagi mereka untuk mempraktekkan hasil dari pelatihan. Sehingga masyarakat kurang berminat dan cenderung tidak memanfaatkan ilmu yang diperoleh dari pelatihan. Beberapa hal itulah yang menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi di kegiatan pariwisata. Sesuai pendapat Suwanto (1997: 22), kurangnya kesadaran masyarakat dapat menghambat perkembangan Desa Wisata

Budaya Kemiren karena dalam desa wisata terutama desa wisata budaya, kearifan lokal masyarakatnya yang disuguhkan pada wisatawan. Dengan melihat pentingnya peran dan partisipasi masyarakat serta berbagai penyebab kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat maka perlu adanya perbaikan untuk mempermudah jalanya pengembangan desa wisata.

b. Kurangnya Kapasitas atau Kompetensi SDM Pokdarwis Kencana Kemiren

Menurut Sunaryo (2013:219) pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata harus diarahkan pada beberapa hal salah satunya meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat. Hal itu juga diungkapkan Fitriani dan Ma'rif (2017:4), menurutnya fokus utama pengembangan desa wisata yaitu memperkuat kemampuan masyarakat lokal dalam mengarahkan dan mengatasi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga kompetensi masyarakat di suatu desa wisata sangat perlu ditingkatkan untuk menunjang pengembangan wisata begitu juga Desa Wisata Budaya Kemiren.

Kenyataannya kompetensi SDM Pokdarwis Kencana Kemiren masih kurang terutama bidang Informasi Teknologi (IT) dan kearsipan. Pada jaman sekarang IT sangat dibutuhkan seperti dalam pemasaran, pemesanan dan lainnya untuk mempermudah wisatawan mengakses suatu destinasi wisata.

Dengan begitu SDM yang ahli di bidang IT sangat diperlukan terutama untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren. Kearsipan juga sangat penting agar pencatatan keuangan, pengeluaran, wisatawan dan lainnya jelas.

Sehingga peningkatan kompetensi SDM Pokdarwis Kencana Kemiren perlu dilakukan untuk menunjang pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren.

c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Seperti menurut Suwanto (1997: 22) terkait sarana dan prasarana, tempat parkir dan jaringan internet juga kebutuhan wisatawan dalam berwisata. Kurangnya lahan parkir di Desa Wisata Budaya Kemiren dapat mengganggu lalu lintas karena wisatawan dalam kuota besar dan dengan kendaraan besar memakai bahu jalan untuk parkir sehingga mengganggu ketertiban, keindahan dan kenyamanan wisatawan. Dalam sapta terdapat unsur aman, tertib, dan indah. Maka kurangnya lahan parkir untuk wisatawan bisa menghambat pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren.

Jaringan internet juga bagian dari fasilitas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Nyatanya jaringan internet di Desa Kemiren cukup sulit diakses terutama bagi pengguna kartu perdana selain *Telkomsel* dan bagi wisatawan mancanegara, sedangkan *wifi* hanya tersedia di Kantor Desa Kemiren. Dalam sapta pesona destinasi pariwisata harus mewujudkan kondisi yang bisa menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi tersebut. Adanya fasilitas internet dapat menarik minat wisatawan karena dengan terpenuhinya kebutuhan wisatawan dapat menciptakan kenyamanan dalam berwisata.

Kurangnya jaringan internet yang merupakan salah satu kebutuhan penting di era sekarang dapat mengganggu komunikasi ataupun mengganggu keperluan lainnya seperti untuk mengakses media sosial ataupun aplikasi lainnya. Internet sangat penting untuk menunjang kegiatan kepariwisataan terutama dalam pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren yang ingin memasarkan desa wisatanya melalui aplikasi *Airbnb Experiences*. Sehingga kurangnya jaringan internet di area Desa Wisata Budaya Kemiren juga dapat menghambat pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi dan kualitas hidup masyarakat dapat menjadi salah satu cara membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu pemberdayaan masyarakat dapat menjadi salah satu strategi dalam pembangunan ataupun pengembangan di berbagai sektor, salah satunya sektor pariwisata. Pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren perlu dilakukan untuk mensejahterakan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan kearifan lokal. Dengan berkembangnya Desa Wisata Budaya Kemiren dapat membangun desa dan secara tidak langsung bisa menjadikan Desa Kemiren sebagai desa mandiri dan bisa merubah perekonomian desa menjadi lebih baik. Pemberdayaan masyarakat penting untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren juga karena kearifan lokal masyarakat Kemirenlah yang dijual atau disuguhkan ke wisatawan dan masyarakat sebagai subjek yang menyediakan amenities dan atraksi wisatanya. Maka partisipasi masyarakat dan peningkatan kompetensi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat penting dan perlu dilakukan untuk mendukung kegiatan pariwisata sehingga terjadi pengembangan.

Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terkait pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Desa Kemiren

dan Pokdarwis Kencana Kemiren dalam pengembangan potensi wisata budaya yang ada di Desa Wisata Kemiren.

Selanjutnya, disimpulkan bahwa pemberdayaan tersebut berdasarkan tiga arah pemberdayaan dari Kartasasmitha (1996) dalam (Zubaedi, 2013:79) yaitu *enabling* (memungkinkan), *empowering* (memperkuat potensi), dan *protection* (melindungi) diwujudkan dalam beberapa program atau kegiatan pemberdayaan.

Enabling dilakukan dengan pembentukan pokdarwis, dengan pertemuan rutin, dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan, dan terakhir dengan Program Pembangunan Rumah Adat Osing. *Empowering* dilakukan dengan studi banding, pelatihan, pembangunan sarana prasarana pendukung kepariwisataan, dan dengan pembentukan Pasar Kampung Osing. Sedangkan *protection* berupa Perda Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata khususnya Pasal 11 serta dengan pembentukan tata tertib dalam pelaksanaan Pasar Kampung Osing.

Dari ketiga arah pemberdayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih lemah dalam *enabling* dan *protection*. Dimana kenyataannya program atau kegiatan dalam *enabling* belum bisa meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat Kemiren terutama masyarakat Dusun Kedaleman yang disebabkan kurangnya pemerataan kegiatan dan destinasi wisata serta adanya disparitas sosial ekonomi antara warga Dusun Kedaleman dan Dusun Krajan. Sedangkan *protection* dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan desa wisata Kemiren belum mampu dilakukan sendiri oleh pemerintah desa, dimana pemerintah desa belum memberi *protection* pada masyarakat Kemiren dalam pengelolaan Desa Wisata Budaya Kemiren. *Protection* dalam Desa Wisata Budaya Kemiren lebih banyak

dilakukan oleh pemerintah daerah. Maka keberhasilan program pemberdayaan akan tercapai apabila Desa mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.

Pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan potensi wisata budaya di Desa Kemiren memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren, yaitu:

1. Faktor pendukung berupa :

- a. Kearifan lokal masyarakat
- b. Partisipasi masyarakat
- c. Dukungan dari pemerintah pemerintah daerah dan pemerintah desa

2. Faktor penghambat berupa :

- a. Terbatasnya literasi masyarakat desa terkait lingkungan hidup dan kepariwisataan terutama masyarakat Dusun Kedaleman
- b. Terbatasnya kompetensi SDM pengelola Desa Wisata Budaya Kemiren
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pariwisata

Berdasarkan beberapa hal tersebut maka kesimpulan akhir dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren adalah bahwa keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengembangan di desa membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah.

Dimana dukungan tersebut dapat mempercepat proses pemberdayaan dan pengembangan suatu desa wisata termasuk salah satunya Desa Wisata Budaya Kemiren. Dengan demikian maka semakin menguatkan bahwa dalam sistem pemerintahan desa dukungan pemerintah daerah sangat dominan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, berikut ini beberapa saran atau masukan yang dapat digunakan untuk pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren yaitu:

1. Untuk meningkatkan *protection* dalam pengelolaan Desa Wisata Budaya pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat melakukannya dengan:

a. Dibentuknya aturan atau regulasi dari Pemerintah Desa Kemiren yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, karena selama ini belum ada *protection* dari Pemerintah Desa Kemiren.

b. Pemerintah daerah harus menyerahkan pengelolaan Wisata Osing (WO) pada masyarakat Desa Kemiren sebagai salah satu bentuk *protection* pada masyarakat sebagai pengelola Desa Wisata Budaya Kemiren. Dengan menyerahkan pengelolaan WO pada masyarakat diharapkan juga dapat meminimalisir permasalahan terkait kurangnya lahan parkir serta menunjang kegiatan pariwisata dan pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren sehingga lebih banyak masyarakat yang akan terbedayakan.

2. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat Kemiren khususnya Dusun Kedaleman dalam pariwisata dapat dilakukan dengan:

a. Pemerintah Desa Kemiren dan Pokdarwis Kencana Kemiren harus melakukan pemerataan destinasi dan kegiatan pariwisata dengan membentuk kegiatan kepariwisataan yang dapat berupa perlombaan kesenian, festival budaya, pertunjukan seni ataupun membuat destinasi baru yang berlokasi di Dusun Kedaleman lingkungan RW 1 dan RW 2

b. Pemerintah Desa Kemiren dan Pokdarwis Kencana Kemiren harus melibatkan atau menjadikan masyarakat Dusun Kedaleman sebagai

bagian dalam kegiatan kepariwisataan seperti menjadikan masyarakat sebagai panitia pelaksana atau memberikan tanggung jawab dan lainnya

c. Pemerintah Desa Kemiren dan Pokdarwis Kencana Kemiren harus menekankan dan mensosialisasikan 7 unsur dalam Sapta Pesona pada masyarakat Kemiren khususnya terkait pentingnya menjaga kebersihan sebagai tuan rumah agar tercipta suatu keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Dengan kata lain pemerintah perlu meningkatkan literasi masyarakat desa terkait lingkungan hidup dan kepariwisataan.

d. Selain itu juga perlu menambah petugas kebersihan yang bertugas mengambil sampah di rumah-rumah masyarakat dan yang bertugas dalam pengelolaan bank sampah. Desa Wisata Budaya Kemiren juga perlu petugas kebersihan di setiap destinasi wisata seperti di Cagar Budaya Sukosari, Petilasan Buyut Cili dan lainnya.

3. Untuk meningkatkan literasi masyarakat dan SDM Pokdarwis Kencana Kemiren, dapat dilakukan dengan cara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Desa Kemiren harus bekerjasama menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan atau yang diperlukan masyarakatnya. Seperti kompetensi SDM Pokdarwis Kencana Kemiren yang kurang di bidang IT dan kearsipan, maka pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu menyediakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan literasi SDM di bidang IT dan kearsipan.

4. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dan pokdarwis harus lebih ditingkatkan dengan cara koordinasi dan komunikasi yang intens baik melalui kecamatan maupun dinas pariwisata. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan Desa Wisata Budaya Kemiren. Sehingga seperti dalam hal pembangunan sarana prasarana kepariwisataan dapat berjalan lebih cepat.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggara Sumantri, Sahya. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fildzah A'inun N, Hetty Krisnani, & Rudi Saprudin Darwis, vol 2, nomor 3, hal 301-444, ISSN: 2442-4480, "Pengembangan Desa Wisata Melalui Konsep *Community Based Tourism*".
- Gayatri, I. G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: AndiPublisher.
- Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Parktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadinoto, K. (1996). *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Harun. (2014). *Buku Panduan Sapta Pesona*. Denpasar: Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- Karjuni Dt. Maani, Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat, 2011, Vol. 10, No. 1, hlm. 59
- Kutha R, N. (2011). *Antropologi Sastra Peranan Unsur-unsur Kebudayaan Dalam Proses Kreatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep dan Implementasi Cetakan 1*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Makmur, M. (2003). *Dasar-Dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik*. Malang: UB Press.
- Mardikanto dan Soebiato. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Meleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudana, I. W. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Tujuan Wisata Desa Pemuteran Dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2303-2898, Vol. 4, No. 2, Oktober.



- Muljadi dan Warman, A. (2014). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mulyawan, R. (2016). *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. Bandung: Unpad Press.
- Noor, M. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol 1 No. 2.
- Nugroho, I dan D. Negara, Purnawan. (2015). *Pengembangan Desa Melalui Ekowisata: Dilengkapi Dengan Peraturan Perundang Tentang Pedoman Pengembangan Desa Wisata*. Surakarta: Era Adicitra Intermedia.
- Nuryanti, W. (1993). *Concept, perspective, and challenges. Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pendit, N. S. (2004). *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032
- Permana, A. F. (2018). *Konseptual Tentang Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa*. At-Thoriq, 42-43.
- Rasyid, M. R. (1997). *Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*. Jakarta: MIPI Yarsip.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025
- Said, A. (2012). *Program Studi Perencanaan Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Siagian, S. P. (2005). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soetomo. (2012). *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyani, A. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Sumodiningrat, G. (1997). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Edisi Kedua*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.

Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gava Media.

Supartini. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi Desa Wisata Ketingan Kabupaten Sleman Di Yogyakarta*. Jurnal Nasional Pariwisata, 57-71, vol. 4, Nomor 1.

Suryono, A. (2004). *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri.

Suryono, A. (2006). *Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (UM PRESS).

Suwantoro, G. (2004). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi offset.

Syafiie, I. (2006). *Sistem Administrasi Publik Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Theresia, A. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfa Beta.

Tuloli, dkk. (2003). *Dialog Budaya, Wahana Pelestarian Dan Pengembangan Kebudayaan Bangsa*. Jakarta: CV. Mitra Sari.

Umar, H. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Wahyuni, D. (2018). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul*. Jurnal Masalah-masalah Sosial, 2614-5863, vol. 9, no. 1 Juni 2018.

Wrihatnolo, R. R. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Media Komputindo.

Zaenuri, M. (2012). *Perencanaan Strategi Kepariwisata Daerah Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: E-Gov Publishing.

Yessi Fitriani, Samsul Ma'rif. (2017). *Manfaat Pengembangan Desa Wisata Wonolopo terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Masyarakat Lokal*. Volume 5 Nomor 1, April 2017, 29-44, P-ISSN: 2338-1604 dan E-ISSN: 2407-8751

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA/INTERVIEW GUIDE

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Desa Kemiren, Pokdarwis Kencana Kemiren, serta Pelaku kesenian dan masyarakat Desa Kemiren

1. Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan wisata di Banyuwangi
2. Pemberdayaan masyarakat dalam Peraturan Daerah Banyuwangi tentang desa wisata dan rencana induk pembangunan kepariwisataan Banyuwangi
3. Bentuk program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam *enabling, empowering, dan protection* untuk pengembangan pariwisata di Banyuwangi dari DISBUDPAR
4. Tujuan dan harapan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Banyuwangi
5. Alasan ditetapkannya Desa Kemiren sebagai desa wisata budaya
6. Pengelolaan wisata di Desa Wisata Kemiren
7. Manfaat atau dampak yang dirasakan dari adanya Desa Wisata Kemiren
8. Sikap masyarakat Kemiren dengan adanya desa wisata Kemiren
9. Upaya Pemerintah Desa Kemiren untuk pengembangan Desa Wisata Kemiren
10. Pembentukan Pokdarwis Kencana Kemiren
11. Yang dilakukan pokdarwis dalam pengembangan Desa Wisata Kemiren
12. Program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kemiren dari DISBUDPAR
13. Bentuk program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Kemiren dari Pemerintah Desa Kemiren
14. Bentuk program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Kemiren dari Pokdarwis Kencana Kemiren
15. Tujuan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kemiren
16. Aktor dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Kemiren
17. Subjek dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Kemiren
18. Program atau kegiatan pemberdayaan untuk menyadarkan masyarakat akan potensi wisata Kemiren dari Pemerintah Desa Kemiren
19. Program atau kegiatan peningkatan kapasitas atau kemampuan masyarakat untuk menunjang kegiatan wisata di Kemiren dari Pemerintah Desa Kemiren
20. Program atau kegiatan untuk melindungi pokdarwis dan masyarakat sebagai pengelola atau pelaku wisata di Kemiren dari Pemerintah Desa Kemiren
21. Program atau kegiatan pemberdayaan untuk menyadarkan masyarakat akan potensi wisata Kemiren dari Pokdarwis Kencana Kemiren
22. Program atau kegiatan peningkatan kapasitas atau kemampuan masyarakat untuk menunjang kegiatan wisata di Kemiren dari Pokdarwis Kencana Kemiren
23. Program atau kegiatan untuk melindungi pokdarwis dan masyarakat sebagai pengelola atau pelaku wisata di Kemiren dari Pokdarwis Kencana Kemiren


24. Keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan wisata dan dalam pengembangan Desa Wisata Kemiren
25. Pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan kegiatan pariwisata di Desa Wisata Kemiren
26. Partisipasi masyarakat dalam program atau kegiatan pemberdayaan dari DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi, dari Pemerintah Desa Kemiren dan dari Pokdarwis
27. Manfaat atau pengaruh yang dirasakan masyarakat Kemiren dari adanya program pemberdayaan dari DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi, dari Pemdes Kemiren dan dari Pokdarwis
28. Permasalahan dalam pengelolaan dan dalam pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan yang diberikan DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi, Pemdes dan Pokdarwis Kencana Kemiren
29. Penghambat pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Kemiren
30. Pendukung dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Desa Wisata Kemiren
31. Yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan Desa Wisata Kemiren dan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Desa Wisata Kemiren



LAMPIRAN 2

SURAT PENGANTAR RISET

a. Surat Pengantar Riset dari Fakultas Ilmu Administasi


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jalan MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. +62341 553737, 568914, 558226 Fax. +62341-558227
 E-mail : fia@ub.ac.id <http://fia.ub.ac.id>


Nomor : 8869/UN10.F03.11/PN/2020
 Lampiran : -
 Hal : Riset

Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa:

Judul : Agil Safitri Suparman
 Alamat : RT 002 / RW 002 Jalan Akasia, Lingkungan Payaman, Kelurahan Giri, Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi
 Jurusan : Administrasi Publik
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul : Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Potensi Wisata Budaya (Studi Pada Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)
 Lokasi : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
 2. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi
 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
 4. Kecamatan Glagah
 5. Desa Kemiren
 6. Kelompok Sadar Wisata Desa Kemiren
 7. Lembaga Adat Desa Kemiren
 Waktu : 10 Maret 2020 sampai dengan 30 Juni 2020

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Malang, 4 Maret 2020

 Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Publik
Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.
 NIP 19670217 199103 1 010

b. Surat Pengantar Riset dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416
Telepon (0333) 412343 Faks (0333) 412343
email : dpmptsp@banyuwangikab.go.id website : www.dpmptspbwi.banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 16 Maret 2020
Kepada

Nomor	: 072/165.REKOM/429.111/2020	Yth. Sdr	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sifat	: Biasa		2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Lampiran	-		3. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Perihal	: <u>Surat Pengantar Penelitian/Survei/Research</u>		4. Camat Glagah
			5. Kepala Desa Kemiren
			6. Kepala Poldarwis Desa Kemiren
			7. Kepala Lembaga Adat Desa Kemiren Kab. Banyuwangi
			di BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Tanggal : 4 Maret 2020
Nomor : 2869/UN10.F03.11/PN/2020

Maka dengan ini memberi Pengantar dalam rangka Pengantar Penelitian :
Nama : Agil Safitri Suparman
NIM : 1650310111020
Prodi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Administrasi Publik


Bermaksud untuk melakukan Permohonan Penelitian/Survei/Research:
Judul : Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Potensi Wisata Budaya (Studi Pada Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)

Tempat : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pendapatan Daerah, Kantor Kecamatan Glagah, Kantor Desa Kemiren

Waktu : 10 Maret s/d 31 Juni 2020

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan:

1. Peserta wajib menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenismya kepada Instansi tempat pelaksanaan penelitian.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI
Sekretaris

NUR AGUS SUHARTO, SH
Pemhimpit Tingkat I
NIP. 19560804 199403 1 00

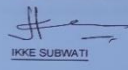
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416
Telepon / Fax (0333) 412 343
Website : www.dpmptsp_bwi.banyuwangikab.go.id Email : dpmptspbwi@banyuwangikab.go.id

TANDA BUKTI PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN PERIZINAN

No. Registrasi : 2020.000924 Tanggal Registrasi : 13 Maret 2020
Nama : AGIL SAFITRI SUPARMAN Identitas : 3510178804970002
Alamat : Lingkungan Payaman RT.02 RW.02 Kelurahan Giri Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi

Penusahaan : UNIVERSITAS BRAWIJAYA Tgl. Penerimaan Berkas : 13 Maret 2020, 13:52:58

No.	Jenis Perizinan	Sifat Permohonan
1	Surat Keterangan Penelitian	Baru

Mengetahui,
Kepala Seksi Pelayanan
Banyuwangi, 13 Maret 2020
Petugas Front Office

IKKE SUBWATI

MOH. KHAIRUL ANAM, S.AP

d. Surat Keterangan Penyelesaian Penelitian dari DISBUDPAR
Kabupaten Banyuwangi



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 78 Banyuwangi 68416
Telepon. (0333) 424172 Faks. (0333) 412851
email : pemasaran@banyuwangitourism.com
website : www.banyuwangikab.go.id – www.banyuwangitourism.com

SURAT – KETERANGAN

Nomor : 556/2546/429.110/2020

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, yang bernama :

AGIL SAFITRI SUPARMAN NIM : 165030101111020

Telah melakukan Penelitian dengan Judul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Potensi Wisata Budaya(studi pada Desa Kemiren,Kecamatan Glagah,Kabupaten Banyuwangi” pada tanggal 13 Maret s/d 31 Oktober 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.


Banyuwangi, 11 November 2020

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI



SM. Y. R. MUDA, S.Sos, MBA, MM
Pemoma Utama Muda
NIP. 19730126 199201 1 001

e. Surat Keterangan Penyelesaian Penelitian dari Desa Kemiren

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH
DESA KEMIREN
Jln. Perkebunan Kalibendo No. 238 Telp.(0333) 410422
K E M I R E N

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 470/651/429.503.02/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini

- N a m a : MOHAMAD ARIFIN
- Jabatan : KEPALA DESA KEMIREN


Dengan ini memberikan keterangan yang sebenar - benarnya bahwa :

Nama : AGIL SAFITRI SUPARMAN
Fakultas : Ilmu Administrasi
Kampus : Universitas Brawijaya

Benar mahasiswi tersebut diatas telah melakukan Penelitian Di Desa Kemiren Kec Glagah Kab Banyuwangi mulai bulan Maret s/d November 2020 dengan Judul “ **Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Potensi Wisata Budaya**”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon periksa adanya.

Dibuat di : Kemiren
Pada tanggal : 06 November 2020
KEPALA DESA KEMIRN


MOHAMAD ARIFIN

LAMPIRAN 3**LOGBOOK PENELITIAN SKRIPSI FIA UB**

Nama : Agil Safitri Suparman

NIM : 165030101111020

Judul Penelitian : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Potensi Wisata Budaya (Studi Pada Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	13/03/2020	Menyerahkan surat pengantar riset dari FIA ke DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi
2.	20/03/2020	1. Mengambil surat desposisi atau surat pengantar riset dari DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi 2. Menyerahkan surat pengantar riset dari DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi kepada DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Kecamatan Galagah
3.	23/03/2020	1. Mengambil surat rekomendasi penelitian dari Kecamatan Glagah 2. Menyerahkan surat desposisi atau surat rekomendari penelitian dari Kecamatan Glagah kepada Kantor Desa Kemiren
4.	06/04/2020	1. Wawancara dengan Bapak Deddy Wahyu Hernanda 2. Meminta data Renstra, Renja, dan daftar pelatihan di BISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi 3. Meminta data RPJMDes di Pemerintah Desa Kemiren
5.	07/04/2020	1. Meminta data hotel dan <i>homestay</i> tahun 2016-2020 di DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi 2. Meminta data susunan pemerintahan dan profile desa di Pemerintah Desa Kemiren
6.	06/05/2020	Wawancara dengan Bapak Fauzi
7.	21/05/2020	1. Wawancara dengan Bapak Iswanto 2. Wawancara dengan Mas Edy 3. Meminta SK penetapan Desa Kemiren sebagai desa wisata pada Pemerintah Desa Kemiren 4. Meminta data program kerja Pokdarwis Kencana Kemiren tahun 2017-2020 pada pokdarwis
8.	11/06/2020	1. Wawancara dengan Ibu Siamah 2. Wawancara dengan Mas Indra 3. Wawandengan Ibu Sriwati
9.	22/06/2020	1. Wawancara dengan Bapak Darmanto 2. Meminta data guide HPI dan Non HPI ke DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi

		3. Meminta data <i>guide</i> di Desa Wisata Budaya Kemiren pada Pokdarwis Kencana Kemiren
10.	27/06/2020	1. Wawancara dengan Bapak Mastuki 2. Wawancara dengan Mas Ade
11.	29/06/2020	1. Wawancara dengan Bapak Supriyanto 2. Meminta data tentang pelatihan yang diterima Pokdarwis Kencana Kemiren dari DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi dan tahun 2016-2020 dan data pelatihan dari Pokdarwis Kencana Kemiren untuk masyarakat Kemiren tahun 2017-2020
12.	12/07/2020	1. Wawancara dengan Ibu Nita 2. Wawancara dengan Bapak Selamat 3. Wawancara dengan Bapak Jamari 4. Meminta data jumlah rumah adat, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata di Pemerintah Desa Kemiren
13.	25/08/2020	Meminta data struktur dan profile DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi pada DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi
14.	6/11/2020	Menerima surat keterangan penyelesaian penelitian dari Desa Kemiren
15.	11/11/2020	Menerima surat keterangan penyelesaian penelitian dari DISBUDPAR Kabupaten Banyuwangi

LAMPIRAN 4**DOKUMENTASI****a. Wawancara dengan Bapak Iswanto Selaku Kepala****b. Wawancara dengan Bapak Darmanto****c. Wawancara dengan Bapak Supriyanto Selaku Sekretaris Desa****Kemiren**

d. Wawancara dengan Bapak Mastuki



e. Wawancara dengan Mas Ade Selaku Sie Humas dan Pengembangan

SDM Pokdarwis



f. Wawancara dengan Ibu Sriwati



g. Wawancara dengan Ibu Nita



h. Wawancara dengan Ibu Siamah



i. Wawancara dengan Bapak Sugiarto



j. Kegiatan Pelatihan membuat



LAMPIRAN 5

SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN POKDARWIS Kencana Kemiren



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN
NOMOR : 188/ /429.503.02/2017

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS POKDARWIS KENCANA
DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMIREN

- Menimbang** :
- a. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) adalah salah satu alternatif Pengembangan Pariwisata Nusantara yang dilakukan kelompok sadar wisata melalui berbagai kegiatan antara lain Pembinaan Kelompok Swadaya dan Swakarsa masyarakat yang berfungsi sebagai Penggerak Pembangunan Pariwisata.
 - b. Tujuan Pembentukan Pokdarwis adalah sebagai mitra Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang pariwisata, meningkatkan sumber daya manusia, mendorong terwujudnya Sapta Pesona (keamanan, ketertiban, keindahan, kesejukan, kebersihan, keramah tamahan dan kerangan), Meningkatkan mutu Produk Wisata dalam rangka Meningkatkan daya saing serta memulihkan Pariwisata secara keseluruhan.
- Mengingat** :
- a) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-undang Desa;
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM 07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM 04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
 - g) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 11 PM. 17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN
 NOMOR : 188/ /KEP/429.503.02/2017
 TANGGAL : 20 Juni 2017

**SUSUNAN PENGURUS POKDARWIS
 DESA KEMIREN
 KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI**

PEMBINA : KEPALA DESA KEMIREN
 PEMBIMBING : SEKRETARIS DESA KEMIREN

Ketun : Moh. Edy Saputro
 Wakil : Moh. Efendy
 Sekretaris : Rini Muryani
 Bendahara : Hepi Suciati

Anggota : 1. Ahmad Ferdiansyah
 2. Dikri Wahyu P
 3. Zesy irama
 4. Dika Wahyu
 5. Rizal Harista
 6. Ade Pramana Putra
 7. Rianto Agus
 8. Dedi Teguh Slamet
 9. Kezia Fitriani
 10. Ahmad Khoiri

Ditetapkan di : KEMIREN
 Pada tanggal : 20 JUNI 2017

KEPALA DESA KEMIREN



LILIK YUSIATI

LAMPIRAN 6

CURRICULUM VITAE

Nama : Agil Safitri Suparman

Nomor Induk Mahasiswa : 165030101111020

Tempat dan Tanggal Lahir : Nganjuk, 28 April 1997

Email : agilsuparmans@gmail.com

Nomor HP : 08993626559/081330185638

Pendidikan Formal : 1. SDN 1 Giri Banyuwangi (2004-2010)

2. SMPN 1 Glagah Banyuwangi (2010-2013)

3. SMAN 1 Giri Banyuwangi (2013-2016)

4. Universitas Brawijaya (2016-2020)

Pendidikan Non-Formal : Magang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Malang (DPUPR)

Pengalaman Organisasi dan Kepanitian :

1. Staff Kestari dalam acara Seminar Nasional *Attraction* 2017
2. Anggota *Event Organisas (EO) Administration Music Club (AMC)* 2017
3. Anggota Sponsorship dalam acara *Tribute AMC* 2018
4. Bendera Pelaksana dalam acara *Launching Album AMC "Niskala 2018"*
5. Koordinator *Consumption On Delivery* dalam acara Ospek Fakultas Ilmu Administrasi 2018
6. Bendahara Umum *Administration Music Club (AMC)* 2019